

**ANALISIS FRAMING BERITA PELARANGAN WAHABI DI
INDONESIA DI SITUS BERITA ONLINE CNNINDONESIA.COM
DAN DETIK.COM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Konsentrasi Penerbitan Dakwah**

Oleh:

Halimah Tusyadiyah

(1901026153)

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Halimah Tusyadiyah
NIM : 1901026153
Fak./Jur. : Dakwah dan Komunikasi/KPI
Judul : Analisis Framing Berita Pelarangan Wahabi di Indonesia di Situs Berita Online CNNIndonesia.com dan Detik.com

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 31 Mei 2023
Pembimbing,
Bidang Substansi Materi &
Bidang Metodologi dan Tata Tulis



Farida Rachmawati, M.Sos.
NIP. 199107082019032021

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**Analisis Framing Berita Pelarangan Wahabi di Indonesia di Situs
Berita Online CNNIndonesia.com dan Detik.com**

Disusun Oleh:

Halimah Tusyadiyah

1901026153

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Juni 2023 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang



Nilnan Ni'mah, M.S.I.

NIP. 19800202 200901 2 003

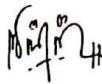
Sekretaris Sidang



Farida Rachmawati, M.Sos.

NIP. 19910708 201903 2 021

Penguji I



Hj. Maya Rini Handayani, M.Kom

NIP. 19760505 201101 2 007

Penguji II



Silvia Riskha Fabriar, M.S.I.

NIP. 19880229 201903 2 013

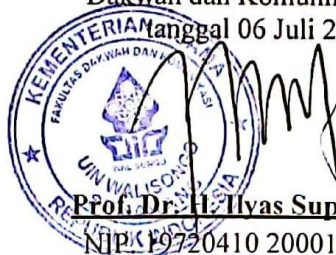
Mengetahui, Pembimbing



Farida Rachmawati, M.Sos.

NIP. 19910708 201903 2 021

Disahkan oleh Dekan Fakultas
Dakwah dan Komunikasi pada
tanggal 06 Juli 2023



Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag

NIP. 19720410 2000112 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil murni kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 31 Mei 2023



Halimah Tusyadiyah

NIM 1901026153

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah swt yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Framing Berita Pelarangan Wahabi di Indonesia di Situs Berita Online CNNIndonesia.com dan Detik.com”.

Sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang sehingga semakin bertambah dan berkembangnya ilmu pengetahuan yang ada di dunia.

Dengan segala kekuatan dan perjuangan, penulis sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi ini, meski penulis sadari karya ini tak lepas dari kekurangan. Mulai dari tata tulis, substansi, maupun kekurangan lainnya. Penulis sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Untuk itu, penulis berterimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. H. M. Alfandi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4. Farida Rachmawati, M.Sos, selaku dosen pembimbing sekaligus wali dosen ditengah kesibukannya tetap meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing, memberikan saran dan nasehat terbaik sejak penulis menjadi mahasiswa baru hingga menyelesaikan masa studi.
5. Segenap dewan penguji yang luar biasa telah memberikan saran dan masukan terhadap penelitian ini.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan beragam ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga membuka wawasan dan pikiran terbuka kepada penulis dan seluruh mahasiswa.

7. Bapak Agus Toni dan Ibu Rochayah, selaku orangtua penulis yang selalu mendukung perjuangan penulis hingga detik ini.
8. Kang Was dan Mba Rosma, Mba Yuni, Mba Meri, Mba Sari serta ponakan lilik tersayang Kak Febi, Kak Bagus, Dedek Adam serta seluruh segenap keluarga penulis dari keluarga besar Bapak dan Ibu yang selalu mendukung penuh dan mendorong semangat penulis untuk tetap berjuang meski keadaan memaksa untuk berhenti.
9. Bestie-bestie randomku Bella, Fiqi, Intan, Isvy yang selalu mewarnai hidupku sehingga aku terhindar dari rasa galau, malang dan kesepian.
10. Sister Fillahku dari zaman maba, Ausa dan Elfa yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk terus berjuang.
11. Sahabatku Alimah dan Safti yang turut mendukung perjuangan penulis dari zaman MTs hingga sekarang
12. Tak lupa my favorite person and lovey Mark Lee dengan lagu dan quotesnya memberikan energi positif sehingga penulis semakin semangat menyelesaikan skripsi dan tak ketinggalan bujang-bujang NCT unit Dream, NCT 127, WayV dengan tingkah random mereka mewarnai ditengah-tengah perjuangan.
13. Keluarga besar KSR PMI Unit UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan belajar, pengalaman berharga dan arti kehidupan yang begitu mengharukan.
14. Teman-teman KKN MIT Posko 66 Tahun 2022 yang berbahagia, saling mendorong dan mendukung penulis agar segera menyelesaikan skripsi
15. Teman-teman KPI-D dan kelas penerbitan 2019 menjadi seperjuangan yang saling memotivasi dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi
16. Segenap keluarga Kos Koeneng terumata Bu Joko dan Bu Deny yang senantiasa memberikan nasehat dan kesempatan untuk menikmati waktu di kos sepanjang perjuangan menuntut ilmu.
17. Keluarga besar Ma'had Al-Jamiah Walisongo, Keluarga Besar MAN Pemalang dan MTs Pemalang sebagai almamater penulis yang memberikan kesempatan belajar dan menimba ilmu yang berharga serta doa yang telah terpanjatkan agar dipermudah dalam menuntut ilmu.

18. Segenap keluarga besar LPM Missi yang menjadi wadah penulis untuk tumbuh dan berkembang dalam proses berpikir.

19. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan studi hingga akhir.

Kepada mereka tidak ada sesuatu yang dapat penulis berikan selain ucapan terimakasih dan doa yang penulis langitkan. Skripsi yang sederhana ini terlahir dari kerja keras yang maksimal dan terbaik dari kemampuan terbatas penulis. Penulis sangat menyadari karya ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya yang akan datang.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan untuk penelitian selanjutnya. Kesempurnaan hanya milik Allah swt dan kesalahan datang dari penulis sendiri. Hanya kepada Allah memohon dan meminta ampunan.

Semarang, 31 Mei 2023

Penulis,



Halimah Tusyadiyah

NIM: 1901026153

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang menjadi tempat penulis menimba ilmu.
2. Orangtua penulis Bapak Agus Toni dan Ibu Rochayah yang selalu mendoakan dan mendukung perjuangan penulis
3. Kang Was, Mba Yuni, Mba Meri, Mba Sari sebagai kakak-kakak kesayangan penulis atas semangat dan bantuan mereka sehingga dapat menyelesaikan masa studi

MOTTO

يُحِبُّ اللَّهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ تُحْسِنَ (رواه الطبري)

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”.

(HR. Thabrani)

الْوَقْتُ كَالسَّيْفِ إِنْ لَمْ تَقْطَعْهَا فَطَعَكَ (رواه مسلم)

“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(H.R. Muslim)

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً (رواه البخاري)

“Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat”

(HR. Bukhori)

ABSTRAK

Halimah Tusyadiyah (1901026153). Analisis Framing Berita Pelarangan Wahabi di Indonesia di Situs Berita Online CNNIndonesia.com dan Detik.com. Skripsi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Wahabi diasosiasikan oleh pengamat sebagai kelompok Islam keras, tidak toleran terhadap pemahaman Islam lainnya. Perkembangan wahabi semakin ekspansif, tidak heran jika kehadiran wahabi seringkali menimbulkan masalah bagi negara karena dipandang sebagai suatu yang membahayakan Pancasila dan NKRI. Wahabi menjadi pro dan kontra antar umat muslim dan kembali menjadi sorotan ketika digelarnya Festival HijrahFest yang diduga sebagai kegiatan penyebaran wahabi. NU sebagai lembaga yang aktif menyebarkan misi Islam toleran mengunggah rekomendasi kepada pemerintah untuk membentuk regulasi pelarangan penyebaran paham wahabi yang dilakukan pada Rakernas di Asrama Haji tanggal 25-27 Oktober 2022. Beberapa media banyak mengunggah berita pelarangan wahabi yang diminta NU kepada pemerintah termasuk CNNIndonesia.com dan Detik.com

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembingkai yang dilakukan oleh situs berita online CNNIndonesia.com dan Detik.com terkait berita pelarangan wahabi di Indonesia dianalisis menggunakan *framing* Robert M Entman. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diambil berupa situs berita pelarangan wahabi di CNNIndonesia.com dan Detik.com. Pengambilan berita dengan mengumpulkan 14 berita dengan rincian tujuh dari CNNIndonesia.com dan tujuh dari Detik.com. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan komunikasi analisis teks media yakni analisis framing. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing model Robert M Entman melalui empat elemen yang dimilikinya yakni pendefinisian masalah (*define problems*), memperkirakan penyebab masalah (*diagnoses causes*), Membuat pilihan moral (*make moral judgement*) dan menekankan penyelesaian (*treatment recommendation*).

Hasil penelitian ini adalah bahwa kedua media cenderung mendukung langkah LDNU untuk menetapkan regulasi pelarangan wahabi di Indonesia. Namun ada perbedaan pemberitaan dari kedua media. Pada CNNIndonesia.com menggunakan frame agama dan politik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa narasumber yang diambil dari organisasi NU dan perwakilan politik yakni Menteri Polhukam. Sedangkan pada Detik.com semua berita menyajikan dukungan terhadap LDNU, namun terdapat pemberitaan yang cenderung kontra dengan langkah tersebut. Pada Detik.com untuk memperkuat penonjolan menggunakan video yang berupa pernyataan-pernyataan dari tokoh agama.

Kata kunci: Wahabi, Analisis *Framing*, LDNU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penelitian	16
BAB II ANALISIS FRAMING, JURNALISTIK ONLINE DAN	
BERITA.....	18
A. Analisis Framing	18
1. Pengertian Framing	18
2. Perangkat Framing Robert M Entman.....	19
3. Teknik Framing Robert M Entman	20
B. Media dan Berita dalam Pandangan	
Kontruksionis	22
C. Jurnalistik Online	27
1. Pengertian Jurnalistik Online	27
2. Prinsip Jurnalistik Online	27
D. Berita.....	29
1. Pengertian Berita	29
2. Nilai Berita	30

BAB III PROFIL CNNINDONESIA.COM DAN DETIK.COM, BERITA PELARANGAN WAHABI DI CNNINDONESIA.COM DAN DETIK.COM	35
A. Profil CNNIndonesia.com.....	35
B. Berita Pelarangan Wahabi di CNNIndonesia.com.....	35
C. Profil Detik.com.....	38
D. Berita Pelarangan Wahabi di Detik.com.....	40
BAB IV ANALISIS BERITA PELARANGAN WAHABI DI CNNINDONESIA.COM DAN DETIK.COM	43
A. Analisis Framing Berita Pelarangan Wahabi di CNNIndonesia.com.....	43
B. Analisis Framing Berita Pelarangan Wahabi di Detik.com	60
C. Persamaan dan Perbedaan Pembingkaihan Pelarangan Wahabi di CNNIndonesia.com dan Detik.com	77
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	89
BIODATA	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perangkat Framing Robert M Entman	20
Tabel 2 Teknik Framing Robert M Entmen	21
Tabel 3 Daftar Berita Pelarangan Wahabi di CNNIndonesia.com	36
Tabel 4 Daftar Berita Pelarangan Wahabi di Detik.com	40
Tabel 5 Analisis Framing Berita Pelarangan Wahabi di CNNIndonesia.com.....	43
Tabel 6 Analisis framing berita “Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Penyebaran Wahabi di RI”.....	44
Tabel 7 Analisis framing berita ”LD PBNU Harap Pemerintah Larang Wahabi Banyak di Masjid Kantor”	47
Tabel 8 Analisis framing “Netizen Risau Penyalahgunaan Cap Wahabi, Singgung Buih di Lautan”	49
Tabel 9 Analisis framing berita “LD PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi hingga Festival HijrahFest”	52
Tabel 10 Analisis Framing Berita “PBNU Klarifikasi Soal Larang Wahabi Yang Beredar di Timur Tengah”.....	55
Tabel 11 Analisis Framing Berita “PBNU: Tak Ada Persetujuan Ketum & Rais Aam Soal Larangan Wahabi di RI”	57
Tabel 12 Analisis Framing Berita “Ketum PBNU Gus Yahya: Larangan Paham Wahabi Belum Resmi”	59
Tabel 13 Analisis Framing Berita Pelarangan Wahabi di Detik.com.....	61
Tabel 14 Analisis Framing Berita “Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi-HijrahFest”	62
Tabel 15 Analisis Framing Berita “Penjelasan PBNU Soal Usulan Agar Pemerintah Larang Wahabi Takfiri”.....	64
Tabel 16 Analisis Framing Berita “Din Syamsuddin Soal Usulan LD PBNU Larang Wahabi Takfiri: Kedepankan Toleransi”	67

Tabel 17 Analisis Framing Berita “Wasekjen: Usulan Ke Pemerintah Larang Wahabi Takfiri Belum Resmi dari PBNU”	69
Tabel 18 Analisis Framing Berita “PBNU Anulir Rilis LDNU Soal Wahabi: Tak Ada Persetujuan Rais Aam-Ketum”	71
Tabel 19 Analisis Framing Berita “Respons Ansor Jatim Soal Larangan Wahabi di Indonesia”	73
Tabel 20 Analisis Framing Berita “PWNU Jatim Sentil Kekompakan PBNU Soal Gaduh Larangan Wahabi Takfiri”	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema <i>Framing</i> Robert M Entman	15
Gambar 2 Infografis Fakta-fakta Paham Wahabi dari Saudi.....	79
Gambar 3 Video Said Aqil Siradj Dalam Webinar.....	80
Gambar 4 Pemberitaan pada Detik.com.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini tercantum dalam pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Adanya bunyi peraturan tersebut, maka tidak salah jika Indonesia sangat terbuka dengan adanya penyebaran agama (Rahmatika, 2009: 99). Perkembangan dakwah Islam sejak era reformasi mengalami dinamika yang menimbulkan diskusi berkepanjangan dari semua pihak. Sejak runtuhnya rezim otoriter Soeharto (orde baru) Indonesia mengalami masa transisi yang membuka kebebasan seluas-luasnya sehingga ideologi luar dapat masuk dengan bebas.

Sebelumnya, pada masa rezim Soeharto, organisasi yang mengatasnamakan Islam yang berwatak keras tak memiliki kekuatan di kalangan masyarakat luas. Hal tersebut karena kepemimpinan rezim Orde Baru sangat tegas terhadap ormas yang tidak patuh terhadap asas pancasila (Aritonang, 2020: 48). Namun pada era reformasi, sekelompok masyarakat Islam bergerak secara keras di ruang publik. Wajah Islam dari kelompok ini menjadi agresif, beringas, intoleran dan penuh kebencian. Perubahan ini ditimbulkan adanya gejala-gejala radikalisme agama yang muncul di Indonesia (Rahmatika, 2009: 100).

Radikalisme agama adalah sebuah paham yang menginginkan perubahan dan pembaharuan menggunakan cara kekerasan. Hal ini ditandai dengan adanya kenyataan aksi-aksi ekstrem yang bertolak belakang dengan mayoritas Muslim negeri yang moderat dan toleran (Jahroni, 2004: 1). Fenomena kekerasan yang mengatasnamakan agama dan etnis cenderung menguat seperti yang terjadi pada konflik Poso, Ambon, bom teroris, kekerasan etnis di Kalimantan, perusakan tempat ibadah dan termasuk kekerasan jamaah Ahmadiyah serta kasus-kasus pertentangan agama yang lain.

Tantangan bangsa Indonesia menjadi besar dengan munculnya beragam kasus agama. Indonesia dikagetkan dengan keberadaan kelompok kecil ingin mengubah konsensus nasional yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka

Tunggal Ika. Klaim kebenaran sepihak ramai diantara umat Islam yang menyebut dirinya telah menjalankan syariat paling benar. Sebagian kecil umat Islam menyebutnya “salafi” pengikut para salaf yang saleh, namun klaim tersebut seringkali menyertakan tuduhan dan kritik tajam di luar kelompok mereka sebagai sesat, kafir, musyrik dan lain-lain (Maula, 2020: 148).

Dakwah secara radikal tak lepas dengan adanya pemahaman wahabi yang intoleran dalam menanggapi sesuatu yang tidak sepaham dengan mereka. Wahabi diasosiasikan oleh pengamat sebagai kelompok Islam garis keras (radikal), tidak toleran terhadap pemahaman Islam lainnya. Dakwah wahabi di Indonesia biasanya dapat ditandai dengan ceramah yang cenderung keras serta seringkali melontarkan tuduhan sesat hingga ujaran kebencian dengan cara membid’ahkan, mengkafirkan, dan mensyirikan kegiatan keagamaan yang dianggap keluar dari Al-Qur’an dan As-Sunnah (Abidin, 2015: 130).

Dakwah wahabi termasuk dalam penyebaran yang dilakukan secara kaku dan radikal. Setidaknya dakwah radikal ini dapat ditandai dengan empat hal yaitu: pertama, sikap intoleran, tidak mau menghargai perbedaan pendapat dan kepercayaan oranglain. Kedua, sifat yang terlalu fanatik dan merasa benar sendiri serta menganggap orang lain salah. Ketiga, memiliki sifat eksklusif yaitu membedakan diri dari kebiasaan mayoritas umat Islam. Keempat, sikap revolusioner, yakni menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan (Saeroji, 2015: 4)

Gerakan radikal yang cukup kuat di Indonesia dikhawatirkan munculnya aksi-aksi terorisme sehingga mendorong pemerintah menerbitkan PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan banyak teroris di Lapas berpaham wahabi. Namun dalam keterangannya, tak semua pemeluk wahabi memiliki ideologi teroris (rzt/gil. “BNPT Ungkap Banyak Teroris Bermazhab Wahabi dan Salafi.” CNNIndonesia.com, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210428073407-12-635708/bnpt->

ungkap-banyak-teroris-bermazhab-wahabi-dan-salafi diakses pada 23 Februari 2023).

BNPT sebagai badan nasional yang bertugas untuk menanggulangi adanya gerakan teroris memberikan lima indikator yang dapat mengetahui adanya penceramah yang berpaham radikal. Pertama, isi kajiannya banyak mengajarkan ajaran anti-Pancasila, Undang-Undang serta pendukung ideologi khilafah transnasional. Kedua, doktrin takfiri yakni mengkafirkan semua pendapat yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Ketiga, selalu menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintahan yang sah dengan membenci dan membangun ketidakpercayaan melalui adu domba, fitnah, hoax, ujaran kebencian. Keempat, mempunyai sikap eksklusif atau khusus terhadap lingkungan serta intoleran terhadap perbedaan pendapat. Kelima, mempunyai pemikiran yang anti budaya ataupun kearifan lokal.

Sejarah wahabi di Indonesia mengalami banyak penolakan di masyarakat Islam. Dakwahnya yang keras dan menimbulkan pertentangan di berbagai daerah seperti Bogor, Aceh dan Sampang, Pamekasan. Penolakan di beberapa daerah tersebut dilandasi adanya ketidaksesuaian dakwah yang disampaikan dengan kebudayaan dakwah yang menjunjung tinggi kearifan lokal di Indonesia Meskipun penolakan terhadap wahabi sudah sering terjadi, pada kenyataannya paham ini masih tumbuh subur di Indonesia.

Isu wahabi ini kembali mencuat ketika sekelompok orang mengadakan kegiatan *Surabaya Islamic Festival* yang diselenggarakan oleh HijrahFest pada 14-16 Oktober 2022 di Jatim Expo, Surabaya. Pada awalnya, kegiatan ini direncanakan berupa pameran sekitar 150 stan aneka produk mulai dari makanan, *fashion, beauty, travel and personal care*, keuangan syariah hingga *financial technology*. Selain itu, terdapat majelis ilmu, *talk show*, lomba tahfidz, sharing hijrah bersama beberapa tokoh pemuka agama dan artis hijrah musawarah. Namun kegiatan ini tidak terlaksana atau batal dilaksanakan karena sejumlah nama dari pihak penyelenggara dikenal sebagai pendukung organisasi yang telah dilarang secara resmi oleh pemerintahan Indonesia.

Pemberitaan HijrahFest menimbulkan reaksi dari masyarakat terutama dari Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini menjadikan NU memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk membentuk regulasi pelarangan wahabi di Indonesia. Pembahasan pelarangan wahabi ini menimbulkan keramaian media dan menjadi berita besar di berbagai media hingga menjadi trending di Twitter. Berbagai pendapat pro dan kontra bermunculan. Pemberitaan pelarangan wahabi ini banyak diunggah di media seperti Kompas.com, Republika.co.id, CNNIndonesia.com, Detik.com. Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil dua media online yakni CNNIndonesia.com dan Detik.com.

Penulis memilih CNNIndonesia.com dan Detik.com dalam pemberitaan kontroversial wahabi karena CNNIndonesia.com mengunggah sejumlah 42 berita. Sedangkan Detik.com menerbitkan berita dengan jumlah 23 berita. Selain itu, kedua media merupakan di bawah naungan satu perusahaan yakni CT Corp. Berdasarkan dari jumlah berita di kedua media terdapat perbedaan yang menonjol. Pada CNNIndonesia.com menyorot berita pelarangan wahabi dengan menampilkan sejumlah berita dari narasumber NU dan memberikan informasi lengkap mengenai ajaran wahabi seperti definisi, sejarah, ajaran hingga negara yang menganut wahabi. Adapun Detik.com dalam memberitakan pelarangan wahabi dengan mengambil narasumber yang bervariasi dari tokoh-tokoh organisasi masyarakat lain.

Jumlah berita tentang peristiwa tertentu di media memberikan sebuah tanda pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak mengenai sebuah fakta. Terkadang satu peristiwa yang sama dapat diberitakan secara berbeda. Mengapa satu peristiwa yang sama, pada hari yang sama, media lebih sering memberitakan peristiwa yang satu dan menyembunyikan atau tidak mengutamakan peristiwa lain? Mengapa media lebih menonjolkan aspek tertentu dan melupakan aspek lain? Mengapa CNNIndonesia.com dalam memberitakan gerakan wahabi mengutamakan narasumber dari NU dan menambahkan infografis serta video? Mengapa Detik.com memberikan narasumber yang bervariasi dari setiap berita?

Pertanyaan diatas berkaitan dengan pembedaan (*frame*) yang dilakukan oleh media. *Framing* dapat mengakibatkan suatu peristiwa yang sama dapat menghasilkan berita yang berbeda ketika wartawan memiliki pandangan yang

berbeda dan menuliskannya dalam berita. Apa yang dilaporkan dalam media merupakan hasil pandang dari wartawan. Media memiliki tugas mulia yakni menyampaikan kebenaran. Namun, dalam menyampaikan kebenaran tersebut tidaklah sederhana karena terdapat berbagai kepentingan yang membentuk pada kebenaran dan selalu terdapat ketegangan di antara pihak yang memiliki kepentingan (Sobur, 2002: 12).

Setiap wartawan mempunyai pandangan, pemahaman dan interpretasi yang berbeda tentang hal, objek, fakta, realitas, atau peristiwa. Fakta peristiwa di dalam berita umumnya disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami, maka hal ini tidak akan lepas dari peran jurnalis dalam mengolah kata. Para reporter dan editor memiliki kekuasaan penuh dalam memilih kata yang hendak dipakai. Mereka akan bebas memilih kata-kata yang memiliki makna sama namun berbeda rasa. Berita pada hakikatnya adalah rekonstruksi tertulis atas realitas yang ada di dalam masyarakat.

Para wartawan dalam mengemas berita dipengaruhi kepentingan tertentu bagaimana mereka memandang dunia. Kecenderungan media dalam membingkai realitas dapat diketahui dengan seperangkat asumsi tertentu yang berimplikasi bagi pemilihan judul berita, struktur dan keberpihakan tersebut sering bersifat subtil dan tidak sepenuhnya disadari. Dalam memahami teks isi media, dalam pemberitaan tak akan lepas adanya *framing*/pembingkai.

Framing ini berkaitan erat dengan adanya pandangan, kepercayaan dan sebuah ideologi yang dianut oleh media itu sendiri. Analisis *framing* mampu membantu adanya pembingkai realitas yang sama itu dikemas dengan cara yang berbeda. Analisis *framing* merupakan salah satu alternatif model analisis yang digunakan untuk mengetahui rahasia dibalik semua perbedaan di media. Dengan demikian, realitas sosial dipahami, dimaknai dan dikonstruksikan dengan bentuk dan makna tertentu.

Melalui analisis *framing* akan dapat diketahui siapa yang mengendalikan di dalam berita, siapa kawan dan siapa lawan, siapa yang ditindas dan dirugikan atau diuntungkan begitu seterusnya. Wartawan media massa cenderung memilih

seperangkat asumsi yang akrab di masyarakat dan berimplikasi pada pemilihan judul, struktur berita dan keberpihakan pada pihak tertentu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini sangat penting diteliti karena berkaitan dengan bagaimana satu peristiwa yang dimaknai secara berbeda oleh kedua media. Perbedaan tersebut dikemas dengan berbagai cara dan strategi dari wacana untuk memberikan pengaruh besar kepada khalayak. Media dalam meliput suatu berita tak akan lepas dengan bias-bias dan kepentingan tertentu. Penelitian ini akan mengetahui bagaimana CNNIndonesia.com dan Detik.com dalam membingkai berita pelarangan wahabi. Mengapa kedua media ini memiliki perbedaan dalam pemberitaan pelarangan wahabi meskipun keduanya berada dalam perusahaan yang sama?

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pembedaan yang dilakukan CNNIndonesia.com dan Detik.com dalam meliput pemberitaan pelarangan wahabi di Indonesia. Dengan ini penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Analisis *Framing* Pemberitaan Pelarangan Wahabi di Indonesia di Situs Berita online CNNIndonesia.com dan Detik.com”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana *framing* pemberitaan pelarangan Wahabi di Indonesia pada situs berita online CNNIndonesia.com dan Detik.com?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembedaan yang dilakukan oleh situs berita online CNNIndonesia.com dan Detik.com terkait berita pelarangan wahabi di Indonesia menggunakan analisis *framing* Robert M Entman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk pembaca terutama penulis sendiri mengenai pengetahuan analisis *framing* di media

online serta dapat bermanfaat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya bagi civitas akademika Komunikasi dan Penyiaran Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yakni:

- a) Bagi mahasiswa khususnya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam sebagai bahan referensi mengenai analisis *framing* di media *online* dan sebagai pedoman untuk lebih waspada dalam membuat berita kontroversi karena akan berdampak pada respon dari berbagai masyarakat
- b) Bagi masyarakat agar lebih teliti dalam mencerna berita yang beredar agar tidak mudah terpengaruhi oleh berita hoaks serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara luas bahwa media memiliki pembingkaiannya sendiri sehingga masyarakat diharapkan dapat memilih dan mengendalikan dirinya apabila mendapat berita di media *online*.
- c) Bagi praktisi media *online* sebagai bahan pertimbangan dalam menulis berita agar lebih mementingkan kualitas berita dengan mengedepankan realita serta mengutamakan nilai-nilai berita agar layak diinformasikan kepada masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berjudul “Analisis *Framing* Pemberitaan Pelarangan Wahabi di Indonesia di Situs Berita online CNNIndonesia.com dan Detik.com” merupakan penelitian terbaru dan belum ditemukan penelitian yang sama. Namun terdapat penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu digunakan bukan untuk menjiplak, melainkan sebagai acuan atau pedoman dalam menyusun proposal ini agar keaslian karya tetap terjaga. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan oleh penulis, antara lain :

Pertama, skripsi Fina Idamatussilmi (2019) yang berjudul “Analisis *Framing* Pembubaran Front Pembela Islam di Media Berita *Online*”. Tujuan penelitian tersebut untuk mengkaji bagaimana *frame* yang digunakan untuk memberitakan

pembubaran Front Pembela Islam (FPI) di *Republika.com* dan *Sindonews.com*. Skripsi Fina Idamatussilmi dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan analisis *framing* Robert M Entman. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa *Republika.com* membingkai isu pembubaran FPI yakni mendukung keputusan pemerintah, meskipun pemberitaan yang ditampilkan memiliki judul yang berbeda-beda. Sedangkan media *online* *Sindonews.com* dalam memberitakan kasus pembubaran FPI mereka memberikan *framing* dengan tidak mendukung keputusan pemerintah karena dalam pemberitaannya menyertakan saran kepada pemerintah. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus analisis *framing* Robert M Entman serta pemberitaan kontroversial. Adapun perbedaannya adalah terletak pada media *online* yang diamati serta waktu yang diteliti, penelitian ini menggunakan media *online* *Republika.com* dan *Sindonews.com* pada tahun 2020, sedangkan penulis meneliti pemberitaan pelarangan wahabi di *CNNIndonesia.com* dan *Detik.com* pada tahun 2022.

Kedua, skripsi Suci Nur Barokah (2021) yang berjudul “Analisis *Framing* Terhadap Berita Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Situs Berita Online *Kompas.com* dan *Tirto.id*”. Penelitian ini untuk menganalisis, membandingkan, mendeskripsikan dan mengetahui *framing* dalam membingkai isu pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada *Kompas.com* dan *Tirto.id*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis *framing* Robert M Entman. Berdasarkan analisis penelitian terlihat bahwa *Kompas.com* mendukung keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI, sedangkan *Tirto.id* kebanyakan pemberitaannya pro pemerintah dalam mengambil keputusan, namun pada *Tirto.id* dalam menyajikan berita terdapat kontra dengan langkah tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada fokus penelitian yakni analisis *framing* Robert M Entman serta pemberitaan kontroversial. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokus, dalam hal ini mengambil *Kompas.com* dan *Tirto.id* sedangkan penulis mengambil *CNNIndonesia.com* dan *Detik.com*.

Ketiga, skripsi Ifa Rohmiatun (2022) yang berjudul “Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Muhammad Kece di *TVOne*

Edisi 22-23 Agustus 2021”. Penelitian dilakukan untuk menganalisis, mengetahui, mengamati bagaimana *framing* Robert M Entman bekerja pada isu penistaan Muhammad Kece di TVOne edisi 22-23 Agustus 2021. Skripsi ini dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Berdasarkan hasil analisis mengungkap bahwa TVOne lebih pro terhadap umat muslim dan menunjuk Muhammad Kece sebagai pelaku penistaan agama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada fokus penelitian yang dikaji yakni analisis *framing* Robert M Entman. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, dalam hal ini media televisi yakni TVOne dan waktu yang diteliti pada tahun 2021, sedangkan penulis meneliti pemberitaan pelarangan paham wahabi pada tahun 2022.

Keempat, skripsi Nurlita Amril Zain (2021) yang berjudul “Analisis *Framing* Pemberitaan Sidak Presiden Jokowi Terkait Kelangkaan Obat Covid-19 di Media Islam dan Media Umum (Studi Komparatif pada Media Online Republika.co.id dan Detikcom Edisi 23-25 Juli 2021”. Tujuan penelitian tersebut untuk mengkaji media Islam dan media umum bagaimana membingkai pemberitaan sidak Presiden Jokowi mengenai kelangkaan obat covid-19. Pemberitaan sidak ini diambil selama tanggal 23-25 Juli 2021. Penelitian tersebut dianalisis menggunakan *framing* Robert M Entman dengan pendekatan deskriptif. Jumlah berita yang dianalisis 11 berita. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Republika.com memberikan *frame* sidak atau blusukan sebagai citra yang positif bagi Jokowi. Sebagai media yang mempresentasikan Islam, Republika sudah menerapkan jurnalisme profetik. Adapun Detik.com memberikan *frame* tentang sidak merupakan respon penting yang harus ditangani segera. Persamaan penelitian ini yang ditemukan dengan penelitian penulis terdapat pada fokus penelitian yakni analisis *framing* Robert M Entman. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian, dimana penelitian tersebut meneliti di media online Republika dan Detik.com serta waktu yang diamati pada penelitian tersebut pada tahun 2021.

Kelima, artikel Lukman Hakim (2021) yang berjudul “*Framing* Dakwah Salafi Rodja TV di Media Sosial Youtube”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis *framing* dakwah salafi oleh Rodja TV di Youtube. Metode yang

digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Berdasarkan analisis yang diperoleh terdiri dari empat perangkat framing Robert M Entman yakni *define problems*, Rodja TV seringkali mengangkat isu yang berkaitan dengan permasalahan dan tuduhan terhadap salafi (wahabi) yang dianggap tidak sesuai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. *Diagnose causes*, stigma negatif terhadap salafi yang dituduh radikal. *Make moral judgement*, Rodja TV selalu berusaha menyebarkan kajian untuk meluruskan stigma negatif radikal tersebut. *Treatment recommendation*, solusi terbaik yang diberikan kepada Rodja TV yaitu dengan tetap bersikukuh di dalam aqidah yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus penelitian yakni mengambil analisis *framing* model Robert M Entman. Adapun perbedaannya terdapat pada objek penelitian, dimana penelitian tersebut meneliti di media Rodja TV, sedangkan objek penelitian penulis di media online CNN Indonesia dan Detik.com serta waktu yang diamati pada penelitian tersebut pada tahun 2021.

Keenam, skripsi Kalingga Ramadhan (2020) yang berjudul "Kontruksi Isu Kekerasan Pada Anak di Media Online (Analisis *Framing* Berita Kekerasan Pada Anak di Media Online Tirto.id). Penelitian tersebut dilakukan untuk melihat *frame* Tirto.id dalam berita kekerasan seksual di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Metode yang digunakan adalah paradigma konstruktivis dan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis *framing* Robert M Entman. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Tirto.id memberikan *frame* tentang kasus kekerasan seksual pada anak lebih memihak kepada korban dan menjunjung tinggi hak-hak korban serta memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah persoalan kekerasan pada anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adanya fokus penelitian yang menganalisis berita menggunakan analisis framing Robert M Entman. Adapun perbedaan yang ditemukan terdapat pada objek penelitian. Penelitian ini mengkaji Tirto.id dalam membingkai berita kekerasan seksual pada anak, sedangkan penelitian penulis mengkaji CNNIndonesia.com dan Detik.com dalam berita pelarangan wahabi di Indonesia.

Ketujuh, skripsi Sodikotul Muharisah yang berjudul “Konstruksi Pemberitaan Banjir Kalimantan Selatan (Analisis Framing pada Media Online Tempo.co Periode 14-28 Januari 2021). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konstruksi Tempo.com dalam berita banjir di Kalimantan Selatan pada periode 14-28 Januari 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan teks media analisis *framing* Robert M Entman. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Tempo.co memandang berita banjir di Kalimantan Selatan sebagai kesalahan pemerintah karena tidak mampu memberikan prevensi terhadap banjir. Pemberitaan ini menyeleksi isu peran pemerintah dan menonjolkan aspek yang cenderung negatif. Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis terdapat pada fokus penelitian yakni mengkaji berita menggunakan analisis *framing* model Robert M Entman. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada isu dan objek yang diteliti. Penelitian ini memilih isu berita banjir di Kalimantan Selatan di Tempo.co, sedangkan penelitian penulis mengangkat berita pelarangan wahabi di CNNIndonesia.com dan Detik.com

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini berupaya memberikan gambaran dari sebuah persoalan, klasifikasi jenis atau garis besar dengan menggunakan kata-kata. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang metode perancangannya tidak menggunakan angka atau statistik dan kuantifikasi. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengumpulkan informasi secara rinci dengan menjelaskan gejala, mengidentifikasi masalah serta memberikan evaluasi.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi dengan analisis isi media yakni menggunakan analisis *framing*. Analisis *framing* merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sebuah realitas yang dibingkai oleh media baik itu berupa peristiwa, aktor, kelompok atau selainya. Analisis *framing* dalam penelitian ini menggunakan model yang Robert M

Entman yang merujuk pada empat elemen dalam memaknai sebuah peristiwa yang diwacanakan.

2. Definisi Konseptual

Batasan lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap permasalahan penelitian. Definisi konseptual digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Berdasarkan permasalahan, maka definisi konseptual dalam penelitian ini yakni:

1) Analisis *Framing*

Analisis framing digunakan untuk mengetahui perbedaan dalam pemberitaan. Analisis framing disebut juga analisis bingkai yang mengkaji bagaimana peristiwa dipahami dan dimaknai oleh media. *Framing* hadir untuk menentukan bagaimana realitas hadir di depan khalayak. *Framing* tergantung bagaimana cara pandang media terhadap realitas, maka realitas yang dipahami dan dimaknai berbeda. Batasan penelitian analisis *framing* ini terletak pada CNNIndonesia.com dan Detik.com dalam membingkai (*framing*) berita pelarangan wahabi di Indonesia pada 28 Oktober – 2 November 2022. Pembingkaiian tersebut dianalisis menggunakan *framing* Robert M Entman yang mengacu pada empat perangkat yakni pendefinisian masalah, penjelasan, evaluasi serta rekomendasi atas peristiwa yang diwacanakan. Analisis *framing* tersebut meliputi segala hal mulai dari *angle* pemberitaan, narasumber, judul dan sebagainya.

2) Pelarangan Wahabi

Secara bahasa, pelarangan memiliki arti sesuatu yang dilarang, proses, cara atau perbuatan yang melarang. Pelarangan wahabi merupakan problematika yang masih belum terselesaikan dalam dakwah Islam. Permasalahan wahabi menjadi perdebatan di kalangan muslim dari segi ajaran, praktik ibadah, cara pandang dan konsep pemikiran. Oleh karena itu, pelarangan wahabi muncul pada berita di media online. Pelarangan wahabi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah paham yang keberadaannya menjadi pro dan kontra di kalangan umat Islam. Meskipun tidak ada

lembaga atau organisasi resmi yang mengatasnamakan gerakan wahabi di Indonesia, namun paham ini masih berkembang subur melalui lembaga, organisasi atau komunitas tertentu.

3. Sumber dan Jenis Data

Data dalam sebuah penelitian memiliki peranan yang sangat penting untuk memecahkan masalah penelitian. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data pokok yang diperoleh dari sumber secara langsung atau berasal dari pihak pertama. Data primer pada penelitian ini diambil dari situs berita *online* CNNIndonesia.com dan Detik.com dengan mengambil pemberitaan pelarangan wahabi di Indonesia. Pengambilan berita pelarangan wahabi ini dengan membatasi pokok permasalahan yakni pelarangan wahabi di kedua media yang diambil pada 28 Oktober – 2 November 2022 dengan jumlah 14 berita dengan rincian total tujuh pemberitaan dari CNNIndonesia.com dan tujuh pemberitaan dari Detik.com.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, penulis memilih menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi yang diambil oleh peneliti antara lain naskah di situs berita online mengenai pelarangan wahabi di CNNIndonesia.com dan Detik.com. Dalam penelitian ini, penulis melakukan telaah teks dengan mencari dan mengumpulkan berita pelarangan wahabi di kedua situs berita tersebut. Peneliti tidak mengumpulkan semua berita, hanya mengambil 14 berita, dengan rincian tujuh berita dari CNNIndonesia.com dan tujuh berita dari Detik.com. Pengambilan sampel ini dikarenakan kedua media banyak memberitakan pelarangan wahabi dan kedua media memiliki perbedaan dalam pemberitannya..

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah proses menemukan dan menyusun data analisis secara sistematis melalui pengumpulan dokumentasi berupa berita online di CNNIndonesia.com dan Detik.com. Hasil temuan

penelitian nantinya dikumpulkan dan dianalisis menggunakan *framing* Robert M Entman. Ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis dalam menganalisis data penelitian ini, yaitu:

1) Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data berupa berita-berita wahabi di kedua situs berita yakni CNNIndonesia.com dan Detik.com dengan mencari tag wahabi. Hal ini untuk memudahkan pencarian berita pelanggaran wahabi di kedua situs berita.

2) Telaah Teks

Setelah data terkumpulkan, penulis menelaah semua berita mengenai pelanggaran wahabi di kedua situs berita dan memilih dan memfokuskan hal yang dianggap pokok sesuai dengan permasalahan penelitian.

3) Analisis Data

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini berupa berita-berita yang memuat pelanggaran wahabi di CNNIndonesia.com dan Detik.com. Data tersebut akan dianalisis menggunakan *framing* Robert M Entman. Entman memandang *framing* dibagi menjadi dua dimensi besar yakni seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu. Wartawan berhak memilih realitas mana yang akan ditulis dalam berita dan aspek mana yang perlu ditekankan dalam berita. Proses seleksi dan penonjolan aspek dilihat melalui perangkat *framing* Robert M Entman yang dilakukan dengan empat cara, yakni:

a. Pendefinisian masalah (*Define problems*)

Elemen ini merupakan paling penting dalam menekankan bagaimana wartawan memahami sebuah peristiwa. Ketika suatu peristiwa dibingkai, ia memiliki interpretasi dan makna yang berbeda. Satu peristiwa yang sama dapat dipahami dan dimaknai secara berbeda oleh wartawan, sehingga realitas media yang dibangun berbeda pula.

b. Memperkirakan penyebab masalah (*Diagnose cause*)

Elemen kedua ini digunakan wartawan untuk melihat siapa yang menjadi aktor/pelaku dari sebuah peristiwa. Penyebab peristiwa disini dapat dipahami dan ditentukan apa (*what*) dan juga siapa (*who*) yang dianggap sebagai penyebab masalah. Maka, masalah dipahami berbeda, penyebab masalahnya juga dipahami secara berbeda (Eriyanto, 2015: 225).

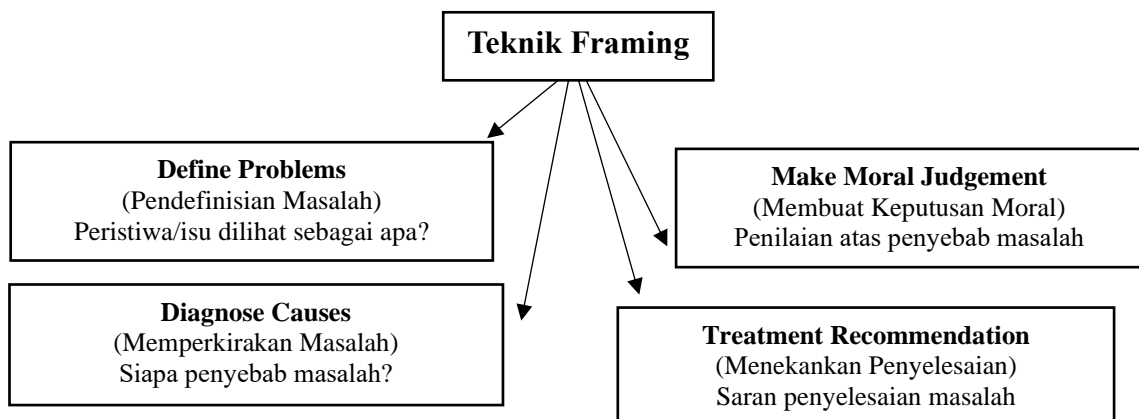
c. Membuat pilihan moral (*Make moral judgement*)

Elemen ini berfungsi memberikan sebuah pendapat atau argumentasi dalam mendefinisikan suatu masalah. Ketika masalah dan penyebabnya sudah diketahui, argumen dibutuhkan untuk membenarkan atau menguatkan gagasan tersebut.

d. Menekankan penyelesaian (*Treatment Recommendation*)

Elemen ini bertujuan untuk memberikan penilaian dan evaluasi yang diinginkan wartawan untuk memecahkan masalah. Solusi apa yang diusulkan atau penyelesaian apa yang harus diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

Gambar 1 Skema *Framing* Robert M Entman



Sumber : Alex Sobur, 2002

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah hal yang penting karena untuk memudahkan pembahasan dalam mengkaji materi. Sistematika penulisan diurutkan berdasarkan

pedoman penulisan skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo. Berikut beberapa bagian yang akan terdapat dalam skripsi penelitian ini, yakni:

1. Bagian awal, terdiri atas halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran.
2. Bagian utama, mencakup beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II ANALISIS FRAMING, JURNALISTIK ONLINE DAN BERITA

Berisi kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan mengenai analisis *framing*, jurnalistik online dan berita

BAB III PROFIL CNNINDONESIA.COM DAN DETIK.COM, BERITA PELARANGAN WAHABI DI CNNINDONESIA.COM DAN DETIK.COM

Pada bab ini akan berisi gambaran umum mengenai situs berita online CNNIndonesia.com dan Detik.com serta kumpulan berita tentang pelarangan paham wahabi di Indonesia.

BAB IV ANALISIS BERITA PELARANGAN WAHABI DI CNNINDONESIA.COM DAN DETIK.COM

Bab ini akan menjelaskan analisis hasil penelitian yakni *framing* antara CNNIndonesia.com dan Detik.com terhadap berita pelarangan paham wahabi di Indonesia

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi dari ringkasan hasil penelitian yang telah diteliti. Adapun saran berisi tentang catatan yang perlu diperhatikan untuk penelitian kedepannya agar tidak terjadi kesalahan yang sama.

BAB II
ANALISIS FRAMING, JURNALISTIK ONLINE
DAN BERITA

1) Analisis Framing

a. Pengertian *Framing*

Secara sederhana *framing* diartikan meringkaskan sebuah peristiwa menjadi berita dan disebarkan ke khalayak. Analisis *framing* merupakan metode baru yang muncul dari kajian mendalam dari analisis wacana untuk menghasilkan metode yang terbaru dari fenomena media terkini (Muzakir, 2020: 220). Pakar komunikasi, Eriyanto menjelaskan analisis *framing* adalah sebuah proses pembuatan sebuah pesan atau informasi yang menekan, menonjolkan dan terlihat aspek dari sebuah informasi yang diambil dari realitas sehingga khalayak terdorong terhadap pesan tersebut. Analisis framing digunakan untuk mengetahui rahasia di balik semua ketidaksesuaian media dalam mempublikasikan fakta.

Analisis *framing* menunjukkan pesan apa yang proses dari pemberitaan, atau hal apa yang ditekankan atau diabaikan. Media bukanlah seperti yang digambarkan, media bukanlah saluran yang bebas memberitakan fakta apa adanya. Media juga bukan cermin dari realitas, melainkan bagaimana media memahami dan memaknai realitas. Realitas mana yang ditandai dan ditekankan menjadi fokus pemberitaan. Praktisnya, analisis *framing* digunakan untuk memandang aspek apa yang ditonjolkan atau ditekankan oleh media (Eriyanto, 2002: 2). Penonjolan atau penekanan aspek tertentu akan terlihat, bermakna dan mudah diingat oleh khalayak, sehingga aspek lain yang dilupakan atau tak terlihat bisa jadi berguna dalam menggambarkan realitas.

b. Perangkat *Framing* Robert M Entman

Robert M Entman adalah pakar dan ilmuwan politik yang memprakarsai analisis *framing* ke dalam studi isi media. Menurut Entman, meskipun berbagai studi menggunakan analisis *framing*, salah satu faktor yang terkait dengan kajian isi media adalah bagaimana penyajian teks komunikasi ditekankan atau bagaimana representasi yang ditonjolkan agar mempengaruhi khalayak. Konsep *framing* Robert M Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi isu dan penonjolan terhadap aspek tertentu dari realitas yang disajikan media.

Framing memberikan tekanan mengenai bagaimana teks komunikasi disajikan dan aspek apa yang ditonjolkan. Penonjolan itu sendiri diartikan sebagai membuat informasi yang lebih jelas, bermakna dan penting atau mudah diingat oleh masyarakat luas. Hal tersebut dilakukan agar informasi yang ditonjolkan dapat diterima oleh khalayak dan bisa mempengaruhi pandangan terhadap informasi yang disampaikan. Informasi yang ditekankan akan terasa lebih diingat dan berkesan jika dibandingkan dengan penyajian secara biasa.

Berbagai bentuk penonjolan yang dilakukan media antaranya menempatkan salah satu aspek yang ditampilkan, lebih mencolok dan bermakna atau konsisten menggunakan pengulangan kata yang dianggap penting serta menghubungkan dengan aspek budaya yang mudah dikenali oleh khalayak. Dengan bentuk tersebut, gagasan atau pemikiran dari berita mudah terlihat, diperhatikan, diingat bahkan diinterpretasikan oleh khalayak, sehingga terjadi proses interaksi antara teks dan penerima (Eriyanto, 2002: 186).

Framing Robert M Entman memiliki dua dimensi penting yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan pada aspek realitas tertentu. *Framing* secara praktiknya bekerja dengan cara menekankan atau menonjolkan aspek tertentu dan mengabaikan atau menghilangkan aspek lain. Penonjolan diimplementasikan melalui berbagai strategi wacana seperti menunjukkan sesuatu yang mencolok, menempatkan judul depan atau belakang, mengulang kata-kata, penggunaan grafis untuk

mendukung dan memperkuat penonjolan, menggunakan label tertentu untuk menggambarkan seseorang atau peristiwa, menghubungkan simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan lain-lain. Semua aspek yang ditampilkan untuk menciptakan dimensi realitas tertentu. Semua aspek dipakai untuk membuat dimensi tertentu agar menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak.

Tabel 1 Perangkat Framing Robert M Entman

Perangkat Framing Robert M Entman

Seleksi isu	Aspek ini berkaitan dengan pilihan fakta yang dilakukan oleh wartawan. Dari beragam isu yang ada, aspek mana yang hendak ditonjolkan atau ditampilkan. Wartawan tidak menampilkan semua aspek dari isu disajikan, hanya memilih aspek tertentu yang baginya penting untuk khalayak. Dari proses ini selalu mencakup bagian berita yang dimasukkan (<i>include</i>), tapi juga ada berita yang di keluarkan (<i>excluded</i>).
Penonjolan aspek tertentu dari isu	Aspek ini mengacu pada fakta yang ditulis oleh wartawan. Ketika bagian tertentu isu telah dipilih, bagaimana wartawan menuliskan aspek tersebut. Penulisan ini tak lepas dengan penggunaan kata, frasa, gambar, pelabelan, tanda, dan citra tertentu.

Sumber : Eriyanto, 2015

c. Teknik Framing Robert M Entman

Framing merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang media dalam menseleksi isu dan menuliskannya dalam berita. Cara pandang tersebut pada akhirnya menentukan fakta, apa yang diambil, seperti apa yang ditonjolkan dan dihilangkan, hendak seperti apa berita tersebut. Entman mengkonseptualisasikan *framing* sebagai pemberian definisi, penjelasan, penilaian serta evaluasi/rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir dari suatu peristiwa (Entman, 1993: 52). Adapun Entman mengkaji framing berita dengan empat cara, yakni :

Tabel 2 Teknik Framing Robert M Entman

Teknik Framing

<i>Define problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dipandang atau dilihat? Sebagai apa? Atau masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan penyebab masalah)	Penyebab peristiwa yang terjadi karena apa? Siapa (aktor) dan apa yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menyelesaikan masalah? Atau nilai moral yang digunakan untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan atau jalan apa yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah?

Sumber : Eriyanto, 2015

Penjelasan lebih rinci dari empat elemen tersebut sebagai berikut:

a. *Define Problems* (Pendefinisian masalah)

Define problems yakni elemen yang menonjolkan bagaimana wartawan memahami dan memaknai sebuah peristiwa. Ketika sebuah peristiwa terjadi, bagaimana hal itu bisa dipahami. Wartawan dapat memahami dan menginterpretasikan peristiwa secara berbeda. Elemen ini merupakan elemen utama yang dapat mengetahui bagaimana peristiwa dibingkai, ia menekankan peristiwa dipahami oleh wartawan.

b. *Diagnose causes* (Memperkirakan penyebab masalah)

Diagnose causes merupakan elemen kedua untuk menentukan siapa atau aktor yang dibingkai dalam peristiwa. Penyebab disini bisa berupa siapa atau apa yang dapat dipahami bagaimana penyebab peristiwa terjadi. Tentu saja, elemen ini menentukan apa yang

menjadi penyebab masalah dan siapa yang dianggap menjadi sumber masalah, sehingga peristiwa dimaknai secara berbeda.

c. *Make moral judgement* (Membuat pilihan moral)

Make moral judgement adalah elemen yang digunakan untuk memberikan argumentasi pada pendefinisian masalah. Jika pendefinisian masalah telah ditemukan, maka perlu adanya argumentasi yang menguatkan gagasan tersebut. Elemen ini juga digunakan untuk membenarkan dari penyebab peristiwa. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.

d. *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian)

Treatment recommendation adalah elemen yang digunakan untuk memberikan atau menawarkan solusi yang dikehendaki wartawan. Jalan apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian tersebut tentu dilihat dari apa yang penyebab masalahnya dan siapa yang dianggap menjadi penyebab masalah.

Entman memberikan konsep framing sebagai penggambaran bagaimana peristiwa ditandakan oleh wartawan. *Frame* muncul dalam dua level. Pertama, konsepsi mental yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai karakteristik berita. Kedua, perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai peristiwa biasanya dibentuk dengan kata kunci, metafora, simbol, citra, gambar yang ditekankan dalam narasinya. Strategi tersebut ditekankan dalam narasi sehingga terlihat lebih menonjol daripada bagian lain di dalam teks (Entman, 1993: 52).

2) Media dan Berita Dalam Pandangan Kontruksionis

Konsep mengenai kontruksionisme sebenarnya diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L Berger dan Thomas Luckman banyak menulis karya dan menghasilkan tesis tentang konstruksi sosial dan realitas. Berger berpendapat bahwa realitas tidak dibentuk secara ilmiah, tetapi realitas itu dibentuk dan dikonstruksikan. Setiap orang memiliki

konstruksi yang berbeda-beda dalam memandang realitas karena setiap orang memiliki pengalaman, pendidikan, preferensi dan lingkungan sosial yang beragam sehingga akan menghasilkan realitas secara berbeda.

Gagasan kontruksionisme yang dibangun oleh Berger dapat diterapkan dalam konteks berita. Berita dipandang sebagai konstruksi atas realitas sehingga sangat bisa jika dua peristiwa dikonstruksi secara berbeda. Berita dalam pandangan kaum konstruksionis bukanlah suatu hal yang riil, disampaikan secara apa adanya, cermin dari realitas. Melainkan berita adalah sebuah produk kontruksi dari wartawan dengan fakta (Eriyanto, 2002: 17). Pendekatan kontruksionis memiliki penilaian sendiri dalam menilai media, wartawan dan berita dalam membangun sebuah realitas. Penilaian tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1) Fakta/peristiwa adalah hasil dari kontruksi

Kaum konstruksionis memiliki pandangan bahwa realitas bersifat subjektif. Realitas ada karena diciptakan oleh konsep subjektif wartawan. Tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas dibentuk oleh konstruksi oleh sudut pandang wartawan yang berbeda-beda. Realitas berbeda-beda tergantung bagaimana konsep wartawan dalam memahami realitas. Fakta atau realitas bukanlah sesuatu yang hanya diambil seadanya sebagai bahan berita, melainkan dikonstruksi atau dibentuk dan ditampilkan secara simbolik, maka realitas tergantung bagaimana fakta dilihat dan dipahami.

2) Media adalah agen kontruksi.

Dalam hal ini, kaum konstruksionis dan positivis memiliki pandangan yang berbeda mengenai media. Dalam pandangan positivis, media adalah sarana bagaimana semua pesan di komunikasikan atau media sebagai saluran untuk menyampaikan sebuah informasi mengenai suatu peristiwa. Media dilihat sebagai sarana yang netral. Apabila ada sebuah media memberitakan sebuah realitas kelompok atau citra dari sebuah komunitas, maka media hanya berperan sebagai penyampai pesan untuk mengemukakan pendapatnya (Eriyanto, 2002: 13)

Dalam pandangan konstruksionis, media dipandang sebagai agen pembentuk realitas. Media bukanlah saluran yang bebas menginformasikan peristiwa apa adanya, justru ia menjadi subjek yang mengkonstruksi realitas dengan pandangan, bias dan pemihakannya terhadap kelompok atau komunitas tertentu. Pandangan ini memandang media bukan hanya sekedar saluran, melainkan media sebagai agen yang aktif mengkonstruksikan realitas.

3) Berita bukan refleksi dari realitas. Ia hanyalah konstruksi dari realitas.

Berita dalam pandangan positivis adalah sebuah refleksi dari kenyataan yang ditulis dan ditransformasikan melalui berita. Berita adalah cermin dari kenyataan (*mirror of reality*) dari peristiwa yang akan disampaikan. Pandangan ini ditolak oleh kaum konstruksionis. Menurut pandangan konstruksionis, berita ibarat sebuah drama. Ia bukanlah gambaran dari sebuah realitas, tetapi sebuah potret dari medan pertarungan berbagai pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut (Eriyanto, 2015: 29).

Berita merupakan produk dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi, nilai-nilai dari media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita bergantung pada bagaimana fakta dipahami dan dimaknai. Proses pemaknaan selalu melibatkan nilai-nilai tertentu sehingga tidak mungkin berita mencerminkan realitas. Realitas yang sama bisa diubah menjadi berita yang berbeda-beda karena bentuk secara berbeda. Perbedaan ini sebenarnya tidak dipandang sebagai kesalahan, melainkan sebagai kewajaran.

4) Berita Bersifat Subjektif/Konstruksi Atas Realitas

Pandangan konstruksionis dan positivis memiliki penilaian yang berbeda mengenai objektivitas jurnalistik. Hasil kerja jurnalistik dalam pandangan konstruksionis tidak bisa dinilai menggunakan standar yang baku seperti kaum positivis, karena pandangan ini menganggap berita sebagai produk konstruksi dan pemaknaan realitas. Perbedaan dari

keduanya tidak dianggap sebagai kesalahan, tetapi sebuah kewajaran karena memang seperti itulah pemaknaan media terhadap realitas. Pendekatan positivis justru menekankan untuk menghindari bias dan menganggapnya sebuah kesalahan, sehingga jika terdapat kekeliruan atau bias, kesalahan ditekankan dengan mencari sumbernya (Eriyanto, 2015: 32).

5) Wartawan Bukan Pelapor. Ia Agen Konstruksi Realitas.

Pandangan positivis melihat wartawan sebagai pelapor. Wartawan yang baik adalah mampu menjelaskan realitas ke dalam berita. Wartawan yang profesional mampu menyajikan berita dengan benar, bersikap netral dan menghindari bias sehingga apa yang diungkapkan murni fakta. Namun pandangan konstruksionis berbeda. Wartawan dianggap sebagai agen pembentuk realitas. Wartawan tidak menyembunyikan keberpihakan atau bias tertentu dan membuat pilihan moral atas realitas yang telah dipahami. Wartawan bukanlah penulis fakta yang seadanya, karena sesungguhnya tidak ada realitas yang bersifat mutlak benar dan objektif di luar diri wartawan. Realitas dibentuk dan dikonstruksikan lewat pemahaman dan pemaknaan subjektif dari wartawan.

6) Etika, Pilihan Moral, dan Keberpihakan Wartawan Adalah Bagian Yang Integral Dalam Produksi Berita

Pendekatan positivis menekankan wartawan agar nilai, etika dan keberpihakan wartawan disingkirkan dalam proses pemberitaan. Kesimpulannya, realitas harus difungsikan semestinya, tidak boleh dicampuri dengan pendapat subjektif. Pendekatan konstruksionis menilai sebaliknya. Aspek nilai, etika, moral tidak mungkin diabaikan dalam pemberitaan. Etika dan moral dalam banyak hal menjadi keberpihakan pada satu kelompok tertentu atau nilai tertentu yang dilandasi dengan keyakinan yang tidak bisa dipisahkan dalam membentuk realitas. Wartawan bukan pelapor, melainkan partisipan dalam membentuk realitas dari keragaman penafsiran dan subjektivitas publik (Eriyanto, 2015: 37)

7) Nilai, Etika dan Pilihan Moral Peneliti Menjadi Bagian yang Integral dalam Penelitian.

Penelitian tipe konstruksionis memiliki ciri utama yang menjadi pembeda dengan penelitian lainnya yakni pernyataan bahwa peneliti bukanlah subjek yang bebas nilai. Pilihan etika, moral atau keberpihakan peneliti menjadi bagian yang integral dari proses penelitian. Pandangan ini bertolak belakang dengan pendekatan positivis. Menurut pendekatan positivis, peneliti harus bebas nilai, etika dan pilihan moral peneliti tidak boleh disertakan dalam penelitian. Apabila etika dan pilihan moral masuk dalam penelitian akan mempengaruhi hasil. Pandangan ini dipegang teguh oleh kaum positivis karena realitas dipandang ada dan dihadirkan untuk menjelaskan secara apa adanya tanpa campur tangan peneliti.

8) Khalayak Memiliki Penafsiran Tersendiri Atas Berita.

Pandangan positivis memandang berita sebagai sesuatu yang objektif. Apa yang diinformasikan oleh media apa adanya sesuai dengan yang diterima khalayak. Pandangan ini menjadikan pembuat berita dianggap sebagai pihak yang aktif, sementara pembaca sebagai pihak yang pasif. Pandangan konstruksionis memiliki penilaian yang berbeda. Khalayak bukanlah subjek yang pasif, tetapi khalayak adalah subjek yang aktif menafsirkan dan memaknai apa yang dibaca. Makna dalam suatu teks bukanlah terdapat dalam pesan yang dibaca, namun berpotensi memiliki banyak arti. Makna dalam hal ini lebih tepat dipahami sebagai penandaan atas realitas (Eriyanto, 2015: 40).

3) Jurnalistik *Online*

a. Pengertian Jurnalistik Online

Jurnalistik *Online* atau dapat disebut dengan *cyber journalism*, jurnalistik internet dan jurnalistik website (*website journalism*) merupakan “generasi baru” jurnalistik yang lahir setelah jurnalistik

konvensional seperti jurnalistik media cetak dan penyiaran. Pengertian jurnalistik *online* tak lepas dengan adanya istilah jurnalistik dan *online*. Kata *online* mencakup banyak istilah yang dapat dipahami yakni internet dan website. Jurnalistik secara istilah mengacu pada proses menemukan atau melaporkan, menulis dan penyebar informasi factual dan aktual melalui media massa. Singkatnya, jurnalistik dipahami sebagai proses memberitakan sebuah peristiwa.

Online diartikan suatu kondisi terhubung melalui internet atau dapat dipahami dengan istilah *world wide web* (www). *Online* dalam bahasa Inggris artinya informasi yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama perangkat terhubung dengan internet. Menurut konsep ini, jurnalistik *online* merupakan proses penyampaian informasi atau berita melalui media *online* terumata website (Romli, 2018: 16). Jurnalistik online merupakan perkembangan jurnalistik baru dalam dunia media, bahkan situs website disebut dengan *new media* sehingga memungkinkan penyajiannya lebih efektif dan mudah diakses kapan saja dan dimana saja.

b. Prinsip Jurnalistik Online

Menurut Paul Bradshaw, jurnalistik online setidaknya memiliki 5 prinsip dasar yakni *Brevity*, *Adaptability*, *Scannability*, *Interactivity*, *Community and Conversation*. Adapun penjelasan antara lain :

1. Brevity (Keringkasan)

Berita online harus bersifat ringkas atau akurat sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan manusia dengan beragam aktivitasnya. Pembaca memiliki waktu kesibukan masing-masing dan mempunyai sedikit waktu untuk membaca dan biasanya ingin mengetahui secara cepat informasi yang ia dapatkan, sehingga jurnalistik online dituntut berisi tulisan ringkas dan sederhana tanpa menghilangkan sisi fakta dan keaktualannya.

2. Adaptability (Kemampuan beradaptasi)

Wartawan dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan tren dan kebutuhan khalayak publik. Seiringan kemajuan teknologi, wartawan harus mencari informasi di sumber terpercaya dan menyajikan berita dengan keragaman cara agar menarik pembaca seperti menyediakan format audio, video, gambar ataupun foto.

3. *Scannability* (dapat dipindai)

Situs-situs terkait jurnalistik *online* diharuskan memiliki sifat yang dapat dipindai agar memudahkan pembaca dalam mengakses informasi. Pengunjung website akan melakukan pencarian informasi terhadap topik-topik yang terkait, namun jika mereka tak menemukan informasi tersebut, mereka akan berpindah atau berganti website untuk menemukan topiknya (Romli, 2018: 17)

4. *Interactivity* (Interaktivitas)

Di dalam jurnalisme *online*, komunikasi antara jurnalis dan pembaca (*viewer*) sangat dimungkinkan adanya interaksi. Memberikan sebuah kolom komentar di bagian website memberikan peluang kepada *viewer* dapat menyampaikan pendapat mereka mengenai informasi yang mereka baca. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena *viewer* akan merasa dilibatkan dan dihargai sehingga mereka akan betah membaca informasi yang ada.

5. *Community and Conversation* (Komunitas dan Percakapan)

Media *online* memainkan peranan penting penting dalam menghubungkan komunitas di seluruh dunia. Jurnalisme yang baik adalah jurnalisme memberikan pelayanan terbaik kepada khalayak. Dalam konteks jurnalisme *online*, pembaca bukan hanya bersifat pasif, tapi mereka juga bisa aktif dalam menanggapi isi berita sehingga dapat menciptakan percakapan antara pembaca lain. Menjadi komunitas untuk membahas informasi tertentu dan berdiskusi membagikan pendapat sebagai timbal balik di sebuah

forum. Mereka juga bisa menjadi kontributor, moderator, editor bahkan penggerak organisasi berita itu sendiri.

4) Berita

a) Pengertian Berita

Berita dalam kajian jurnalistik menduduki posisi utama. Hampir seluruh isi surat kabar adalah berita. Berita berasal dari sansakerta yaitu *Vrit* atau dapat dimaknai dalam bahasa Inggris dengan *Vritta* yang berarti ada atau terjadi. *Vritta* juga dapat dimaknai sebagai kejadian atau sebuah peristiwa yang telah terjadi. Mengingat pentingnya kedudukan berita dalam dunia jurnalistik, sulit bagi para pakar untuk mendefinisikan secara tepat karena belum ada batasan yang memuaskan yang mencakup seluruh sifat, segi, ciri, karakteristik dan jenis-jenisnya (Barus, 2010: 25).

Para pakar jurnalistik tidak sedikit mendefinisikan berita. Beberapa diantaranya adalah William S. Maulsby mendefinisikan berita sebagai penuturan secara benar atau salah melalui fakta-fakta penting dan baru saja terjadi di surat kabar yang dapat menarik perhatian khalayak. Kemudian Williard C. Bleyer mengartikan berita adalah suatu peristiwa aktual dari wartawan yang dimuat dalam surat kabar dan mengandung makna bagi para pembacanya. Wartawan senior Indonesia, Djafar H. Assegaf memberikan pengertian berita merupakan suatu laporan tentang fakta atau gagasan terkini yang diberitakan wartawan untuk menarik perhatian pembaca. Bagaimana pembaca tertarik dengan isi berita luar biasa, penting atau akibat dari yang ditimbulkannya atau mencangkup *human interest* yang dapat mengunggah emosi pembaca.

Berdasarkan berbagai definisi yang berbeda, namun terdapat persamaan yang mengikat, yakni; menarik perhatian, luar biasa dan terbaru. Maka dari semua pengertian dari pakar, dapat disimpulkan bahwa berita merupakan segala laporan yang berasal dari wartawan atas sebuah kejadian atau peristiwa, gagasan, fakta atau gagasan aktual yang disiarkan untuk menarik perhatian pembaca (Barus, 2010: 26)

Setidaknya ada beberapa yang dapat dipahami bahwa suatu informasi dapat dijadikan berita jika telah melalui beberapa syarat, antara lain:

- a) Informasi berdasarkan fakta, bukan opini atau karangan fiksi
- b) Jika berupa pendapat atau ide bukanlah dari wartawan atau reporter yang menulisnya, melainkan pendapat atau ide dari oranglain yang dijadikan narasumber atau wartawan tidak boleh memasukan opininya ke dalam berita.
- c) Informasi ditulis dengan cara sistematika yang telah ditentukan
- d) Dimuat dan disebarakan melalui media massa (Mondry, 2016: 144)

Hal yang perlu diingat dalam berita adalah bagaimana informasi tersebut dapat menarik perhatian khalayak dan memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Konsumen dalam hal ini merupakan pembaca berita baik di media cetak atau media online, pendengar radio dan televisi. Dengan demikian, jika diamati berita pada dasarnya mengandung beberapa unsur, antara lain:

- a) Suatu kejadian, peristiwa, gagasan, fakta dan pikiran
- b) Menarik perhatian khalayak karena ada beberapa faktor yang penting
- c) Diberitakan, dilaporkan dan diumumkan untuk menjadi sebuah informasi pengetahuan yang harus diketahui
- d) Dimuat dalam media tertentu.

b) Nilai Berita

Dalam praktiknya, berbagai ideologi di dalam berita berubah wujud ke dalam nilai-nilai yang mendasari pemberitaan dipilih, dipilah, dirancang dan dibuat. Bagaimana media melaporkan kejadian dapat ditelusuri ke dalam nilai-nilai tertentu yang disebut dengan nilai berita. Nilai berita kerap disebut dengan faktor berita atau kriteria berita (K, 2017: 104).

Kriteria umum pada nilai berita menjadi acuan jurnalis untuk memutuskan fakta yang pantas diinformasikan. Berbagai pendapat pakar jurnalistik menjelaskan bahwa untuk memberikan penilaian apakah peristiwa dianggap layak dijadikan sebuah berita adalah ketika wartawan

mampu melihat unsur-unsur yang dapat dijadikan pertimbangan. Hal tersebut agar berita mampu menarik untuk dibaca, didengar dan ditonton oleh konsumen (Suryawati, 2014: 77)

Dari syarat berita harus dapat menarik perhatian khalayak, sehingga perlu untuk mengetahui unsur-unsur di dalamnya sehingga menjadi nilai menarik dari suatu berita. Adapun unsur nilai berita terbagi menjadi dua yakni unsur nilai berita yang terlihat dan unsur nilai berita yang tak terlihat. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Unsur Nilai Berita yang Terlihat

Unsur-unsur berita menurut Santana (2005), meliputi sebagai berikut:

1. *Immediacy* (kesegaran/terbaru/*timelines*)

Immediacy juga bisa disebut *timelines*. Berita menjadi menarik perhatian jika mengandung informasi yang segar/baru. Semua media berlomba memberitakan informasi secepatnya. Hal ini tak lepas dengan adanya unsur kebaruan di dalam berita. Selain informasi terbaru, berita yang lama terjadi dapat ditemukan sesuatu yang baru atau dapat dikatakan beritanya menjadi baru lagi.

2. *Proximity* (kedekatan/jarak)

Suatu berita akan terlihat menarik oleh khalayak jika peristiwa tersebut terjadi atau ada di dekat mereka. Jarak berita bisa berupa kedekatan berupa psikologis maupun geografis. Secara umum, berita diinformasikan di sekitar orang-orang yang terkena berita tersebut, sehingga ada lingkungan yang dipengaruhi oleh berita.

3. *Consequence* (konsekuensi)

Berita di dalamnya mengandung nilai konsekuensi yang dapat mengubah kehidupan masyarakat atau konsumen. Misalkan berita mengenai kenaikan harga BBM, tentu semua masyarakat harus mematuhi karena terkait nilai konsekuensi tersebut.

4. *Conflict* (Pertentangan)

Berita mengandung pertentangan. Secara simpelnya, jika terjadi pertengkaran orang setidaknya tetangga mengetahui meskipun

informasi yang terdengar samar. Pada kenyataan, informasi tersebut menarik perhatian. Permusuhan antarindividu, antarkelompok bahkan antarnegara dan peristiwa yang mengandung konflik seperti pembunuhan demonstrasi, perang dan bebrbagai kejadian kriminal merupakan berita yang mengandung konflik.

5. *Oddity* (Keanehan/luar biasa)

Berita akan menarik perhatian jika informasi yang disampaikan terdapat sisi keluarbiasaan seperti gempa bumi dengan skala ritcher tinggi dengan disertai tsunami, seseorang ibu melahirkan kembar delapan atau pencalonan tukang cukur sebagai presiden dan sebagainya.

6. *Sex* (Seks)

Seks menjadi unsur yang utama dalam nilai berita, namun bisa juga menjadi unsur tambahan, tergantung pada pemberitaannya. Peristiwa yang melibatkan seks dapat melebar ke peristiwa lain yang memungkinkan terjadinya pembunuhan, peperangan dan peristiwa kriminal lainnya. Oleh karena itu, seks menjadi berita yang menarik untuk diberitakan. Namun dalam memberitakan informasi harus memiliki kewaspadaan yang penuh karena media juga bisa menjadi jendela informasi mengenai hal-hal buruk yang terjadi pada berita seks tersebut.

7. *Emotion* (Emosi)

Unsur ini terkadang digabungkan dengan unsur *human interest*. Emosi merupakan unsur yang paling banyak menyentuh perasaan seperti rasa bahagia, sedih, kecewa, simpati, empati, ambisi dan sebagainya. Oleh karena itu, bila terjadi emosi pembaca, mereka akan tersentuh sehingga akal sehat atau rasio tidak terlalu dipikirkan.

8. *Prominence* (Terkemuka/ternama)

Berita akan menarik perhatian pembaca jika di dalamnya mengandung nama yang membuat berita menjadi terkenal.

Keterkenalan tidak harus berupa orang, bisa jadi tempat, waktu dan sesuatu yang menjadi pembaca tertarik.

9. *Suspense* (Ketegangan)

Situasi tegang yang terjadi dapat menjadi berita yang menarik. Misalnya, seperti gempa bumi, seorang anak balita terjepit di reruntuhan, petugas berusaha mencoba menolongnya dengan memperbesar lubang agar ada orang yang bisa masuk. Suasana tersebut menarik diberitakan hingga hasil dari pertolongan (Mondry, 2016).

10. *Progress* (Kemajuan)

Masyarakat atau konsumen pada umumnya menunggu perkembangan terhadap berita yang menarik bagi mereka. Dalam peristiwa pembunuhan, masyarakat akan menunggu proses hukuman yang akan terjadi pada pelaku. Berita tersebut akan mengalami perkembangan sampai kasus dinyatakan telah selesai.

b) Unsur Nilai Berita yang Tidak Terlihat

Selain unsur nilai yang dapat dilihat, terdapat unsur nilai berita yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Unsur tersebut meliputi:

1. Akurat/cermat

Suatu berita harus ditulis secara cermat dan akurat sesuai data baik yang didapatkan di lapangan atau data pendukung lainnya. Wartawan perlu melakukan pengecekan secara mendalam atau melakukan konfirmasi sebelum menulis berita sehingga informasi yang didapatkan sesuai fakta.

2. Lengkap

Berita ditulis harus bersifat lengkap dan utuh, agar pihak lain mengetahui informasi secara lengkap dan benar sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman

3. Kronologis

Berita harus ditulis secara berurutan sesuai kejadian, waktu dan tempat agar mudah dipahami masyarakat

4. *Magnitude* (Daya Tarik)

Berita harus mempertimbangkan daya tarik masyarakat. Jika berita tidak memiliki sisi menarik, maka berita tersebut tidak layak untuk diinformasikan

5. Balance (Berimbang)

Penulisan berita haruslah berimbang. Maksudnya dalam menulis tidak boleh adanya keberpihakan baik secara individu, kelompok maupun organisasi. Wartawan harus selalu menyertakan informasi bukan hanya dari salah satu pihak saja, melainkan berusaha untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak lain (Mondry, 2016: 153)

BAB III

PROFIL CNNINDONESIA.COM DAN DETIK.COM, BERITA PELARANGAN WAHABI DI CNNINDONESIA.COM DAN DETIK.COM

A. CNNIndonesia.com

1) Profil CNNIndonesia.com

CNNIndonesia.com adalah salah satu situs berita CNN Indonesia yang masih berada dalam naungan Trans Corp. Sejak diluncurkan pertama kali pada 20 Oktober 2014, media ini telah menarik banyak orang dan ikut bersaing dengan stasiun berita yang sudah ada di Indonesia. CNNIndonesia.com hadir menggunakan tagline *News We Can Trust*. CNNIndonesia.com menyajikan berita yang aktual berdasarkan fakta, memberitakan secara tajam dan bermakna, serta argumen yang dapat dipahami dan didukung data yang ada.

CNN Indonesia dan CNN Internasional adalah dua media besar yang tak bisa dipisahkan. Keduanya akan saling bekerja sama dalam meliput berita yang besar. Chairul Tanjung (CT) sebagai pendiri CT Corps menyakini bahwa mitra kerja sama ini akan membantu masyarakat Indonesia memahami situasi dunia dan yang lebih pentingnya bagaimana dunia memahami Indonesia. CNN Indonesia bersiaran dengan menggunakan bahasa Indonesia di studio Trans Media. Saluran ini menyajikan konten informasi lokal hingga internasional dengan berfokus pada berita umum, pendidikan, olahraga, bisnis dan hiburan.

Sebagai media online yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, CNNIndonesia.com selalu berusaha mewujudkan standar editorial CNN Internasional dalam produksi berita. Untuk memudahkan para pembaca, CNNIndonesia.com menghadirkan pengguna dapat mengakses secara gratis melalui situs dan aplikasi resmi. Situs berita ini tidak hanya dikenal dengan nama besarnya, melainkan juga menyajikan berita yang inovatif dan beragam dari konten internasional maupun lokal, berita nasional, ekonomi, olahraga, teknologi, otomatis, hiburan dan gaya hidup.

2) Berita Pelarangan Wahabi di CNNIndonesia.com

Ketika isu regulasi pelarangan wahabi menjadi pro dan kontra, tercatat CNNIndonesia.com mempublikasikan 11 berita, tetapi yang akan diteliti dalam penelitian ini diambil sebanyak tujuh berita dimulai pada 27 Oktober – 2 November

2022. Berita pelarangan wahabi yang disampaikan oleh CNNIndonesia.com disebutkan muncul pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah PBNU yang digelar di Asrama Haji Jakarta, 25-27 Oktober 2022. Pada dasarnya, semua pemberitaan di CNNIndonesia.com terkait regulasi pelarangan wahabi di Indonesia berisi pernyataan-pernyataan LDNU mengenai wahabi dan bagaimana pandangan masyarakat tentang wahabi.

Bentuk pemberitaan pelarangan wahabi di CNNIndonesia.com rata-rata berupa *straight news*, yakni berita langsung yang bersifat aktual dan terkini. Pemberitaan pelarangan wahabi pada CNNIndonesia.com dijelaskan bahwa PBNU meminta pemerintah agar membuat regulasi pelarangan penyebaran paham wahabi melalui majelis taklim, media online maupun media sosial. Berbagai pemberitaan yang ditayangkan banyak yang bersumber dari tokoh NU. Hal ini dapat ditandai judul dan isi yang digunakan seperti pro. Berikut berita yang telah dipilih penulis mengenai pelarangan wahabi di CNNIndonesia.com

Tabel 3 Daftar Berita Pelarangan Wahabi di CNNIndonesia.com

No	Judul	Tanggal/Waktu	Pembahasan Isi
1.	Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Penyebaran Wahabi di RI	Kamis, 27 Oktober 2022/ 20:08 WIB	<p>a. LD PBNU meminta pemerintah membentuk regulasi pelarangan penyebaran wahabi melalui majelis taklim, media online dan media sosial</p> <p>b. PBNU berpandangan bahwa kelompok ini seringkali menuding bid'ah dan mengkafirkan tradisi keagamaan mayoritas umat Islam.</p> <p>c. Menteri Polhukam menyoroti eksistensi wahabi yang tidak cocok di Indonesia.</p>
2.	LD PBNU Harap Pemerintah Larang Wahabi Banyak di Masjid Kantor	Jumat, 28 Oktober 2022/06:40 WIB	a. LD PBNU menilai masih banyak kajian islam dan kegiatan keagamaan wahabi di masjid-masjid kantor yang justru bertolak belakang dengan komitmen pemerintah

			<p>untuk membangun moderasi beragama</p> <p>b. LD PBNU siap mendelegasikan ustadz, dai, mubaligh dan memberikan materi yang sesuai dengan kapasitas dan kepakarannya</p>
3.	Netizen Risau Penyalahgunaan Cap Wahabi, Singgung Buih di Lautan	Jumat, 28 Oktober 2022/19:58 WIB	<p>a. Banyak warganet yang merisaukan penyalahgunaan cap wahabi</p> <p>b. Pro dan kontra adanya wahabi dan respon warganet terhadap sikap PBNU</p>
4.	LD PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi hingga Festival HijrahFest	Sabtu, 29 Oktober 2022/13:32 WIB	<p>a. LD PBNU meminta pemerintah tidak mengizinkan adanya kegiatan yang bertujuan menolak NKRI dan pancasila termasuk HijrahFest</p> <p>b. PWNU Jawa Timur dan MUI Jawa Timur memprotes keras penyelenggaraan 'Surabaya Islamic Festival' yang menggunakan logo NU tanpa izin</p>
5.	PBNU Klarifikasi Soal Larang Wahabi Yang Beredar di Timur Tengah	Senin, 31 Oktober 2022/18:35 WIB	<p>Ketua PBNU, Ahmad Fahrurrozi memberikan penjelasan mengenai pelarangan wahabi yang menjadi rekomendasi LD PBNU pada Rakernas. Wahabi yang dimaksud LD PBNU adalah paham wahabi takfiri yang dijadikan ideologi ISIS</p>
6.	PBNU: Tak Ada Persetujuan Ketum & Rais Aam Soal Larangan Wahabi di RI	Selasa, 01 November 2022/09:15 WIB	<p>Sekretaris Jendral PBNU Saifullah Yusuf menyatakan bahwa permintaan regulasi pelarangan wahabi belum resmi karena belum dikonsultasikan dan</p>

			disetujui oleh Rais Aam PBNU.
7.	Ketum PBNU Gus Yahya: Larangan Paham Wahabi Belum Resmi	Rabu, 02 November 2022/12:59 WIB	Ketua Umum PBNU, Gus Yahya mengatakan permintaan kepada pemerintah terkait pelarangan wahabi belum resmi dari NU. Menurutnya, perbedaan antar kelompok agama memang harus dibahas agar tidak menimbulkan pertentangan.

B. Detik.Com

1) Profil Detik.com

Detik.com merupakan situs berita yang menjadi pelopor media massa yang menggunakan internet dalam pemberitaannya. Detik.com hanya memiliki versi daring sehingga pendapatannya bergantung pada iklan yang ditampilkan. Media ini didirikan oleh Budiono Darsono (mantan wartawan Detik), Yayan Sopyan (mantan wartawan Detik), Abdul Rahman (mantan wartawan Tempo) dan Didi Nugraha. Detik.com sebenarnya sudah diakses pada 30 Mei 1998, namun mulai menyediakan basis online dengan sajian lengkap pada 9 Juli 1998, sehingga pada tanggal 9 Juli 1998 ditetapkan sebagai hari lahir Detik.com.

Jauh sebelum adanya Detik.com, Detik muncul sebagai pemberitaan dalam versi cetak. Detik hadir pada masa Orde Baru muncul dalam bentuk majalah mingguan yang memberitakan masalah politik sebagai berita utama. Namun kekuasaan ketat Orde Baru memaksa Detik untuk mengakhiri masa terbitnya dalam bentuk majalah. Hal ini karena Detik.com terlalu keras dalam pemberitaan yang dianggap menyerang pada masa kekuasaan itu. Ada beberapa media yang dicabut surat izin usaha penerbitan yakni Detik, Tempo dan Forum.

Berdasarkan sejarah dari Detik.com lahirnya media ini tak lepas dari kisah sukses seorang milyader bisnis lokal bernama Abdul Rahman. Pada Sempetmber 1995, sebelum Detik.com hadir, Abdul Rahman yang hobi mengotak-atik komputer memulai perusahaan desain web bersama dua temannya, Budiono Darsono dan Didi Nugraha. Perusahaan desain yang mereka dirikan bernama Agronet Multicitra

Siberkom atau disingkat Agrakom yang modal awalnya 40 ribu dolar atau setara dengan seratus juta.

Perusahaan ini berkantor di Jakarta Selatan. Klien pertama yang berhasil adalah harian Kompas. Kesuksesan ini diikuti dengan klien lain sehingga Agrakom berhasil mendapat pendapatan 800 ribu dollar AS. Dari kenaikan pendapatan, karyawan pun bertambah yang dari 8 orang menjadi 30 orang. Namun keberhasilan ini tak berlanjut terus, Agrakom dihajar krisis moneter global pada tahun 1997, sehingga karyawan semakin berkurang.

Pada 30 Mei 1998 berdiri Detik.com, namun media ini belum berdiri sepenuhnya. Pada 9 Juli 1998, Detik.com muncul sajian lengkap dengan tenaga awal tiga orang reporter. Budiono sendiri salah satu reporter yang menjadi *gatekeeper* pertama kalinya untuk menerima, memilah laporan dari reporter Detik.com. Awal peliputan berita yang disajikan oleh Detik.com lebih berfokus pada berita politik, ekonomi dan teknologi informasi. Namun perkembangan politik dan ekonomi yang kian membaik, sajian dalam Detik.com ditambahkan dengan peliputan hiburan dan olahraga.

Meskipun menggantungkan pendapatannya dari bidang iklan, Detik.com selalu mengedepankan berita-berita yang aktual. Dari situlah, Detik.com menyudahi update-annya menggunakan karakteristik media cetak harian, mingguan dan bulanan yang disajikan berupa *breaking news*. Pada saat itu Detik.com muncul sebagai situs berita online paling populer di kalangan pengguna internet dengan menyajikan informasi yang dibutuhkan khalayak. Fasilitas dalam website semakin bertambah dengan berita hiburan dan olahraga, email gratis dan lain-lain yang masih *online* hingga saat ini.

Pada 3 Agustus 2021, Detik.com diakuisisi oleh CT Corp dan mulai tanggal itulah Detik.com resmi menjadi milik Trans Corp. Chairul Tanjung sebagai pemilik CT Corps membeli Detik.com secara keseluruhan dengan nilai 60 juta Dolar AS atau setara dengan 521-540 miliar rupiah, sehingga Detik.com bekerja dibawah pengawasan Trans Corp. Sejak saat itulah semua dewan direksi diisi oleh pihak-pihak Trans Corp sebagai perpanjangan tangan CT Corp di bagian media. Detik.com dibawah Trans Corp mengalami peningkatan pengunjung website. Page view

Detik.com sekarang ini mencapai 3 juta per harinya sehingga keberhasilan ini Detik.com meraih posisi ke empat tertinggi dari alexa.com untuk seluruh konten di Indonesia.

2) Berita Pelarangan Wahabi di Detik.com

Ketika isu pelarangan wahabi mencuat pada Oktober 2022, Detik.com tercatat memuat 12 berita, namun penelitian ini mengambil sebanyak tujuh berita dimulai pada 28 Oktober – 1 November 2022. Berita pelarangan wahabi yang disampaikan oleh Detik.com pertama kali diposting memuat permintaan LDNU kepada pemerintah terkait pelarangan wahabi dan kegiatan HijrahFest. Pada pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa PBNU meminta pemerintah agar membuat regulasi pelarangan penyebaran wahabi serta kegiatan HijrahFest yang diduga sebagai kegiatan yang diwaspadai penyebaran anti pancasila dan NKRI, selain itu pemberitaan Detik.com mengambil narasumber dari ormas lain.

Pemberitaan pelarangan wahabi pada Detik.com semuanya berupa berita straight news. Dilihat dari judulnya, terdapat tiga berita yang mengutip kalimat langsung dari narasumber. sedangkan dua berita berbentuk *indept news*, yakni berita mendalam yang dikembangkan dari berita yang telah ada. Dua *indept news* tersebut berjudul “Wasekjen: Usulan Ke Pemerintah Larang Wahabi Takfiri Belum Resmi dari PBNU” dan “PBNU Anulir Rilis LDNU Soal Wahabi: Tak Ada Persetujuan Rais Aam-Ketum”. Adapun rincian tujuh berita yang akan dianalisis antara lain:

Tabel 4 Daftar Berita Pelarangan Wahabi di Detik.com

No	Judul	Tanggal/Waktu	Pembahasan Isi
1.	Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi- HijrahFest	Jumat, 28 Oktober 2022/17:42 WIB	<p>a. Lembaga dakwah PBNU minta pemerintahan membuat regulasi pelarangan wahabi serta pelarangan kegiatan/event yang bertujuan menolak NKRI dan pancasila</p> <p>b. LD PBNU menilai paham wahabi memicu gesekan sosial hingga</p>

			perpecahan dan berpotensi mengarah ke terorisme
2.	Penjelasan PBNU Soal Usulan Agar Pemerintah Larang Wahabi Takfiri	Minggu, 30 Oktober 2022/19:05 WIB	a. LD PBNU menjelaskan paham salafi (wahabi) takfiri yang di usulkan kepada pemerintah untuk dilarang persebarannya di Indonesia b. LD PBNU menyebutkan paham salafi takfiri yang cenderung intoleran, mengharamkan amaliah masyarakat seperti ziarah kubur, tahlilan, maulid dan lain-lain.
3.	Din Syamsuddin Soal Usulan LD PBNU Larang Wahabi Takfiri: Kedepankan Toleransi	Senin, 31 Oktober 2022/18:52 WIB	Mantan Ketua Umum PP, Din Syamsuddin menilai kejadian tersebut harusnya mengutamakan sikap toleransi dan mencari jalan tengah dengan mengedepankan musyawarah daripada menyalahkan pihak lain.
4.	Wasekjen: Usulan Ke Pemerintah Larang Wahabi Takfiri Belum Resmi dari PBNU	Senin, 31 Oktober 2022/19:37 WIB	Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan menjelaskan rekomendasi pelarangan wahabi dianggap belum resmi karena untuk semua kebijakan ada mekanismenya.
5.	PBNU Anulir Rilis LDNU Soal Wahabi: Tak Ada Persetujuan Rais Aam-Ketum	Selasa, 01 November 2022/00:55 WIB	Sekretaris Jenderal PBNU, Gus Ipul meluruskan pernyataan rekomendasi pelarangan wahabi dalam rapat Rakernas dianggap kontraproduktif dan muncul beragam tafsir di kalangan masyarakat. Pihaknya, pernyataan tersebut belum mendapat persetujuan PBNU, sehingga perlu diabaikan karena bukan termasuk keputusan yang resmi

6.	Respons Anshor Jatim Soal Larangan Wahabi di Indonesia	Selasa, 01 November 2022/09:29 WIB	PW GP Anshor Jatim siap menjalankan arahan apapun dari PBNU termasuk dalam pelarangan organisasi terlarang. Pihaknya akan melawan hal yang dapat membahayakan keberlangsungan NKRI
7.	PWNU Jatim Sentil Kekompakan PBNU Soal Gaduh Larangan Wahabi Takfiri	Selasa, 01 November 2022/19:42 WIB	Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib menyindir kekompakan PBNU mengenai wahabi takfiri. Adanya perbedaan pernyataan hal tersebut menandakan kurang solidnya PBNU dan LDBNU dalam mengambil keputusan.

BAB IV

ANALISIS FRAMING BERITA PELARANGAN WAHABI DI CNNINDONESIA.COM DAN DETIK.COM

A. Analisis Framing Berita Pelarangan Wahabi di CNNIndonesia.com

Dari sejumlah 42 berita yang diproduksi CNNIndonesia.com mengenai wahabi, terdapat 11 berita yang memuat tentang pelarangan wahabi, peneliti mengambil tujuh berita sebagai objek penelitian. Adapun berita tersebut yakni:

Tabel 5 Analisis Framing Berita Pelarangan Wahabi di CNNIndonesia.com

No	Tanggal Berita	Judul Berita
1.	Kamis, 27 Oktober 2022	Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Penyebaran Wahabi di RI
2.	Jumat, 28 Oktober 2022	LD PBNU Harap Pemerintah Larang Wahabi Banyak di Masjid Kantor
3.	Jumat, 28 Oktober 2022	Netizen Risau Penyalahgunaan Cap Wahabi, Singgung Buih di Lautan
4.	Sabtu, 29 Oktober 2022	LD PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi hingga Festival HijrahFest
5.	Senin, 31 Oktober 2022	PBNU Klarifikasi Soal Larang Wahabi Yang Beredar di Timur Tengah
6.	Selasa, 01 November 2022	PBNU: Tak Ada Persetujuan Ketum & Rais Aam Soal Larangan Wahabi di RI
7.	Rabu, 02 November 2022	Ketum PBNU Gus Yahya: Larangan Paham Wahabi Belum Resmi

1. Analisis framing berita “Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Penyebaran Wahabi di RI”

Pemberitaan ini menyoroti rekomendasi LDNU untuk membentuk regulasi pelarangan penyebaran wahabi di Indonesia. Hal ini sebagai langkah tepat untuk menghindari perpecahan dan perdebatan antar kalangan umat. Narasumber yang diambil dari berita ini dari pihak pro yakni Said Aqil Siradj dari PBNU dan Mahfud

MD dari Menteri Polhukam. Pemberitaan pelarangan wahabi menyebutkan pernyataan dari kutipan Menteri Polhukam bahwa salafi wahabi tidak cocok berkembang di Indonesia, akan lebih cocok jika berkembang di luar atau berasal dari daerahnya.

CNNIndonesia juga menambahkan pernyataan Said Aqil Siradj bahwa ajaran wahabi menjadi pintu masuk adanya terorisme di Indonesia. CNNIndonesia.com menambahkan pernyataan dua narasumber yang disampaikan dalam waktu yang berbeda, sehingga CNNIndonesia.com pada berita ini lebih cenderung pro terhadap langkah LDNU dalam pelarangan wahabi. Dari kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa berita ini mengandung frame agama dan politik. Adapun rincian aspek yang dianalisis sebagai berikut:

Tabel 6 Analisis framing berita “Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Penyebaran Wahabi di RI”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i> (Pendefinisian Masalah)	LD PBNU meminta pemerintah untuk membuat regulasi pelarangan wahabi
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	LD PBNU berpandangan aliran wahabi menjadi perdebatan karena sering menuding bid'ah dan kafir
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Paham wahabi dan salafi tidak cocok dengan ajaran Islam yang toleran
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Wahabi sebaiknya perlu ditangani agar tidak terjadi perpecahan.

Define problems (pendefinisian masalah) dari pemberitaan pelarangan wahabi di CNNIndonesia.com menyebutkan bahwa LDNU meminta pemerintah agar membentuk regulasi yang melarang penyebaran paham wahabi. Hal ini dipertegas melalui bunyi rekomendasi eksternal:

"Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah (dalam hal ini Kemenkopolkumham, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag) untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah,"

Berdasarkan *define problems*, bisa diketahui bahwa CNNIndonesia.com mengungkapkan bahwa LD PBNU merekomendasikan pemerintah untuk membuat dan menetapkan regulasi pelarangan wahabi serta memberikan larangan penyebaran paham melalui majelis taklim, media online dan media sosial.

Diagnose causes (Memperkirakan Penyebab Masalah). Penyebab masalah dalam berita dijelaskan bahwa LDNU berpandangan wahabi sering menuding bid'ah hingga mengkafirkan tradisi keagamaan mayoritas umat Islam. CNNIndonesia.com mencoba mengungkapkan penyebab mengapa regulasi pelarangan wahabi direkomendasikan kepada pemerintah karena organisasi tersebut berpandangan bahwa wahabi kerap menimbulkan perpecahan. Hal ini sesuai dengan kalimat:

"LD PBNU berpandangan kelompok yang mengikuti paham wahabi kerap menuding bid'ah hingga mengkafirkan tradisi keagamaan yang dilakukan mayoritas umat Islam di Indonesia. Sehingga, pihaknya melihat masyarakat Islam di akar rumput kerap kali terjadi perdebatan."

Diagnose Causes diatas, CNNIndonesia.com juga menyebutkan aktor penyebab masalah adalah kelompok wahabi yang kerap menuding bid'ah dan mengkafirkan tradisi keagamaan mayoritas muslim Indonesia. CNNIndonesia.com memberikan definisi mengenai wahabi yang digambarkan sebagai pemikiran Islam yang purifikasi sesuai teks Alquran dan Hadis. CNNIndonesia pun menyebutkan pernyataan Said Aqil Siradj (PBNU) yang menyatakan bahwa paham wahabi sebagai embrio munculnya paham radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Hal ini sesuai dengan kalimat:

"Tak hanya itu, LD PBNU juga menilai paham wahabi ditengarai sebagai embrio munculnya paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme"

Untuk mempertegas penolakan terhadap wahabi, CNNIndonesia.com mengutip pernyataan narasumber tambahan Mahfud MD yang diberi keterangan tambahan sebagai informasi. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai paham wahabi tak cocok berkembang di Indonesia. Kedua tokoh ini ditempatkan

CNNIndonesia.com sebagai tokoh yang menolak adanya wahabisme di Indonesia, sehingga dapat dilihat dari segi narasumber berita lebih cenderung setuju dengan adanya regulasi pelarangan wahabi.

Kemudian, *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral) dari berita diatas adalah paham wahabi yang intoleran tidak cocok berkembang di Indonesia. Dapat dilihat dari kalimat dalam pemberitaan:

“.....paham wahabi dan salafi tidak cocok dengan ajaran Islam yang ada di Indonesia. Menurutnya, dua paham itu lebih cocok jika berkembang di luar Indonesia atau daerah asalnya”

Aspek ketiga dalam berita tersebut, CNNIndonesia.com memberikan pendapat dari Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan terkait eksistensi salafi wahabi yang tidak cocok berada di Indonesia. Dua paham tersebut lebih baik berkembang di luar Indonesia. Pernyataan ini dipertegas dalam kalimat langsung yang berbunyi:

“.....wahabi salafi, enggak cocok di kita Indonesia. Boleh di sana. Karena hukum itu sesuai kebutuhan waktu, lokal dan tempatnya”

Penambahan narasumber dari perwakilan politik memberikan tanda bahwa CNNIndonesia.com ingin mempertegas adanya eksistensi wahabi yang dinilai memerlukan regulasi pelarangan, sehingga dalam CNNIndonesia.com dalam pemberitaan pertama dinilai berada dipihak pro, yakni mendukung langkah LDNU untuk membentuk regulasi pelarangan wahabi.

Selanjutnya, *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian) pada berita diatas, CNNIndonesia.com memberikan solusi terkait wahabi sebaiknya perlu ditangani karena jika tetap dibiarkan akan terjadi perpecahan serta munculnya kelompok anti Pancasila. Pernyataan ini berdasarkan kalimat langsung narasumber Said Aqil Siradj yakni:

“Kalau kita benar-benar sepakat, benar-benar satu barisan ingin menghadapi, menghabiskan, menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya yang dihadapi, pintu masuknya yang harus kita habisin, apa? Wahabi! Ajaran Wahabi itu pintu masuknya terorisme”

2. Analisis framing berita "LD PBNU Harap Pemerintah Larang Wahabi Banyak di Masjid Kantor"

Pada berita kedua tidak jauh berbeda dengan berita pertama yakni CNNIndonesia.com menambahkan definisi wahabi hampir sama di dalam berita kedua yang merupakan salah satu aspek yang ditonjolkan. Penonjolan hampir sama yakni menyorot pelarangan wahabi dan bahaya dari paham tersebut. Pada berita kedua, CNNIndonesia.com memberikan pandangan wahabi dalam kaca mata LDNU serta memberikan langkah-langkah yang akan dilakukan PBNU jika rekomendasinya siap ditetapkan. Berdasarkan judulnya, CNNIndonesia.com hanya menyorot sebagian kecil mengenai larangan wahabi di masjid kantor. Dalam redaksinya, CNNIndonesia juga mengutip dua narasumber yang sama seperti pada berita pertama yakni Said Aqil Siradj dan Mahfud MD, sehingga pada berita kedua mengandung *frame* agama dan politik. Adapun rincian analisis berita kedua yakni:

Tabel 7 Analisis framing berita "LD PBNU Harap Pemerintah Larang Wahabi Banyak di Masjid Kantor"

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Pandangan LD PBNU tentang kajian wahabi yang masih ditemukan di masjid perkantoran
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Paham wahabi bertolak belakang dengan komitmen pemerintah untuk membangun moderasi beragama
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Permintaan LD PBNU untuk melibatkan dalam penyusunan materi dan kurikulum kajian
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	.LD PBNU siap mendelegasikan da'i. ustadz, mubaligh untuk menyampaikan kajian

Define Problems dari berita diatas adalah CNNIndonesia.com menyebutkan mengenai pandangan LDNU tentang kajian wahabi yang masih ditemukan di masjid perkantoran. Hal ini terdapat pada kalimat:

“...LD PBNU juga memandang masih banyak kajian keislaman dan kegiatan keagamaan di masjid-masjid perkantoran diampuni oleh penceramah berpaham wahabi-salafi”

Kemudian **Diagnose Causes** dalam berita tersebut adalah CNNIndonesia.com mengungkapkan alasan adanya pelarangan wahabi karena tidak sejalan dengan komitmen pemerintah untuk membangun moderasi beragama. Dapat dilihat dari kalimat:

”..... Paham ini, kata mereka, justru bertolak belakang dengan komitmen pemerintah untuk membangun moderasi beragama”

Make Moral Judgement. Pada pemberitaan CNNIndonesia.com memberikan keputusan moral terhadap rekomendasi LDNU untuk melibatkannya dalam penyusunan materi dan kurikulum dakwah dan kajian di setiap masjid perkantoran. Hal ini disebutkan dalam kalimat:

“Karenanya, LD PBNU merekomendasikan kepada Kementerian dan lembaga negara, Direksi BUMN dan BUMD untuk melibatkan LD PBNU menyusun materi dan kurikulum dakwah dan kajian keislaman di masjid-masjid perkantoran tersebut”

Sedangkan **Treatment Recommendation** dalam berita tersebut adalah CNNIndonesia.com memberikan solusi masalah berdasarkan kutipan rekomendasi pelarangan wahabi dari yang menyatakan bahwa LDNU siap mendelegasikan da'i, ustadz, mubaligh yang berada dalam naungan NU untuk menyampaikan kajian sesuai kualifikasi, kapasitas dan kepakarannya. Hal tersebut diambil dari paragraf:

"Lembaga Dakwah PBNU siap mendelegasikan para ustadz, dai, dan mubaligh yang berada di bawah naungan Lembaga Dakwah PBNU untuk menyampaikan materi kajian, tausiyah, ceramah, dan pembelajaran ilmu-ilmu keislaman sesuai kualifikasi, kapasitas dan kepakarannya,"

3. Analisis framing “Netizen Risau Penyalahgunaan Cap Wahabi, Singgung Buih di Lautan”

Pada berita ketiga, CNNIndonesia.com berusaha memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai berbagai respon warganet dengan adanya pemberitaan regulasi pelarangan wahabi. CNNIndonesia.com menduga pemberitaan pelarangan wahabi berpotensi adanya pembungkaman, hal ini dapat dilihat pada redaksi bagian

lead yang diakhiri dengan kalimat tanya. CNNIndonesia menyorot respon warganet yang menganggap risau mengenai pemberitaan tersebut. Respon warganet yang dipilih dalam pemberitaan hampir semuanya menyatakan kontra, namun pada redaksi awal pemberitaan CNNIndonesia.com masih memberikan pernyataan dari regulasi pelarangan wahabi yang dirilis oleh LDNU serta mempertimbangkan untuk mencantumkan dua narasumber yang sama seperti pada berita sebelumnya yakni Saiq Aqil Siradj dan Mahfud MD.

CNNIndonesia.com juga mengutip artikel dari ensiklopedia Britannica yang memberikan penjelasan wahabi untuk mempermudah pembaca sekaligus sebagai memperkuat penonjolan terhadap isu yang dipilihnya. Isi pemberitaan menunjukkan kontra dengan menampilkan respon warganet dan pro dengan menampilkan pernyataan dua narasumber. Meski judul terkesan kontra, CNNIndonesia.com mengutamakan pernyataan dua narasumber yang menyatakan melarang tegas terhadap paham wahabi sehingga pemberitaan ini menyoroti sisi politik dan agama. Berikut rincian analisis berita ketiga:

Tabel 8 Analisis framing “Netizen Risau Penyalahgunaan Cap Wahabi, Singgung Buih di Lautan”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Warganet merisaukan penyalahgunaan cap wahabi dan diartikan sebagai kepentingan sepihak
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pro dan kontra adanya pemberitaan pelarangan wahabi dan sikap PBNU dalam menghadapi perbedaan ajaran
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Perbedaan pendapat antara wahabi dan mayoritas umat (NU) sebaiknya dilakukan diskusi
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Kaum Nadhliyin diminta untuk memakmurkan masjid

Define Problems. CNNIndonesia.com mendefinisikan masalah tersebut berupa kerisauan warganet mengenai penyalahgunaan cap wahabi di tengah

kondisi negara yang masih terpolarisasi dan rawan pembungkaman lawan politik. Hal ini sesuai dengan kalimat:

"...warganet merisaukan sejumlah hal terutama di tengah kondisi negara yang masih terpolarisasi dan rawan pembungkaman lawan politik"

CNNIndonesia.com menyorot berita tersebut dengan mengutip respon warganet terkait berita regulasi pelarangan wahabi. Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh akun @azrina97Mil yang memberikan pendapat untuk tidak sembarangan mencap pihak tertentu dengan label.

"Tapi label wahabi itu janganlah disematkan sembarangan, pada orang yang tidak disukai," kicau dia"

CNNIndonesia mengutip pernyataan kontra warganet yang menyatakan ajakan untuk membenahi diri dengan melakukan dakwah yang benar.

Kemudian **Diagnose Causes** dalam pemberitaan CNNIndonesia.com yakni pro dan kontra warganet terkait adanya berita regulasi pelarangan wahabi yang dianggap sebagai kepentingan sepihak. Hal ini dapat dilihat dari kalimat:

"Ketika pelarangan itu disetujui maka selanjutnya arti Wahabi diartikan sesuai dg kepentingan sepihak, yg tidak cocok dan tidak sejalan dicap Wahabi, bukan di maknai sesuai ajarannya yg sebenarnya,"

CNNIndonesia.com juga mengutip pernyataan dari akun @panca_negara yang menganggap berita regulasi pelarangan wahabi ini justru memecahbelakan umat, berikut pernyataan:

"Ini sebenarnya siapa sih yang pemecah belah umat. Asal akidahnya sama kenapa harus saling sikut,"

CNNIndonesia mengutip dan secara tidak langsung mencoba menegaskan bahwa banyak warganet yang merasa risau terkait berita regulasi tersebut.

Make Moral Judgement. Berita yang dipublikasi CNNIndonesia.com menilai bahwa perbedaan pendapat antar umat sebaiknya dilakukan diskusi dan saling merangkul untuk menerima perbedaan. Hal ini dapat diketahui melalui redaksi

"Akun @cahyosetiadi menilai mestinya kaum yang dituding Wahabi ini "Harusnya diajak diskusi, dirangkul."

Treatment Recommendation. CNNIndonesia menilai bahwa warganet risau terhadap cap wahabi dikhawatirkan mengandung kepentingan sepihak, sehingga CNNIndonesia memberikan solusi penyelesaian terhadap permasalahan tersebut adalah kaum Nahdliyin diminta untuk memakmurkan masjid agar gerakan wahabi terbatas. Hal ini disajikan CNNIndonesia.com dalam redaksi:

“Alih-alih merisaukan kelompok tertentu yang ‘menguasai’ masjid, akun @pengguna_new menyarankan kaum Nahdliyin untuk memakmurkannya”

Pernyataan ini dipertegas dengan kutipan langsung dari akun yang sama, yaitu

“Masjid2 yg masyarakatnya mengaku NU malah diramaikan orang2 yg d sangka wahabi. Kalau tidak mau kalah jamaah ya gerakkan warganya yg mayoritas NU untuk makmurkan masjid,”

Redaksi diatas dapat dimaknai bahwa CNNIndonesia.com ingin menjelaskan keputusan LDNU mengenai rekomendasi tentang regulasi pelarangan wahabi dinilai dapat menimbulkan kekacauan. Dilihat dari judul berita, mengartikan banyaknya warganet yang pro dan kontra adanya keputusan tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan beberapa respon yang dianggap mewakili adanya keresahan warganet usai ramai pemberitaan LDNU. Namun CNNIndonesia.com dalam pemberitaan ini menempatkan pernyataan dua narasumber yang menyatakan kontra dengan wahabi yang diletakan pada redaksi awal, sehingga pemberitaan ini terkesan lebih cenderung pro dengan larangan wahabi meskipun judul dan isi berita lebih menyorot respon warganet.

4. Analisis framing berita “LD PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi hingga Festival HijrahFest”

Berita keempat tak jauh pembahasannya dengan berita sebelumnya. CNNIndonesia.com menjelaskan paham wahabi serta rekomendasi yang sama dengan berita sebelumnya. Hanya saja, CNNIndonesia.com membedakannya dengan berita sebelumnya dengan menambahkan sub judul “Minta Tak Izinkan HijrahFest”. Pemberitaan CNNIndonesia.com di dalam judul tersebut mengungkapkan pelarangan HijrahFest karena beberapa alasan, yang menjadi sorotan CNNIndonesia.com adalah sikap LDNU terhadap kegiatan HijrahFest yang

diduga sebagai kegiatan yang menjerumuskan penolakan terhadap NKRI dan Pancasila.

Narasumber pada pemberitaan ini hanya mengutip bunyi dari rekomendasi pelarangan wahabi melalui website resmi PBNU. Sebagian besar pemberitaan ini menjelaskan regulasi pelarangan wahabi, sehingga dalam redaksinya berita ini lebih cenderung pro terhadap langkah LDNU. Adapun rincian analisisnya sebagai berikut:

Tabel 9 Analisis framing berita “LD PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi hingga Festival HijrahFest”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i> (Pendefinisian Masalah)	LD PBNU minta pemerintah melarang wahabi hingga Festival HijrahFest
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Kelompok wahabi dianggap memecah belah umat dan dinilai sebagai embrio radikalisme dan terorisme
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Kegiatan HijrahFest batal dilaksanakan karena diwaspadai adanya penyebaran wahabi
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Penyebaran wahabi jika dibiarkan akan menumbuhkan perpecahan.

Define problems. Berdasarkan berita yang diproduksi CNNIndonesia.com, pendefinisian masalah dari berita tersebut adalah LDNU meminta pemerintah melarang wahabi dan tidak memberikan izin HijrahFest. Hal ini dipahami pada paragraf:

“Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah membuat regulasi yang melarang penyebaran paham Wahabi melalui majelis taklim, media online maupun media sosial di Indonesia hingga tak mengeluarkan izin festival HijrahFest atau HijabFest”

Disamping redaksi atas, CNNIndonesia.com ingin memperjelas ideologi wahabi dengan memberikan definisi, pencetus serta tuduhan sepihak. Dalam redaksinya, CNNIndonesia menjelaskan bahwa pemikiran pengikut wahabi berpegang teguh pada pemurniaan Islam ke bentuk asli sesuai teks Al-Quran dan Hadis. Pemurnian

disini dimaknai sebagai pengembalian atau pembersihan Islam dari sesuatu yang dilarang. Dalam menegaskan redaksi sebelumnya, CNNIndonesia.com memberikan pernyataan “...hal itu dilihat murni dalam artian mereka sendiri, di mana merasa hanya kelompoknya saja yang Islamnya paling benar”

Diagnose Causes. Penyebab masalah dalam berita ini adalah kelompok wahabi dianggap sebagai pemecah belah umat dan dinilai sebagai cikal bakal adanya radikalisme dan terorisme. Hal ini dapat dilihat pada paragraf:

“LD PBNU berpandangan kelompok yang mengikuti paham wahabi kerap menuding bid'ah hingga mengafirkan tradisi keagamaan yang dilakukan mayoritas umat Islam di Indonesia. Sehingga, pihaknya melihat masyarakat Islam di akar rumput kerap kali terjadi perdebatan”

“Tak hanya itu, LD PBNU juga menilai paham wahabi ditengarai sebagai embrio munculnya paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme”

CNNIndonesia.com menyorot berita tersebut dengan menjadikan kelompok wahabi sebagai aktor penyebab masalah karena kelompok tersebut sering menuding bid'ah hingga mengafirkan tradisi keagamaan. Hal ini dipertegas melalui bunyi rekomendasi tersebut yakni:

"Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan terjadi gesekan sosial, saling fitnah yang berakibat pada perpecahan, konflik sosial, munculnya kelompok yang menolak Pancasila dan NKRI, serta potensi kekerasan dan terorisme,"

CNNIndonesia berusaha mengungkapkan permintaan LDNU mengenai larangan kegiatan HijrahFest dengan menambahkan sub judul yaitu “Minta Tak Izinkan HijrahFest. Penyebab masalah dari adanya larangan HijrahFest adalah kegiatan yang terindikasi adanya tujuan untuk menolak NKRI dan pancasila. Namun sejauh ini, pihak CNNIndonesia.com ingin mengetahui lebih lanjut terkait HijrahFest belum mendapatkan respon dari pihak penyelenggara.

Untuk mendukung adanya larangan HijrahFest, CNNIndonesia memberikan redaksi dengan mencantumkan narasumber dari Sekretaris PWNU Jatim Akh Muzakki menyatakan penolakan HijrahFest terjadi karena telah mencatut logo NU tanpa izin. Hal ini dapat dilihat pada paragraf terakhir yakni:

“Sekretaris PWNU Jatim Akh Muzakki mengatakan penolakan itu lantaran penyelenggara telah mencatut logo NU tanpa izin”

Make Moral Judgement. CNNIndonesia.com memberikan penilaian moral terhadap berita ini adalah bahwa kegiatan HijrahFest batal dilaksanakan karena penyelenggara diduga termasuk dalam bagian kelompok terlarang. Untuk memperkuat pendapat, CNNIndonesia menghadirkan narasumber Akh Muzakki dengan redaksi sebagai berikut:

“.....Muzakki juga menilai penolakan itu juga karena acara Hijrahfest digelar oleh beberapa orang yang diduga merupakan bagian kelompok terlarang dan berseberangan dengan ideologi negara”

Treatment Recommendation. Pemilihan penyelesaian yang dilakukan CNNIndonesia.com terhadap berita ini yakni menjelaskan penyebaran paham wahabi jika tetap dibiarkan menimbulkan perpecahan dan perdebatan. Hal ini mengutip kalimat langsung dari rekomendasi LDNU yang terdapat dalam kalimat:

"Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan terjadi gesekan sosial, saling fitnah yang berakibat pada perpecahan, konflik sosial, munculnya kelompok yang menolak Pancasila dan NKRI, serta potensi kekerasan dan terorisme,"

5. Analisis Framing Berita “PBNU Klarifikasi Soal Larang Wahabi Yang Beredar di Timur Tengah”

Berita kelima menjelaskan tentang klarifikasi PBNU mengenai regulasi pelarangan wahabi yang dimaksud dalam rekomendasi LDNU. CNNIndonesia.com menyebutkan rekomendasi LDNU belum menjadi keputusan PBNU karena sifatnya masih internal. Dalam pemberitaan CNNIndonesia.com memberikan jawaban dari Ketua PBNU, Ahmad Fahrurrozi (Gus Fahrur). CNNIndonesia.com mengutip narasumber dari lembaga tersebut yang membuktikan bahwa permasalahan itu berdasarkan fakta.

Pemberitaan ini menyorot pernyataan PBNU tentang wahabi takfiri, namun dalam pernyataan lain disebutkan bahwa tidak semua wahabi berpaham radikal. Maka dapat diketahui bahwa CNNIndonesia.com mencoba meluruskan pernyataan PBNU terkait permasalahan tersebut. Adapun rincian analisis berita kelima sebagai berikut:

Tabel 10 Analisis Framing Berita “PBNU Klarifikasi Soal Larang Wahabi Yang Beredar di Timur Tengah”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Pelurusan PBNU tentang larangan wahabi takfiri yang kerap dijadikan ideologi ISIS
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Tidak semua wahabi berpaham radikal
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Seharusnya keputusan LD PBNU tidak menjadi keputusan PBNU karena bersifat rekomendasi internal
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Aktif membawa misi Islam Aswaja yang ramah dan rahmatan lil alamiin.

Define Problems dari pemberitaan CNNIndonesia.com disebutkan bahwa PBNU mengklarifikasi pelarangan wahabi yang dimaksud adalah wahabi takfiri yang kerap dijadika ideologi ISIS. Dalam redaksinya, CNNIndonesia.com menjelaskan arti takfiri disini sebagai paham yang mengkafirkan muslim beda paham dan menghalalkan darah semua musuhnya. Hal ini berdasarkan kalimat langsung dari narasumber:

"Ya mungkin ini perlu sedikit kita luruskan, bahwa yang dimaksud adalah paham Wahabi takfiri yang beredar dari Timur Tengah dan menjadi ideologi kekerasan ISIS, yang mengkafirkan muslim beda paham dan menghalalkan darah semua yang menjadi musuhnya,"

Diagnose Causes. Penyebab masalah dalam berita ini adalah tidak semua wahabi berpaham radikal. CNNIndonesia.com,berusaha menjelaskan dengan mengutip pendapat dari Gus Fahrur yang menyatakan terdapat wahabi yang moderat dan mampu menjalin interaksi yang baik terhadap kelompok lainnya. Hal ini dapat dilihat dari paragraf selanjutnya:

"Gus Fahrur mengatakan tidak semua Wahabi berpaham radikal. Ada pula paham Wahabi yang moderat dan mampu menjalin kerja sama baik dengan kelompok lainnya"

CNNIndonesia,com mengutip pernyataan Gus Fahrur sebagai Ketua PBNU,

Make Moral Judgement. Penilaian moral yang diberikan CNNIndonesia.com dalam pemberitaan tersebut dapat dilihat dari kalimat langsung Gus Fahrur bahwa keputusan LD PBNU tidak seharusnya menjadi keputusan pusat (PBNU) karena masih bersifat rekomendasi internal. Hal ini terdapat kalimat:

"Keputusan LD PBNU tidak serta merta menjadi keputusan PBNU karena sifatnya hanya rekomendasi ke dalam, dan seharusnya tidak untuk di publikasikan sebelum mendapat persetujuan Ketum PBNU,"

CNNIndonesia.com berusaha menjelaskan kesalahpahaman antara LD PBNU dan PBNU terkait rekomendasi larangan wahabi, sehingga dalam redaksi selanjutnya menjelaskan langkah Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf dalam mengemban misi keagamaan. Hal ini sekaligus menjadi bagian aspek ke empat, Treatment Recommendation.

Treatment Recommendation pada pemberitaan ini yakni aktif membawa misi Islam Aswaja yang ramah dan rahmatan lil alamin. Hal ini merupakan langkah Yahya Cholil Staquf untuk menebarkan Islam yang damai. Dalam redaksinya, CNNIndonesia berusaha menjelaskan tujuan adanya misi tersebut yakni untuk menjadikan Islam yang memuliakan manusia sebagai sederajat, memiliki hak sama dan harus dihargai dan dihormati, baik sesama Muslim maupun tidak.

Selanjutnya, CNNIndonesia.com memberikan pernyataan bahwa Gus Yahya tetap menekankan pemikiran agama Islam sebagai agama damai. Hal ini dipertegas dalam kalimat langsung narasumber, yakni:

"Dunia harus membangun konsensus atas nilai-nilai yang perlu disepakati agar semua pihak yang berbeda-beda dapat hidup berdampingan secara damai. Termasuk dalam menyikapi perbedaan paham dengan Wahabi,"

6. Analisis Framing Berita “PBNU: Tak Ada Persetujuan Ketum & Rais Aam Soal Larangan Wahabi di RI”

Pada pemberitaan ini, CNNIndonesia.com menyorot kesalahpahaman antara LDNU dan PBNU terkait rilis rekomendasi pelarangan wahabi. CNNIndonesia.com menilai permasalahan tersebut sebagai murni kelalaian dan kurangnya komunikasi lembaga tersebut, sehingga dalam redaksinya

CNNIndonesia.com memberikan pernyataan langsung dari Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf. Untuk memperkuat penonjolan tersebut, CNNIndonesia.com menyertakan surat keputusan resmi yang ditanda tangani Yahya Yahya Cholil Staquf dan Saifullah Yusuf. Media ini juga menyertakan informasi sekilas mengenai LDNU dan hasil rekomendasi Rakernas di Asrama Haji. Berikut rincian analisis berita keenam:

Tabel 11 Analisis Framing Berita “PBNU: Tak Ada Persetujuan Ketum & Rais Aam Soal Larangan Wahabi di RI”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Penegasan PBNU terkait rekomendasi pelarangan wahabi belum disetujui
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Adanya rilis LD PBNU yang tidak pernah dikonsultasikan dengan PBNU
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Masalah penting seharusnya dikonsultasikan sebelum dirilis
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Semua keputusan musyawarah harus dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan.

Define Problems pada pemberitaan diatas adalah penegasan PBNU terkait rekomendasi larangan wahabi belum ada persetujuan dari Ketua Umum dan Rais Aam. Pada aspek ini, CNNIndonesia.com mencoba menjelaskan bahwa permasalahan tersebut terjadi karena belum dikonsultasikan dan belum disetujui sehingga terjadi kesalahpahaman. CNNIndonesia.com mengutip narasumber dari Sekretaris Jenderal PBNU. Hal ini dapat diketahui dari *lead* berita, yakni:

“Sekretaris Jendral PBNU Saifullah Yusuf menegaskan rilis hasil rekomendasi Lembaga Dakwah PBNU soal permintaan pemerintah melarang paham Wahabi belum dikonsultasikan dan disetujui oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar maupun Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf”

Diagnose Causes. Penyebab masalah pada pemberitaan diatas disebabkan karena kesalahan LDNU dalam mempublikasi permintaan rekomendasi yang belum dikonsultasikan dan disetujui. Hal ini ditegaskan oleh Saifullah Yusuf menyatakan rilis tersebut tidak resmi. Hal ini berdasarkan kutipan langsung dari Saifullah, yaitu:

"Rilis LDNU kontra produktif dan tidak pernah dikonsultasikan dengan PBNU khususnya kepada Rais Aam dan Ketua Umum. Masalah sepenting ini mereka tidak konsultasi dan tidak memberitahukan,"

CNNIndonesia.com menyorot berita tersebut sebagai murni kelalaian LDNU dalam memberikan keputusan yang seharusnya rekomendasi tersebut menjadi masukan internal justru menjadi informasi publik. Dalam redaksinya, CNNIndonesia menyorot aktor yang terjadi pada masalah yakni LDNU yang melibatkan PBNU untuk menurunkan instruksi.

Make Moral Judgement. Penilaian moral pada pemberitaan tersebut, CNNIndonesia berusaha mengungkapkan adanya saran bahwa masalah penting seharusnya dikonsultasikan dan memberitahukan rekomendasi internal kepada PBNU agar ditindaklanjuti. Hal ini dapat dilihat pada redaksi:

".....Masalah sepenting ini mereka tidak konsultasi dan tidak memberitahukan,"

Untuk memberikan penilaian moral terhadap penyebab masalah, CNNIndonesia.com mengungkapkan adanya instruksi keputusan bernomor 225/PB.03/A.I.03.41/99/10/2022 yang ditandatangani Yahya Cholil Staquf dan Saifullah Yusuf. Keputusan tersebut salah satunya berisi poin yang tidak diperbolehkan memberikan pernyataan yang bersifat strategis apalagi urusan agama sebelum mendapatkan persetujuan. Hal ini dapat dipahami pada paragraf:

"Instruksi PBNU ini memiliki beberapa poin. Di antaranya menginstruksikan untuk tidak memberikan pernyataan yang bersifat strategis lebih-lebih urusan agama sebelum mendapatkan persetujuan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU"

Treatment Recommendation. CNNIndonesia.com memberikan penyelesaian terhadap berita tersebut dengan memberikan pernyataan semua hasil permusawaratan yang dikeluarkan lembaga NU, harus dilaporkan kepada PBNU termasuk kepada Ketua Umum dan Rais Aam untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini dipertegas dengan kalimat langsung dari narasumber:

"Jika ada lembaga yang merilis sesuatu sebelum mendapatkan persetujuan PBNU, maka rilis itu dapat diabaikan karena bukan menjadi keputusan resmi perkumpulan,"

7. Analisis Framing Berita “Ketum PBNU Gus Yahya: Larangan Paham Wahabi Belum Resmi”

Berita ketujuh menjelaskan pernyataan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Ketua Umum PBNU mengenai pelarangan wahabi. CNNIndonesia.com menyorot pemberitaan terhadap permasalahan larangan wahabi yang belum resmi. Hal ini dijelaskan CNNIndonesia.com dalam redaksinya melalui kutipan langsung dari Gus Yahya yang menjelaskan bahwa tak menolak perbedaan antar kelompok agama harus didiskusikan agar tidak menimbulkan perpecahan. Adapun rincian analisisnya sebagai berikut:

Tabel 12 Analisis Framing Berita “Ketum PBNU Gus Yahya: Larangan Paham Wahabi Belum Resmi”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Rekomendasi pelarangan wahabi dianggap belum resmi dari ormas NU
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Rilis LD PBNU tentang rekomendasi di nilai bukan dari PBNU
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Perbedaan pendapat antar kelompok agama harus didiskusikan secara bersama
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Wahabi akan menjadi bahasan topik oleh paraa tokoh agama di forum R20

Define Problems dari pemberitaan diatas adalah pernyataan sah .PBNU terkait rilis hasil rekomendasi permintaan larangan wahabi yang dianggap belum resmi. CNNIndonesia.com memberikan pernyataan dengan mencantumkan narasumber Gus Yahya, untuk memberikan pernyataan terkait hasil rekomendasi tersebut. Hal itu dapat dipahami melalui kutipan langsung narasumber:

"Itu kan pembicaraan di antara mereka yang belum resmi karena bukan dari PBNU,"

Diagnose Causes. Penyebab masalah pada pemberitaan yakni disebabkan oleh rilis LDNU terkait hasil rekomendasi yang dinilai belum mendapatkan persetujuan. Pada aspek ini, CNNIndonesia.com menyorot sikap Gus Yahya dalam memberikan

pernyataan terkait hasil rekomendasi tersebut, nampaknya CNNIndonesia.com lebih memberikan peringatan kepada pembaca untuk memahami bahwa PBNU tegas dengan adanya keputusan hasil rekomendasi yang belum resmi dari ormas tersebut. Hal ini dapat dipahami dari *lead* berita yakni:

“Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staqif atau Gus Yahya menegaskan rilis hasil rekomendasi Lembaga Dakwah PBNU soal permintaan pemerintah melarang paham Wahabi belum resmi sikap dari ormas Islam tersebut.”

Make Moral Judgement. Penilaian moral yang diputuskan oleh CNNIndonesia adalah menyiratkan bahwa segala perbedaan antar kelompok agama seharusnya tidak memunculkan adanya pertentangan. CNNIndonesia.com memberikan penjelasan lain bahwa perbedaan antar kelompok agama harus didiskusikan secara bersama. Hal ini ditegaskan dalam kutipan selanjutnya:

“Perbedaan-perbedaan dari kelompok-kelompok agama itu, bagaimana semua ini tidak menyulut pertentangan, tetapi kita bisa menyepakati sesuatu yang bisa kita usung bersama,”

Treatment Recommendation. Penyelesaian yang ditekankan CNNIndonesia pada berita menyebutkan bahwa wahabi akan menjadi bahasan topik oleh para tokoh agama pada forum R20. Dalam redaksinya, CNNIndonesia menganggap kemungkinan paham wahabi menjadi bahasan para tokoh agama, sekte dan aliran kepercayaan. Hal ini disebutkan dalam redaksi:

“Gus Yahya membuka kemungkinan paham wahabi menjadi salah satu yang dibahas oleh para tokoh agama, sekte dan aliran kepercayaan dari berbagai dunia di forum R20”

C. Analisis Framing Berita Pelarangan Wahabi di Detik.com

Dari sejumlah 23 berita yang diproduksi Detik.com mengenai wahabi, terdapat 12 tentang pelarangan wahabi, peneliti mengambil tujuh berita sebagai objek penelitian. Adapun berita tersebut antara lain:

Tabel 13 Analisis Framing Berita Pelarangan Wahabi di Detik.com

No	Tanggal Berita	Judul Berita
----	----------------	--------------

1.	Jumat, 28 Oktober 2022	Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi-HijrahFest
2.	Minggu, 30 Oktober 2022	Penjelasan PBNU Soal Usulan Agar Pemerintah Larang Wahabi Takfiri
3.	Senin, 31 Oktober 2022	Din Syamsuddin Soal Usulan LD PBNU Larang Wahabi Takfiri: Kedepankan Toleransi
4.	Senin, 31 Oktober 2022	Wasekjen: Usulan Ke Pemerintah Larang Wahabi Takfiri Belum Resmi dari PBNU
5.	Selasa, 01 November 2022	PBNU Anulir Rilis LDNU Soal Wahabi: Tak Ada Persetujuan Rais Aam-Ketum
6.	Selasa, 01 November 2022	Respons Ansor Jatim Soal Larangan Wahabi di Indonesia
7.	Selasa, 01 November 2022	PWNU Jatim Sentil Kekompakan PBNU Soal Gaduh Larangan Wahabi Takfiri

1. Analisis Framing Berita “Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi-HijrahFest”

Pemberitaan pertama Detik.com menyorot pernyataan PBNU melarang wahabi dan kegiatan HijrahFest. Isi pemberitaan Detik.com menjelaskan hasil rekomendasi Rakernas LDNU pada 25-27 Oktober 2022 di Asrama Haji. Detik.com juga menilai bahwa HijrahFest diduga menjadi kegiatan yang menolak NKRI dan HijrahFest. Dalam redaksinya, Detik.com setuju dengan pernyataan wahabi yang kerap menuding bid'ah dan pengkafiran. Dalam pemberitaan ini Detik.com hanya mengutip dari bunyi rekomendasi yang dirilis melalui website resmi PBNU, sehingga dapat disimpulkan pemberitaan ini pro terhadap LDNU. Adapun rincian analisisnya sebagai berikut:

Tabel 14 Analisis Framing Berita “Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi-HijrahFest”

Aspek	Temuan
-------	--------

<i>Define problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Rekomendasi LD PBNU dalam rakernas tentang larangan wahabi dan HijrahFest
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Paham wahabi dinilai kerap melontarkan tuduhan bid'ah dan pengkafiran
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Wahabi memicu perpecahan antar umat beragama
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Paham wahabi harus segera diatasi untuk kepentingan masyarakat

Define Problems. Pendefinisian masalah pada pemberitaan diatas adalah permintaan LDNU untuk membentuk dan menetapkan regulasi pelarangan wahabi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan larangan kegiatan HijrahFest. Detik.com dalam redaksinya memberikan penjelasan mengenai musyawarah yang menghasilkan sejumlah rekomendasi internal dan eksternal. Hal ini disampaikan Detik.com dalam paragraf:

“Rekomendasi ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX LD PBNU pada 25-27 Oktober 2022 di UPT Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Rakernas ini menghasilkan sejumlah rekomendasi internal dan eksternal NU. Salah satu poin rekomendasinya adalah melarang penyebaran paham Wahabi”

Kemudian, Detik.com berusaha mengungkapkan rekomendasi LDNU tentang larangan kegiatan yang bertujuan menolak NKRI dan Pancasila seperti HijrahFest atau HijabFest. Hal ini diperkuat melalui bunyi rekomendasi tersebut, yakni:

"Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mewaspadaai dan tidak memberikan izin penyelenggaraan kegiatan/event yang bertujuan untuk menolak NKRI dan Pancasila yang dibalut dengan penyelenggaraan kegiatan festival keagamaan ala milenial yang menarik minat generasi muda, seperti HijrahFest atau HijabFest,"

Pada pemberitaan ini, Detik.com lebih menyoroti kronologi atau isi dari Rakernas terhadap dua masalah yakni larangan wahabi dan larangan kegiatan HijrahFest.

Diagnose Causes. Penyebab masalah pada pemberitaan tersebut bahwa Detik.com menilai paham wahabi dinilai menimbulkan perdebatan karena dianggap

kerap melontarkan tudingan bid'ah dan pengkafiran. Hal ini ditegaskan dalam redaksi:

“Bahwa pada masyarakat muslim akar rumput kerap terjadi perdebatan, tudingan bid'ah, bahkan pengkafiran atas tradisi keagamaan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam...”

Dalam redaksinya, Detik.com juga menganggap paham wahabi berpotensi mengarah ke Tindakan terorisme. Hal ini dapat dilihat pada kalimat:

“...Selain itu, paham ini dianggap berpotensi mengarah ke terorisme”

Make Moral Judgement. Dalam pemberitaan Detik.com ini wahabi dianggap sebagai paham yang dapat memicu adanya perpecahan, dan jika hal ini terus dibiarkan dikhawatirkan terjadi gesekan sosial. Hal ini sesuai dengan kalimat:

"Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan terjadi gesekan sosial, saling fitnah yang berakibat pada perpecahan, konflik sosial, munculnya kelompok yang menolak Pancasila dan NKRI, serta potensi kekerasan dan terorisme,"

Pada aspek ketiga ini, dapat dikatakan sama dengan *diagnose causes* diatas, hanya saja untuk memperkuat argumen sebelumnya, Detik.com mempertimbangkan menambahkan beberapa diksi yang ditonjolkan yakni perpecahan, gesekan sosial dan terorisme.

Treatment Recommendation. Penyelesaian yang ditawarkan oleh Detik.com dalam pemberitaan ini yakni paham wahabi jika tetap dibiarkan akan menimbulkan perpecahan sehingga perlu diatasi untuk kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dipahami di paragraf terakhir:

"Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan terjadi gesekan sosial, saling fitnah yang berakibat pada perpecahan, konflik sosial, munculnya kelompok yang menolak Pancasila dan NKRI, serta potensi kekerasan dan terorisme,"

2. Analisis Framing Berita “Penjelasan PBNU Soal Usulan Agar Pemerintah Larang Wahabi Takfiri”

Berita kedua menjelaskan pernyataan PBNU mengenai usulan larangan wahabi. Detik.com berusaha menjelaskan wahabi yang dimaksud dalam usulan

tersebut adalah wahabi yang sering mengkafirkan sesama muslim dan sering berdebat permasalahan agama. Narasumber yang diambil dalam pemberitaan ini berasal dari NU, yakni KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur). Detik.com juga mencoba menjelaskan HijrahFest. Namun penjelasan selanjutnya, Detik.com menyantumkan ketidakpahaman Gus Fahrur sehingga dalam hal ini Detik.com disimpulkan bahwa pelarangan wahabi dan HijrahFest menjadi kebenaran sepihak. Namun terlepas dari itu, Detik.com mengungkapkan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah sepakat dakwah ahlusunnah waljama'ah yang moderat.

Untuk memperkuat argumentasi, Detik.com memberikan sub judul dibawahnya yaitu “Lembaga Dakwah PBNU Usulkan Pemerintah Larang Paham Wahabi”. Dalam pemberitaan ini, wahabi diartikan sebagai paham yang kerap menimbulkan perpecahan. Dalam redaksinya, Detik.com menjelaskan hasil rekomendasi serta pelarangan HijrahFest. Maka dapat diketahui, pemberitaan tersebut cenderung pada *frame* agama. Adapun rincian analisisnya sebagai berikut:

Tabel 15 Analisis Framing Berita “Penjelasan PBNU Soal Usulan Agar Pemerintah Larang Wahabi Takfiri”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i> (Pendefinisian Masalah)	PBNU klarifikasi usulan larangan wahabi yang dimaksud adalah salafi takfiri
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Tidak semua wahabi takfiri
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Wahabi paham intoleran dan kerap mengharamkan tradisi rakyat
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Masyarakat harus hidup rukun dengan menghormati dan menghargai perbedaan

Define Problems. Pendefinisian masalah pada pemberitaan ini mengenai penjelasan PBNU mengenai usulan agar pemerintah larang wahabi takfiri. Pemberitaan Detik.com ini lebih menyorot tentang klarifikasi PBNU mengenai permasalahan wahabi yang menjadi perdebatan. Hal ini ditegaskan Detik.com dalam redaksinya di lead berita, yaitu:

“...PBNU menjelaskan penganut paham wahabi takfiri sering mengkafirkan sesama muslim meski berbeda pendapat keagamaan”

Detik.com berusaha menjelaskan paham wahabi yang dimaksud oleh PBNU pada rilis rekomendasi sebelumnya. Takfiri disini dianggap sebagai paham yang sering menuding kafir sesama muslim yang berbeda pendapat keagamaan. Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan narasumber, yakni Gus Fahrur yang ikut menambahkan pemahaman wahabi seperti yang dianut mayoritas ISIS.

“Yang dimaksud adalah paham salafi takfiri, yang mengkafirkan sesama muslim karena beda pendapat keagamaan sebagaimana yang diyakini oleh penganut aliran garis keras ISIS”

Redaksi lainnya Detik.com juga menyebutkan paham wahabi takfiri adalah paham intoleran dan mengharamkan tradisi masyarakat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kalimat:

“...paham wahabi takfiri merupakan paham intoleran, misalnya yang mengharamkan tradisi seperti ziarah kubur”

Diagnose Causes. Penyebab masalah dalam pemberitaan Detik.com diketahui karena tidak semua wahabi berpaham takfiri yang sering mengkafirkan sesama muslim seperti penganut aliran keras ISIS. Detik.com memberikan penjelasan lengkap mengenai wahabi takfiri yang digambarkan sebagai paham intoleran, suka mengharamkan tradisi serta mengklaim dirinya paling benar. Hal ini dapat dipahami di beberapa kalimat, yaitu:

“...Tidak semua Wahabi Takfiri, hanya sebagian saja”

“...paham wahabi takfiri merupakan paham intoleran, misalnya yang mengharamkan tradisi seperti ziarah kubur”

“Yang sering menyebar paham intoleran, suka mengharamkan amaliah masyarakat tradisional seperti ziarah kubur, tahillan, maulid dan lain-lain. Mengklaim paling benar dan menjadi hakim kebenaran bagi orang lain”

Make Moral Judgement. Penilaian moral yang diambil dari pemberitaan adalah paham wahabi yang dianggap intoleran dan kerap mengharamkan tradisi keagamaan mayoritas umat Islam. Hal ini sebagaimana tercantum dalam redaksi:

“Yang sering menyebar paham intoleran, suka mengharamkan amaliah masyarakat tradisional seperti ziarah kubur, tahillan, maulid dan lain-lain”

Detik.com dalam redaksinya juga memberikan kebenaran PBNU yang menginginkan dakwah Islam yang dilakukan secara moderat dan toleran tanpa kekerasan. Penilaian moral yang diambil dari Detik.com adalah keinginan dakwah Islam yang dilakukan dengan jalan perdamaian. Hal ini dapat dipahami dalam kalimat:

“...PBNU pada prinsipnya ingin ada dakwah Islam yang moderat dan toleran tanpa kekerasan”

Treatment Recommendation pada pemberitaan Detik.com adalah masyarakat harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain meskipun berbeda pandangan keagamaan agar terhindar terjadi perpecahan. Dapat dipahami melalui beberapa kalimat berikut:

“...masyarakat diimbau untuk saling menghormati agar tidak terjadi perpecahan”

Detik.com juga mencoba mengungkapkan dakwah yang telah dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah sebagai klaim dakwah yang moderat, toleran tanpa kekerasan. Hal ini tercantum dalam kutipan langsung narasumber:

“...Yang jelas kita ingin melakukan dakwah Islam wasyathiyah, moderat dan toleran tanpa kekerasan dan menegakkan NKRI, seperti yang telah dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah selama ini”

Kemudian Detik.com menambahkan redaksi lanjutan ke paragraf selanjutnya untuk mendukung solusi yang ditawarkan, yakni:

“.....ormas Islam yang ada di Indonesia seperti PBNU dan Muhammadiyah bersepakat dakwah ahlusunah waljama'ah yang moderat, saling menghargai dan menghormati satu sama lain meskipun beda pandangan keagamaan dalam beberapa hal”

3. Analisis Framing Berita “Din Syamsuddin Soal Usulan LD PBNU Larang Wahabi Takfiri: Kedepankan Toleransi”

Pada pemberitaan ini, Detik.com menyorot pendapat dari Din Syamsuddin, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Detik.com dalam redaksinya menilai bahwa kegaduhan mengenai pelarangan wahabi harus mengedepankan toleransi. Dalam pernyataannya, Detik.com mengungkapkan bahwa pemerintah seharusnya tidak terlibat dalam urusan perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat.

Pemberitaan Detik.com ini cenderung lebih kontra dengan langkah PBNU mengenai larangan wahabi yang harus diselesaikan dengan jalan perdamaian. Hal ini dilihat dari pencantuman narasumber dari Muhammadiyah serta untuk pendukung adanya penonjolan, Detik.com menambahkan penjelasan awal pelarangan wahabi pada Rakernas. Berikut rincian analisis berita ketiga:

Tabel 16 Analisis Framing Berita “Din Syamsuddin Soal Usulan LD PBNU Larang Wahabi Takfiri: Kedepankan Toleransi”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Respon terhadap rekomendasi larangan wahabi yang seharusnya mengutamakan toleransi
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pro dan kontra di masyarakat tentang pemahaman wahabi
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Mengutamakan musyawarah tanpa muncul sikap memutlakan pemahaman
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Pemerintah tidak ikut terlibat dalam penanganan perbedaan di kalangan umat

Define Problems pada pemberitaan Detik.com diatas adalah lebih mengungkapkan respon Din Syamsuddin sebagai Mantan Ketua Umum PP Muhamadiyah dalam menanggapi hasil rekomendasi pelarangan wahabi dari LDNU. Dalam redaksinya, Detik.com menilai permasalahan tersebut harus mengedepankan toleransi dengan mencari jalan tengah. Hal ini dipertegas dengan pernyataan narasumber:

"....seharusnya kita mengedepankan sikap sifat dan watak wasathiyah atau jalan tengah. Mengedepankan toleransi sebagai salah satu aspek wasathiyah yaitu tasamuh atau toleransi..."

Diagnose Causes. Permasalahan dalam berita disebabkan karena pro dan kontra di masyarakat mengenai rekomendasi pelarangan wahabi yang dianggap sebagai pemutlakan pemahaman dan penyalahan satu pihak. Dapat dilihat dari redaksi:

“....Jadi sebaiknya jangan ada sikap yang memutlakkan pemahaman, apalagi menyalahkan pihak lain dan apalagi membawa negara untuk terlibat....”

Make Moral Judgement. Penilaian moral yang dipilih Detik.com pada pemberitaan diatas yakni menggunakan jalan musyawarah untuk mengedepankan toleransi tanpa adanya menyalahkan pihak lain. Hal ini tercantum pada kalimat:

“....sikap bermusyawarah lebih baik dibanding menyalahkan pihak lain”

Pada redaksi selanjutnya, Detik.com mengungkapkan sikap menyalahkan dan memutlakan justru merupakan salah satu bentuk ekstremitas dalam beragama

“....sikap menyalahkan dan memutlakkan pemahaman merupakan bentuk ekstremitas dalam beragama”

Treatment Recommendation. Penyelesaian yang ditekankan Detik.com pada pemberitaan diatas bahwa pemerintah diharapkan tidak terlibat dalam urusan perbedaan pemahaman di kalangan umat beragama.

“.....pemerintah sebaiknya jangan terlibat dalam menangani perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat atau umat beragama”

4. Analisis Framing Berita “Wasekjen: Usulan Ke Pemerintah Larang Wahabi Takfiri Belum Resmi dari PBNU”

Berita keempat Detik.com mencoba menjelaskan usulan LDNU terkait pelarangan wahabi. Berita ini sama pembahasannya dengan berita sebelumnya yakni mengambil narasumber dari lembaga tersebut. Dalam redaksinya, Detik.com menyorot kebijakan strategis yang berlaku di lembaga NU. Berdasarkan judulnya, Detik.com mencoba menjelaskan kebijakan yang diambil PBNU mengenai larangan wahabi, hal ini dikuatkan dengan penambahan sub judul dibawahnya dengan judul “Lembaga Dakwah PBNU Usulkan Pemerintah Larang Wahabi”. Isi pemberitaan ini hamper sepenuhnya sama dengan berita sebelumnya dan menampilkan kutipan langsung dari bunyi rekomendasi tersebut. Adapun rincian analisisnya sebagai berikut:

Tabel 17 Analisis Framing Berita “Wasekjen: Usulan Ke Pemerintah Larang Wahabi Takfiri Belum Resmi dari PBNU”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i> (Pendefinisian Masalah)	PBNU sebut rekomendasi larangan wahabi belum resmi
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Keputusan belum diratifikasi
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Semua keputusan melalui tahap mekanisme
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	PBNU tidak mengeluarkan surat rekomendasi eksternal kepada pemerintah

Define Problems pada pemberitaan diatas yakni ungkapan PBNU yang menyatakan usulan rekomendasi pelarangan wahabi belum resmi. Detik.com memberikan pernyataan dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU yang menjelaskan bahwa hal tersebut karena belum diratifikasi sehingga usulan dinyatakan belum resmi. Dapat dipahami pada redaksi:

“.....Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan rekomendasi yang belum diratifikasi dalam rapat PBNU dianggap belum resmi”

Diagnose Causes. Masalah pemberitaan tersebut disebabkan keputusan hasil rekomendasi yang belum disetujui karena semua keputusan dan kebijakan ada mekanismenya di dalam PBNU. Hal ini diperjelas dalam kalimat:

“.....Adapun mekanismenya adalah melalui rapat gabungan pengurus harian dan kemudian ditindaklanjuti pengurus harian. Sementara itu, pengurus harian yang akan berkomunikasi dengan pihak eksternal”

Make Moral Judgement. Penilaian moral yang diberikan CNNIndonesia.com disebutkan bahwa semua kebijakan strategis di PBNU memiliki mekanisme melalui rapat gabungan pengurus harian dan ditindaklanjuti sehingga semua menjadi tanggung jawab pengurus harian. Hal ini sesuai dengan kalimat:

“....semua kebijakan strategis di PBNU ada mekanismenya. Adapun mekanismenya adalah melalui rapat gabungan pengurus harian dan kemudian ditindaklanjuti pengurus harian”

Kemudian, Detik.com memberikan penilaian moral pada redaksi selanjutnya yakni semua rekomendasi yang keluar dari lembaga, jika status masih belum diratifikasi maka belum bisa dianggap resmi. Dapat dilihat pada paragraf:

“Semua rekomendasi yang dikeluarkan lembaga, banom (badan otonom NU -red) dan yang mengatasnamakan NU sebelum diratifikasi dalam rapat PBNU belum dapat dianggap resmi”

Treatmen Recommendation. Penyelesaian yang ditawarkan Detik.com dalam pemberitaan diatas setelah adanya usulan larangan wahabi tidak mengeluarkan rekomendasi eksternal termasuk kepada pemerintah. Hal ini sesuai dengan redaksi:

“PBNU ingatkan kepada semua jajarannya baik di lembaga dan Banom NU untuk tidak mengeluarkan rekomendasi eksternal termasuk kepada pemerintah”

5. Analisis Framing Berita “PBNU Anulir Rilis LDNU Soal Wahabi: Tak Ada Persetujuan Rais Aam-Ketum”

Pemberitaan kelima Detik.com merupakan berita pendukung dari berita sebelumnya, hanya saja narasumber yang dikutip dari Sekretaris Jenderal PBNU. Dalam redaksinya, Detik.com mencoba menjelaskan permasalahan larangan wahabi yang belum mendapat persetujuan Rais Aam-Ketum. Pemberitaan ini menyorot kekeliruan LDNU dalam memahami sistem yang berlaku di PBNU, sehingga dalam pemberitannya LDNU menjadi aktor dalam permasalahan tersebut. Adapun rincian analisisnya sebagai berikut:

Tabel 18 Analisis Framing Berita “PBNU Anulir Rilis LDNU Soal Wahabi: Tak Ada Persetujuan Rais Aam-Ketum”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Rilis LD PBNU kontraproduktif dan menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Rilis LD PBNU tak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Rais Aam
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Tidak memberikan pernyataan strategis terutama urusan agama

<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Rekomendasi perlu diabaikan karena tidak resmi
--	--

Define Problems pada pemberitaan diatas, Detik.com mencoba meluruskan pernyataan LDNU tentang permintaan kepada pemerintah Indonesia untuk melarang wahabi. Dalam redaksinya Detik.com memberikan pernyataan bahwa hal tersebut dinilai kontraproduktif dan menimbulkan beragam tafsir di masyarakat. Hal ini berdasarkan pada *lead* berita, yakni:

“...pernyataan Lembaga Dakwah PBNU kontraproduktif dan menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat”

Detik.com mencantumkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf sebagai narasumber untuk mempertegas pernyataannya. Dalam redaksinya, Detik.com juga menyebutkan bahwa rekomendasi tersebut belum dikonsultasikan seperti pembahasan analisis sebelumnya, sehingga dapat memperkuat penonjolan terhadap permasalahan.

Diagnose Causes. Penyebab masalah pada pemberitaan Detik.com menyorot kesalahpahaman LD PBNU terhadap mekanisme yang berlaku dalam lembaga tersebut. Dalam redaksinya, Detik.com mengungkapkan masalah penting yang belum dikonsultasikan khususnya kepada Ketum dan Rais Aam. Hal ini dipertegas dengan adanya kutipan narasumber:

“...tidak pernah dikonsultasikan dengan PBNU khususnya kepada Rais Aam dan Ketua Umum. Masalah sepenting ini mereka tidak konsultasi dan tidak memberitahukan”

Make Moral Judgement. Penilaian Moral yang diberikan Detik.com terhadap permasalahan adalah dengan mengeluarkan instruksi 225/PB.03/A.I.03.41/99/10/2022 yang ditandatangani Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf dan Sekjen Saifullah Yusuf. Instruksi tersebut berisi tidak memberikan pernyataan yang bersifat strategis terutama urusan agama sebelum mendapat persetujuan. Kemudian redaksi selanjutnya, Detik.com menyatakan bahwa seluruh hasil musyawarah harus dilaporkan untuk mendapat persetujuan. Hal ini berdasarkan paragraf:

“Seluruh hasil permusyawaratan yang dikeluarkan oleh lembaga, badan khusus maupun badan otonom harus dilaporkan kepada PBNU dalam hal ini Rais Aam dan Ketua Umum PBNU untuk mendapatkan persetujuan”

Treatment Recommendation. Penyelesaian yang diberikan Detik.com dalam redaksinya bahwa lembaga yang belum mendapatkan persetujuan PBNU maka perlu diabaikan. Dapat dilihat dalam kalimat:

“.....pernyataan lembaga belum mendapatkan persetujuan PBNU, maka perlu diabaikan karena bukan keputusan resmi perkumpulan”

Dalam pemberitaan tersebut, Detik.com menilai bahwa Rilis LDNU tidak dianggap sah karena belum dikonsultasi dan dilaporkan khususnya kepada Ketum dan Rais Aam. Detik.com menyebutkan instruksi yang dikeluarkan PBNU yang berisi tidak memberikan pernyataan strategis khususnya urusan agama. Pada pemberitaan ini, Detik.com tegas memberikan pernyataan rilis LDNU yang belum resmi dengan memperkuat pernyataan dari Sekjen PBNU serta instruksi PBNU yang telah ditandatangani langsung oleh Ketum dan Sekjen PBNU. Kemudian Detik.com sengaja memberikan penjelasan dibawah berita tersebut dengan sub judul “LDNU Larang Penyebaran Paham Wahabi” sebagai informasi tambahan untuk memberikan tanda penonjolan.

6. Analisis Framing Berita “Respons Ansor Jatim Soal Larangan Wahabi di Indonesia”

Pemberitaan keenam Detik.com mencoba menjelaskan pernyataan Ansor Jatim mengenai larangan wahabi yang menjadi kegaduhan. Detik.com mencoba mengkaitkan larangan tersebut dengan jawaban narasumber GP Ansor Jatim, M. Fawait. Dari keseluruhan pemberitaan, dari judul hingga isi Detik.com menjabarkan kesediaan GP Ansor jika rekomendasi tersebut disahkan, sehingga dapat disimpulkan pemberitaan ini mendukung dengan usulan LDNU. Hal ini juga diperkuat dengan beberapa pernyataan Detik.com mengenai sejarah penyebaran Islam yang dilakukan secara damai. Adapun rincian analisisnya sebagai berikut:

Tabel 19 Analisis Framing Berita “Respons Ansor Jatim Soal Larangan Wahabi di Indonesia”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i> (Pendefinisian Masalah)	PW GP Ansor Jatim siap menjalankan instruksi apapun dari PBNU
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Ajaran wahabi takfiri selama ini banyak dinilai bertentangan
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Tetap terdepan melindungi NKRI
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Islam menjejakkan nilai yang baik dan menghargai satu sama lain

Define Problems pada pemberitaan Detik.com adalah tanggapan Ansor (Pemuda NU) mengenai usulan rekomendasi larangan wahabi. Pada kalimat pertama berita, Detik.com mencoba menjelaskan permasalahan mengenai rekomendasi larangan wahabi. Detik.com menilai masalah ini merupakan desakan LDNU untuk membentuk dan menetapkan penyebaran wahabi di Indonesia. Hal ini berdasarkan pada kalimat berita:

“Lembaga Dakwah PBNU atau LDNU mendesak pemerintah agar melarang penyebaran paham Wahabi”

Namun pernyataan tersebut menimbulkan respon dari Sekjen PBNU yang mengatakan bahwa rilis tersebut tidak resmi. Namun sisi lain dari pemberitaan, Detik.com menyorot tanggapan dari Ansor Jatim mengenai usul dari LDNU tersebut.

Detik.com mengutip dari Ansor Jatim, M. Fawait sebagai narasumber untuk menguatkan argumentasinya terkait larangan wahabi. Di dalam redaksinya, Detik.com memberikan pengakuan bahwa GP Ansor Jatim siap menjalankan instruksi apapun dari PBNU. Hal ini dapat dilihat dari kalimat:

“.....PW GP Ansor Jatim mengaku siap menjalankan instruksi apapun dari PBNU. Pihaknya akan melawan apapun yang bisa membahayakan NKRI”

Diagnose Causes. Penyebab masalah yang terjadi pada berita, Detik.com memberikan pernyataan bahwa aktor yang menjadi penyebab masalah yakni wahabi. Wahabi disini sebagai ajaran yang saling mengkafirkan dan banyak dinilai

bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam kalimat:

“.....ajaran wahabi takfiri selama ini banyak dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila”

Make Moral Judgement. Penilaian moral yang diberikan Detik.com dalam redaksinya menjelaskan bahwa ansor Jatim akan tetap terdepan melindungi NKRI. Hal ini sesuai dengan kalimat:

“PW GP Ansor Jatim mengaku siap menjalankan instruksi apapun dari PBNU. Pihaknya akan melawan apapun yang bisa membahayakan NKRI”

Treatment Recommendation. Solusi yang ditawarkan Detik.com terlihat dalam redaksi yang menyatakan bahwa Rilis LD PBNU meskipun masih belum resmi, namun sikap tersebut merupakan bentuk mempertahankan ideologi Indonesia yang damai. Dalam hal ini, Detik.com hendak menyampaikan wajah Islam di Indonesia yang cinta damai, cinta persatuan dan gotong royong. Hal ini dapat dilihat pada paragraf:

“Ideologi bangsa ini sudah sesuai dengan ajaran agama Islam, yang cinta damai, mengedepankan persatuan, mengedepankan keadilan. Apa yang disampaikan LD PBNU, meski masih bukan sikap resmi keorganisasian, saya nilai sebagai bentuk mempertahankan ideologi kita yang cinta damai, cinta persatuan, dan gotong royong”

Detik.com mengungkapkan apa yang hendak direkomendasikan LD PBNU terkait pelarangan wahabi merupakan bentuk sikap yang harus dipertahankan. Dengan hal ini, Detik.com menambahkan sejarah singkat mengenai sejarah masuknya agama Islam melalui kutipan Gus Fawait untuk memperkuat penonjolan isu. Hal ini dapat dipahami pada kalimat:

“Islam di Indonesia bisa bertahan sejak zaman kerajaan, penjajahan, hingga sekarang karena lentur”

Lentur disini dikatakan sebagai pemahaman yang dapat menghargai perbedaan dan memiliki toleransi antar umat beragama. Kalimat ini justru mengarahkan penyudutan kepada wahabi yang bertolak belakang dengan pemahaman mayoritas umat Islam di Indonesia.

7. Analisis Framing Berita “PWNU Jatim Sentil Kekompakan PBNU Soal Gaduh Larangan Wahabi Takfiri”

Pemberitaan ketujuh Detik.com menganggap permasalahan yang terjadi antara LDNU dan PBNU sebagai kesalahpahaman. Narasumber yang dipilih dalam pemberitaan ini adalah pihak pro, namun dalam redaksi Detik.com memperlihatkan kekeliruan yang terjadi dalam lembaga tersebut sehingga berita ini terkesan tidak setuju dengan adanya usulan larangan wahabi. Namun pada pernyataan lain, Detik.com menyudutkan wahabi sebagai aktor dalam pemberitaannya, sehingga larangan wahabi ini perlu diadakan kajian mendalam. Berikut rincian analisis berita ketujuh:

Tabel 20 Analisis Framing Berita “PWNU Jatim Sentil Kekompakan PBNU Soal Gaduh Larangan Wahabi Takfiri”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i> (Pendefinisian Masalah)	PWNU Jatim mengkritisi PBNU tentang kegaduhan wahabi takfiri
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Adanya perbedaan pernyataan LD PBNU dan PBNU
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Koordinasi antara pengurus dan badan otonom dapat diperbaiki
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Perlu pembahasan mendalam terkait harapan LD PBNU ke pemerintah

Define Problems. Pendefinisian masalah dalam pemberitaan Detik.com adalah sikap PWNU Jatim, KH Abdussalam Shohib yang mengkritisi kegaduhan PBNU dan LDNU tentang pernyataan terhadap pelarangan penyebaran wahabi. Detik.com memperlihatkan sindiran PWNU Jatim terhadap pernyataan tersebut. Hal ini sesuai dalam kalimat :

“Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib menyindir kekompakan PBNU soal wahabi takfiri ini”

Diagnose Causes. Penyebab masalah dalam pemberitaan adalah Detik.com menyorot kritikan PWNU Jatim yang menyatakan bahwa adanya perbedaan antara

LDNU dan Sekjen memperlihatkan PBNU yang kurang solid. Hal ini berdasarkan kalimat:

“.....Adanya perbedaan pernyataan antara LDNU dengan Sekjen memperlihatkan PBNU yang kurang solid”

Namun Detik.com memberikan beberapa kalimat yang menjadikan wahabi menjadi aktor penyebab masalah yakni dengan menambahkan redaksi tentang doktrin wahabi yang dapat mengancam NKRI. Dapat dilihat pada kalimat:

“.....paham Wahabi banyak memberikan doktrin anti-NKRI kepada para pengikutnya. Dia menyebut, hal tersebut bisa mengancam NKRI”

Make Moral Judgement. Penilaian moral yang ditawarkan Detik.com terdapat pada kutipan narasumber yakni harapan Gus Salam agar koordinasi satu lembaga dapat diperbaiki. Hal ini dapat dilihat pada kalimat:

“Semoga koordinasi dengan lembaga bisa diperbaiki, sehingga tidak terjadi miss komunikasi yang mengesankan kurang solid”

Treatment Recommendation. Solusi yang ditawarkan Detik.com atas permasalahan dalam pemberitaan yakni perlu adanya kajian mendalam terkait harapan LD PBNU ke pemerintah untuk melarang paham wahabi. Hal ini dapat dilihat melalui kutipan langsung Gus Salam:

“....memang perlu kajian mendalam. Faktanya tidak disetujui oleh Rais Aam dan Ketum”

D. Persamaan dan Perbedaan Pemberitaan Pelarangan Wahabi di CNNIndonesia.com dan Detik.com

Setiap media memiliki cara pandang dan penilaian sendiri mengenai sesuatu hal, peristiwa, fakta, objek dan realitas. Cara pandang inilah yang membedakan apakah media cenderung pro atau kontra terhadap isu yang dipilih. CNNIndonesia.com dan Detik.com merupakan media yang masih dalam perusahaan yang sama yakni CT Corps. Meskipun berada dalam satu perusahaan terdapat pembeda dan kesamaan dalam pemberitaannya. Berita yang ada di media massa merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial. Media memiliki sudut pandang yang berbeda karena wartawan (pembuat berita) memiliki latar belakang,

ideologi dan kepentingan yang berbeda. Adapun persamaan dan perbedaan pemberitaan pelarangan wahabi yang ditemukan peneliti sebagai berikut:

1. Persamaan Pemberitaan Pelarangan Wahabi CNNIndonesia.com dan Detik.com

Ada beberapa tanda yang menjadikan kedua media memiliki persamaan dalam pembedaan berita pelarangan wahabi, yakni penonjolan isu serta pemakaian diksi yang berulang. Pada berita CNNIndonesia.com lebih menonjolkan wahabi yang cenderung radikal dan kerap menimbulkan perdebatan. CNNIndonesia.com juga menambahkan sub judul pada berita keempat yang berjudul “LD PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi hingga Festival HijrahFest”. Penonjolan isu yang dilakukan CNNIndonesia.com menyorot tentang rekomendasi LDNU dan HijrahFest sebagai langkah untuk menghindari munculnya paham radikalisme, ekstremisme dan terorisme.

Sedangkan penonjolan isu yang dilakukan Detik.com adalah pada rekomendasi yang diusulkan LDNU kepada pemerintah untuk melarang wahabi. Hal ini dikuatkan dengan beberapa berita yang ditambahkan sub judul yakni pada berita yang berjudul “Wasekjen: Usulan Ke Pemerintah Larang Wahabi Takfiri Belum Resmi dari PBNU” dan berita dengan judul “PBNU Anulir Rilis LDNU Soal Wahabi: Tak Ada Persetujuan Rais Aam-Ketum”. Kedua berita tersebut dipublikasi dengan waktu yang berdekatan dan isi sub judul dari kedua berita sama persis, sehingga dapat disimpulkan Detik.com menonjolkan permasalahan rekomendasi LDNU.

Pemakaian diksi yang dilakukan CNNIndonesia.com dan Detik.com yang paling banyak digunakan adalah kata “takfiri”. CNNIndonesia.com menempatkan pengulangan diksi takfiri lebih diutamakan didalam isi berita. Sedangkan pada Detik.com sebagian besar ditempatkan pada judul dan isi berita. Kemudian pengulangan diksi yang ditemukan pada kedua media adalah HijrahFest atau HijabFest. Pembahasan HijrahFest selalu berada dibagian sub judul sehingga terkesan menjadi informasi penting yang harus diketahui khalayak.

2. Perbedaan Pemberitaan Pelarangan Wahabi CNNIndonesia.com dan Detik.com

Penulis menemukan perbedaan yang menonjol dalam berita pelarangan wahabi pada kedua media ini yakni pengemasan judul, pemilihan narasumber dan pendukung penonjolan. Pada CNNIndonesia.com cenderung mencari aman dengan menggunakan kalimat langsung dan penggunaan bahasa baku. Sedangkan pada Detik.com dalam pengemasan judul dengan menggunakan kata atau kalimat yang cenderung profokatif. Judul ini seakan menjadi acuan atau daya tarik pembaca bahwa memang seperti itulah fakta yang disajikan.

Pemilihan narasumber pada kedua media cenderung pro yakni banyak mengutip dari pihak NU, namun pada Detik.com ada berita yang terkesan tidak mendukung dengan adanya usulan LDNU mengenai pelarangan wahabi. Hal ini dapat dipahami dengan pemilihan narasumber dari pihak ketiga yakni Din Syamsuddin dari Ormas Muhammadiyah dan beberapa pemberitaan menyorot kesalahpahaman LDNU dan PBNU dalam merilis keputusan. Kedua media juga luput untuk menyertakan narasumber dari penganut wahabi atau penyelenggara kegiatan HijrahFest sehingga berita kurang berimbang.

Pendukung penonjolan pada kedua media berbeda. Pada CNNIndonesia.com memberikan infografis pada berita yang didalamnya terdapat sejarah munculnya wahabi hingga menjadi perdebatan di Indonesia. Adapun infografis yang terdapat pada CNNIndonesia.com

Gambar 2 Infografis Fakta-fakta Paham Wahabi dari Saudi



Sumber : CNNIndonesia.com

Sedangkan pada Detik.com banyak menambahkan video sebagai pendukung penonjolan, didalam video banyak mengambil pernyataan Said Aqil dan Mahfud MD dari berita lampau. Hal ini dapat dilihat pada berita dengan kalimat baca juga yang mengarahkan pada pemberitaan sebelumnya secara lengkap.

Gambar 3 Video Said Aqil Siradj Dalam Webinar



Said Aqil: Pintu Masuk Terorisme Adalah Wahabi dan Salafi

Sumber: Detik.com

Gambar 4 Pemberitaan pada Detik.com

Baca juga:

Anggapan soal Wahabi-Salafi Pintu Masuk Terorisme Tuai Kontroversi

Sumber: Detik.com

Keseluruhan berita pelarangan wahabi pada kedua media dikategorikan sebagai pro dengan langkah LDNU yakni membentuk regulasi adanya pelarangan wahabi di Indonesia. Dari 14 berita, memuat 13 pemberitaan yang cenderung pro dan satu pemberitaan cenderung kontra dengan langkah LDNU. Adapun rinciannya total tujuh berita atau seluruh berita yang dikaji dari CNNIndonesia.com lebih setuju dengan penetapan regulasi pelarangan wahabi dan enam berita dari Detik.com setuju dengan langkah tersebut.

Pemberitaan kontra pada Detik.com lebih menyoroti aspek agama terutama pada berita dengan narasumber dari Muhammadiyah, Din Syamsudin. Pihak ormas ini, sebenarnya hanya memberikan kutipan yang bersifat netral untuk memberikan jalan tengah yakni tetap mengedepankan toleransi. Namun berbicara mengenai regulasi yang direkomendasikan LDNU tetap dikatakan kontra dengan hal tersebut, karena terdapat pernyataan yang kurang setuju dengan langkah LDNU.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis data berita pelarangan wahabi yang dilakukan oleh CNNIndonesia.com dan Detik.com dikaji dari empat aspek framing Robert M Entman yakni pendefinisian masalah (*define problems*), memperkirakan penyebab masalah (*diagnose causes*), membuat keputusan moral (*make moral judgement*) dan penekanan penyelesaian (*treatment recommendation*). Empat aspek tersebut menjadi pedoman penulis dalam menganalisis 14 berita dari kedua media.

Hasil analisis pembedaan 14 berita dari CNNIndonesia.com dan Detik.com tentang pelarangan wahabi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari 14 pemberitaan pada kedua media cenderung mendukung langkah LDNU untuk menetapkan regulasi pelarangan wahabi sebagai strategi mengembalikan wajah Islam yang damai, moderat, toleransi serta cinta persatuan, namun ada perbedaan diantara keduanya. Pertama, pada CNNIndonesia.com menggunakan frame politik dan agama dalam pemberitannya karena pemilihan narasumber yang diambil dari pihak NU dan pihak pemerintah Menko Polhukam. Sedangkan, pada Detik.com semua pemberitannya hanya menonjolkan frame agama karena mayoritas narasumber yang diambil adalah tokoh agama yakni NU dan Muhammadiyah.

Kedua, pemberitaan pelarangan wahabi di CNNIndonesia.com dari segi judul dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh pemberitaan pro terhadap langkah LDNU. Sedangkan pada Detik.com menyajikan berita dukungan terhadap LDNU, namun terdapat pemberitaan yang cenderung kontra dengan langkah tersebut. Bentuk pendukung penonjolan pada kedua media berbeda. Pada CNNIndonesia.com memberikan infografis singkat mengenai perkembangan wahabi dari sejarah hingga keberadaannya di Indonesia. Sedangkan dalam Detik.com menyantumkan video yang berisi pernyataan-pernyataan tokoh perwakilan ormas mengenai wahabi. Detik.com juga memanfaatkan fitur link untuk mengarahkan pada pemberitaan sebelumnya secara lengkap.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna dan masih perlu kajian mendalam. Hasil penelitian ini secara tidak langsung memberikan pola interaksi antara wartawan, sumber berita dan media. Penelitian ini sudah selayaknya menjadi perhatian dan saran dari berbagai pihak demi menumbuhkan kajian analisis *framing* lebih baik lagi. Setelah melaksanakan proses penelitian, penulis memberikan saran untuk beberapa pihak, yakni:

1. Media Online

Setiap media memiliki pembingkaiannya sendiri yang tak akan lepas dengan berbagai hal seperti objek, ideologi, pandangan, pendapat, bias, kelompok tertentu dan lain-lain. Media memiliki tugas mulia sebagai agen penyaluran kebenaran (fakta), maka idealnya data yang ditampilkan benar adanya, berimbang dengan menghadirkan narasumber dari kedua pihak. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat dari berbagai sisi. Sisi mana yang akan menjadi pendapat pribadinya atau sisi mana yang menjadikan pembaca lebih paham mengenai permasalahan. Media juga dituntut memberikan pengaruh yang baik kepada khalayak, tidak memperkeruh suasana atau mengundang kontroversi di dalam masyarakat

2. Masyarakat/khalayak

Pada penelitian ini, masyarakat dituntut untuk lebih selektif dan kritis dalam memahami perbedaan dalam setiap media agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan termakan *hoax* di media online sehingga tidak menimbulkan aksi yang spontan terhadap pemahaman berita yang dangkal.

3. Penelitian selanjutnya

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memilih berbagai isu di media khususnya berita kontroversial harus dilakukan secara hati-hati. Dalam penelitian ini, penulis memilih CNNIndonesia.com dan Detik.com yang masih sama dalam satu naungan, diharapkan penelitian selanjutnya memilih media lain agar menemukan berbagai pembingkaiannya. Kemudian ada berbagai model analisis framing, peneliti berharap pada penelitian

selanjutnya dapat menggunakan model analisis framing lainnya agar menghasilkan hasil penelitian yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Abidin, Zaenal. 2015. "Wahabisme, Transnasionalisme Dan Gerakan-Gerakan Radikal Islam Di Indonesia." *Jurnal Tasamuh* 12(2): 130–48.
- Aritonang, Arthur. 2020. "Bangkitnya Islam Radikal Dan Nasionalisme: Studi Tentang Gerakan Islam Wahabi." *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 6(2): 46–67.
- Barus, Sedia Willing. 2010. *Jurnalistik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Entman, Robert M. 1993. "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm." *Journal of Communication* 43(4): 51.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Jahroni, Jamhari Jajang. 2004. *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- K, Septiawan Santana. 2017. *Jurnalisme Kontemporer*. Edisi Kedu. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Maula, Bani Syarif. 2020. "Radikalisme Islam Sebagai Problem Bagi Bangsa Indonesia Di Masa Kontemporer." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 6(1): 147.
- Mondry. 2016. *Pemahaman Teori Dan Praktik Jurnalistik*. Edisi Kedu. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Muzakkir. 2020. *Etika Jurnalis Analisis Kritis Terhadap Pemberitaan Media*. Jakarta: Kencana.
- Rahmatika, Arina. 2009. "Citra WahaBi Di MEdia Massa Arina Rahmatika." *Mediakita* 2(2): 99–114.
- Romli, Asep Syamsul M. 2018. *Jurnalistik Online*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.

Saeroji, Nanang. 2015. "Dakwah Walisongo Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an." Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

Sobur, Alex. 2002. *Analisis Teks Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Suryawati, Indah. 2014. *Jurnalistik Suatu Pengantar*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Skripsi:

Arwani, Muhammad. 2019. *Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Puisi Sukmawati Dalam Republika Online Edisi 3-5 April 2018*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang

Barokah, Suci Nur. 2021. *Analisis Framing Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Situs Berita Online Kompas.com dan Tirto.id*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang

Fahmi. 2016. *Analisis Framing Pemberitaan Media Online Rakyat Merdeka dan CNN Indonesia Dalam Isu Penetapan 19 Pondok Pesantren Penyebaran Paham Radikalisme oleh BNPT*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta

Idamatussliami, Fina. 2021. *Analisis Framing Pembubaran Front Pembela Islam di Media Berita Online*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang

Lestari, Ayuk Fitriana Puji. 2019. *Jurnalisme Berperspektif Kesetaraan Gender Dalam Media Islam (Analisis Framing Pemberitaan Larangan Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga di Media Online Republika.co.id dan VOA Islam)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang

Rohmiatun, Ifa. 2022. *Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Muhammad Kece di TVOne Edisi 22-23 Agustus 2021*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang

Selasdi, Rahman. 2021. *Analisis Framing Robert N. Entman Pemberitaan Vaksinasi Covid-19 di Media Online Tribunpekanbaru.com*. Skripsi. Universitas Islam Riau. Pekanbaru

Zain, Nurlita Amril. 2021. *Analisis Framing Pemberitaan Inspeksi Mendadak Presiden Jokowi Terkait Kelangkaan Obat Covid-19 di Media Islam dan Media Umum*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang

Internet

Rzr/gil. 2021. “BNPT Ungkap Banyak Teroris Bermazhab Wahabi dan Salafi”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210428073407-12-635708/bnpt-ungkap-banyak-teroris-bermazhab-wahabi-dan-salafi> diakses 17 Maret 2023

Muchth, M. Saekan. 2022. “BNPT dan Penceramah Radikal”, dalam <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/04/bnpt-dan-penceramah-radikal> diakses 17 Maret 2023

Hasan, Nurdin. 2015. “Ribuan Massa Tolak Paham Wahabi di Aceh”, dalam <https://www.benarnews.org/indonesian/wahabi-09102015190337.html> diakses pada 13 April 2023

Nashihuddin, Fahromi. 2022. “Penolakan Pembangunan Markas Salafi Wahabi Muncul di Sampang”, dalam <https://jatim.nu.or.id/madura/penolakan-pembangunan-markas-salafi-wahabi-muncul-di-sampang-NeMbi> diakses pada 13 April 2023

Dmi/pmg. 2022. “Warga Bogor Tolak Pembangunan Masjid Imam Hanbal Karena Aliran Wahabi”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220727162950-20-826962/warga-bogor-tolak-pembangunan-masjid-imam-hanbal-karena-aliran-wahabi> diakses pada 13 April 2023

Niam, Mukafi. 2014. “Ribuan Santri Pemekasan Demo Tolak Tokoh Wahabi”, dalam <https://www.nu.or.id/daerah/ribuan-santri-pamekasan-demo-tolak-tokoh-wahabi-Zbo2Q> diakses pada 13 April 2023

Yog/DAL. 2022. “Ketum PBNU Gus Yahya: ;Larangan Paham Wahabi Belum Resmi”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221102122558-20->

868478/ketum-pbnu-gus-yahya-larangan-paham-wahabi-belum-resmi diakses pada 20 April 2023

Rzr/wis. 2022. “PBNU Klarifikasi Soal Larang Wahabi: Yang Beredar di Timur Tengah”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221031131708-20-867500/pbnu-klarifikasi-soal-larang-wahabi-yang-beredar-di-timur-tengah> diakses pada 20 April 2023

Rzr/DAL. 2022. “PBNU: Tak Ada Persetujuan Ketum & Rais Aam Soal Larangan Wahabi di RI”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221101065251-20-867818/pbnu-tak-ada-persetujuan-ketum-rais-aam-soal-larangan-wahabi-di-ri> diakses pada 20 April 2023

Rzr/kid. 2022. “LD PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi Hingga Festival HijrahFest”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221028202533-20-866784/ld-pbnu-minta-pemerintah-larang-wahabi-hingga-festival-hijrahfest> diakses pada 20 April 2023

Tim/arh. 2022. “Netizen Risau Penyalahgunaan Cap Wahabi, Singgung Buih di Lautan”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221028185754-192-866751/netizen-risau-penyalahgunaan-cap-wahabi-singgung-buih-di-lautan> diakses pada 20 April 2023

Rzr/bmw/bmw. 2022. “LD PBNU Harap Pemerintah Larang Wahabi: Banyak di Masjid Kantor, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221028063033-20-866380/ld-pbnu-harap-pemerintah-larang-wahabi-banyak-di-masjid-kantor> diakses pada 20 April 2023

Rzr/DAL.2022. “Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Penyebaran Wahabi di RI, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221027191518-20-866306/lembaga-dakwah-pbnu-minta-pemerintah-larang-penyebaran-wahabi-di-ri> diakses pada 20 April 2023

Azmi, Faiq. 2022. “PWNU Jatim Sentil Kekompakan PBNU soal Gaduh Larangan Wahabi Takfiri”, dalam <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6382382/pwnu-jatim-sentil-kekompakan-pbnu-soal-gaduh-larangan-wahabi-takfiri> diakses pada 20 April 2023

Azmi, Faiq. 2022. “Respons Ansor Jatim soal Larangan Wahabi di Indonesia”, dalam <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6380791/respons-ansor-jatim-soal-larangan-wahabi-di-indonesia> diakses pada 20 April 2023

Komara, Indra. 2022. “PBNU Anulir Rilis LDNU Soal Wahabi: Tak Ada Persetujuan Rais Aam-Ketum”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-6380544/pbnu-anulir-rilis-ldnu-soal-wahabi-tak-ada-persetujuan-rais-aam-ketum> diakses pada 20 April 2023

Medistiara, Yulida. 2022. “Wasekjen: Usulan ke Pemerintah Larang Wahabi Takfiri Belum Resmi dari PBNU”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-6380161/wasekjen-usulan-ke-pemerintah-larang-wahabi-takfiri-belum-resmi-dari-pbnu> diakses pada 20 April 2023

Sari, Brigitta Belia Permata. 2022. “Din Syamsuddin soal Usulan LD PBNU Larang Wahabi Takfiri: Kedepankan Toleransi”, dalam https://news.detik.com/berita/d-6380077/din-syamsuddin-soal-usulan-ld-pbnu-larang-wahabi-takfiri-kedepankan-toleransi?_ga=2.55843628.661314927.1674319176-1779094408.1647321283 diakses pada 20 April 2023

Medistiara, Yulida. 2022. “Penjelasan PBNU soal Usulan Agar Pemerintah Larang Wahabi Takfiri”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-6378089/penjelasan-pbnu-soal-usulan-agar-pemerintah-larang-wahabi-takfiri> diakses pada 20 April 2023

Permana, Rakhmad H. 2022. “Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi-HijrahFest”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-6375058/lembaga-dakwah-pbnu-minta-pemerintah-larang-wahabi-hijrahfest> diakses pada 20 April 2023

LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita pertama CNNIndonesia.com

Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Penyebaran Wahabi di RI

Kamis, 27 Okt 2022 20:08 WIB



Ilustrasi lembaga dakwah PBNU. (CNN Indonesia/Fajrlan)

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta agar pemerintah membuat regulasi yang melarang penyebaran paham **wahabi** melalui majelis taklim, media online maupun media sosial di Indonesia.

Hal itu merupakan salah satu poin hasil rekomendasi eksternal dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah PBNU yang digelar di Asrama Haji Jakarta, 25-27 Oktober 2022.

"Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah (dalam hal ini Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag) untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah," bunyi rekomendasi eksternal itu dikutip di laman resmi LD PBNU, Kamis (27/10).

Sebagai informasi, Wahabi merupakan pemikiran Islam yang ditujukan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang berpegang teguh pada purifikasi atau pemulihan Islam ke bentuk asli sesuai teks Alquran dan Hadis.

Lihat Juga :

PBNU: Wahabi-Salafi Gampang Sebut Kelompok Lain Sesat dan Kafir

LD PBNU berpandangan kelompok yang mengikuti paham wahabi kerap menuding bidah hingga mengkafirkan tradisi keagamaan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Sehingga, masyarakat Islam di akar rumput kerap terjadi perdebatan.

Tak hanya itu, LD PBNU juga menilai paham wahabi itu ditengarai sebagai embrio munculnya paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

"Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan terjadi gesekan sosial, saling fitnah yang berakibat pada perpecahan, konflik sosial, munculnya kelompok yang menolak Pancasila dan NKRI, serta potensi kekerasan dan terorisme," bunyi rekomendasi tersebut.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sempat menyoroti eksistensi paham wahabi di Indonesia baru-baru ini.

Mahfud menilai paham wahabi dan salafi tidak cocok dengan ajaran Islam yang ada di Indonesia. Menurutnya, dua paham itu lebih cocok jika berkembang di luar Indonesia atau daerah asalnya.

"Dibangun dengan wahabi salafi, enggak cocok di kita [Indonesia]," kata Mahfud dalam acara Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah 'Menjaga Kedaulatan NKRI', Kamis (21/4).

"Boleh di sana. Karena hukum itu sesuai kebutuhan waktu, lokal dan tempatnya," kata dia.

Lihat Juga :

PBNU Minta Pemerintah Tutup Akun dan Media Online Wahabi

Paham wahabi juga sejak lama banyak diperdebatkan. Selain Mahfud, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj juga sempat menilai ajaran wahabi merupakan pintu masuk terorisme di Indonesia.

Said mengakui wahabi memang tidak mengajarkan terorisme dan kekerasan. Namun, paham itu selalu menganggap orang yang berbeda pandangan sebagai kafir meski sesama muslim.

"Kalau kita benar-benar sepakat, benar-benar satu barisan ingin menghadapi, menghabiskan, menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya yang dihadapi, pintu masuknya yang harus kita habisin, apa? Wahabi! Ajaran Wahabi itu pintu masuknya terorisme," kata Said dalam sebuah seminar virtual yang digelar 30 Maret 2021 lalu.

Lihat Juga :



Mahfud Nilai Wahabi-Salafi Tak Cocok di Indonesia, Minta Masjid Dijaga

Lampiran 2. Berita kedua CNNIndonesia.com

LD PBNU Harap Pemerintah Larang Wahabi: Banyak di Masjid Kantor

Jumat, 28 Okt 2022 06:40 WIB



LD PBNU berharap pemerintah melarang penyebaran paham wahabi di Indonesia (Dok. Istimewa)

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah membuat regulasi untuk melarang penyebaran paham wahabi melalui majelis taklim, media online maupun media sosial di Indonesia.

Hal itu merupakan salah satu poin hasil rekomendasi eksternal dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah PBNU yang digelar di Asrama Haji Jakarta, 25-27 Oktober 2022.

"Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah (dalam hal ini Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag) untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah," bunyi rekomendasi tersebut dikutip di laman resmi LD PBNU, Kamis (27/10).

Wahabi merupakan pemikiran Islam yang ditujukan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang berpegang teguh pada purifikasi atau pemulihan Islam ke bentuk asli sesuai teks Alquran dan Hadis.

LD PBNU melihat kelompok yang mengikuti paham wahabi kerap menuding bidah hingga mengkafirkan tradisi keagamaan yang dilakukan mayoritas umat Islam di Indonesia. Walhasil, masyarakat Islam di akar rumput kerap terjadi perdebatan.

Tak hanya itu, LD PBNU juga menilai paham wahabi itu ditengarai sebagai embrio munculnya paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

"Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan terjadi gesekan sosial, saling fitnah yang berakibat pada perpecahan, konflik sosial, munculnya kelompok yang menolak Pancasila dan NKRI, serta potensi kekerasan dan terorisme," bunyi rekomendasi tersebut.

Selain itu, LD PBNU juga memandang masih banyak kajian keislaman dan kegiatan keagamaan di masjid-masjid perkantoran diampu oleh penceramah berpaham

Diketahui, pelbagai kalangan belakangan ini sempat menyoroti eksistensi paham wahabi di Indonesia.

Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menilai paham wahabi dan salafi tidak cocok dengan ajaran Islam yang ada di Indonesia.

Menurutnya, dua paham itu lebih cocok jika berkembang di luar Indonesia atau daerah asalnya.

"Dibangun dengan wahabi salafi, enggak cocok di kita [Indonesia]," kata Mahfud dalam acara Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah 'Menjaga Kedaulatan NKRI', Kamis (21/4).

"Boleh di sana. Karena hukum itu sesuai kebutuhan waktu, lokal dan tempatnya," kata dia.

Lihat Juga :

Mahfud MD: Paham Wahabi dan Salafi Tak Cocok di Indonesia

Selain Mahfud, mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj juga sempat menilai ajaran wahabi merupakan pintu masuk terorisme di Indonesia.

Said mengakui wahabi memang tidak mengajarkan terorisme dan kekerasan. Namun, paham itu selalu menganggap orang yang berbeda pandangan sebagai kafir meski sesama muslim.

"Kalau kita benar-benar sepakat, benar-benar satu barisan ingin menghadapi, menghabiskan, menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya yang dihadapi, pintu masuknya yang harus kita habisin, apa? Wahabi! Ajaran Wahabi itu pintu masuknya terorisme," kata Said dalam sebuah seminar virtual yang digelar 30 Maret 2021 lalu.

Lampiran 3. Berita Ketiga CNNIndonesia.com

Netizen Risau Penyalahgunaan Cap Wahabi, Singgung Buih di Lautan

Jumat, 28 Okt 2022 19:58 WIB



Jakarta, CNN Indonesia -- Netizen risau rekomendasi Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) soal aturan yang melarang penyebaran ajaran **Wahabi**. Ada potensi jadi alat pembungkaman?

"Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah (dalam hal ini Kemenkopolkumham, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag) untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah," bunyi rekomendasi eksternal, Kamis (27/10).

Mereka juga menyebut banyak kajian keislaman dan kegiatan keagamaan di masjid-masjid perkantoran diisi oleh penceramah berpaham Wahabi-Salafi.

"Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan terjadi gesekan sosial, saling fitnah yang berakibat pada perpecahan, konflik sosial, munculnya kelompok yang menolak Pancasila dan NKRI, serta potensi kekerasan dan terorisme," demikian bunyi rekomendasi LD PBNU itu.

Dikutip dari situs ensiklopedia *Britannica*, Wahabi merupakan ideologi keagamaan dari Arab Saudi hasil pemikiran Islam dari Muhammad bin Abdul Wahab.

Sosok ini pada intinya mengusung ide purifikasi atau pemurnian Islam ke bentuk asli sesuai teks Alquran dan Hadits. Dalam praktiknya, sejumlah pihak mengkritik penyebaran ajaran ini terlalu saklek dengan teks tanpa melihat konteks ayat. Kesar radikal pun muncul.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj mengakui Wahabi memang tidak mengajarkan terorisme dan kekerasan. Namun, kata dia, paham itu selalu menganggap orang yang berbeda pandangan dengan mereka sebagai kafir meski sesama muslim.

"Kalau kita benar-benar sepakat, benar-benar satu barisan ingin menghadapi, menghabiskan, menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya yang dihadapi, pintu masuknya yang harus kita habisi, apa? Wahabi! Ajaran Wahabi itu pintu masuknya terorisme," ucap dia, pada 30 Maret 2021.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai paham Wahabi dan Salafi tidak cocok dengan ajaran Islam di Indonesia.

"Dibangun dengan Wahabi Salafi, enggak cocok di kita [Indonesia]," ujar dia, dalam Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah 'Menjaga Kedaulatan NKRI', Kamis (21/4), "Boleh di sana. Karena hukum itu sesuai kebutuhan waktu, lokal dan tempatnya".

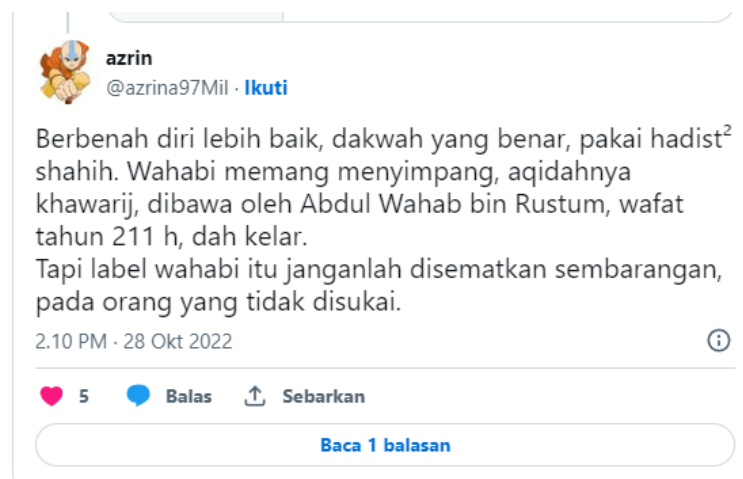
Terlepas dari pandangan para tokoh itu, warganet merisaukan sejumlah hal terutama di tengah kondisi negara yang masih terpolarisasi dan rawan pembungkaman lawan politik.

Usai ramai pemberitaan LD PBNU, kata kunci 'Wahabi' pun masuk ke ranking 23 trending topic Indonesia dengan 6.096 kicauan per Jumat (28/10) pukul 19.46 WIB.

Akun @azrina97Mil mengakui ada penyimpangan dari ajaran Wahabi. Namun, ia meminta tak sembarangan untuk mencap pihak tertentu dengan label itu.

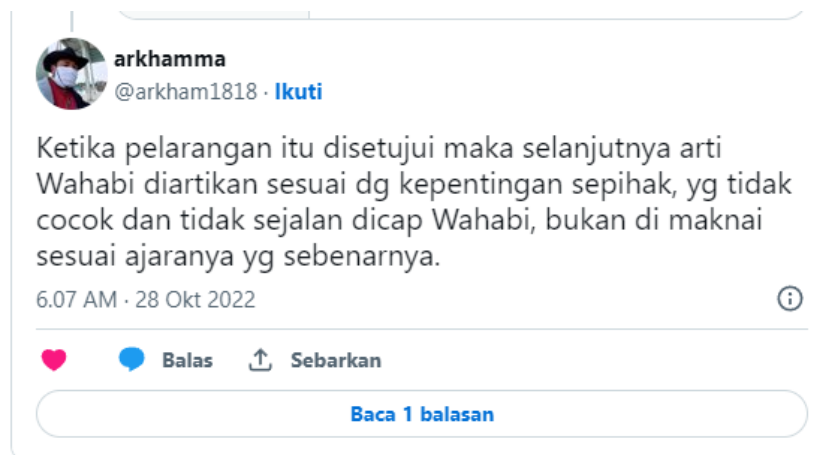
"Berbenah diri lebih baik, dakwah yang benar, pakai hadist² shahih. Wahabi memang menyimpang, aqidahnya khawarij, dibawa oleh Abdul Wahab bin Rustum, wafat tahun 211 h, dah kelar."

"Tapi label wahabi itu janganlah disematkan sembarangan, pada orang yang tidak disukai," kicau dia.



Senada, akun @arkham1818 risau dengan rekomendasi LD PBNU yang bisa berujung pelabelan bagi kelompok yang tak sejalan.

"Ketika pelarangan itu disetujui maka selanjutnya arti Wahabi diartikan sesuai dg kepentingan sepihak, yg tidak cocok dan tidak sejalan dicap Wahabi, bukan di maknai sesuai ajarannya yg sebenarnya," ucapnya.



Akun @panca_negara khawatir rekomendasi ini justru memecah belah masyarakat.

"Ini sebenarnya siapa sih yang pemecah belah umat. Asal akidahnya sama knapa harus saling sikut," cetusnya.

Lampiran 4. Berita Keempat CNNIndonesia.com

LD PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi hingga Festival HijrahFest

Sabtu, 29 Okt 2022 13:32 WIB



Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (**LD PBNU**) mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah membuat regulasi yang melarang penyebaran paham **Wahabi** melalui majelis taklim, media online maupun media sosial di Indonesia hingga tak mengeluarkan izin festival HijrahFest atau HijabFest.

Hal itu merupakan salah satu poin hasil rekomendasi eksternal dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah PBNU yang digelar di Asrama Haji Jakarta, 25-27 Oktober 2022.

"Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah (dalam hal ini Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag) untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah," demikian penggalan bunyi rekomendasi tersebut dikutip di laman resmi LD PBNU, Kamis (27/10).

Sebagai informasi, Wahabi adalah ideologi keagamaan dari Arab Saudi. Paham ini merupakan pemikiran Islam yang dibawa seorang cendekiawan Muhammad bin Abdul Wahab.

Pemikiran yang dibawanya ditujukan kepada pengikut yang berpegang teguh pada purifikasi atau kemurnian Islam ke bentuk asli sesuai teks Alquran dan Hadis. Namun, hal itu dilihat murni dalam artian mereka sendiri, di mana merasa hanya kelompoknya saja yang Islamnya paling benar.

LD PBNU berpandangan kelompok yang mengikuti paham wahabi kerap menuding *bid'ah* hingga mengafirkan tradisi keagamaan yang dilakukan mayoritas umat Islam di Indonesia. Sehingga, pihaknya melihat masyarakat Islam di akar rumput kerap kali terjadi perdebatan.

Tak hanya itu, LD PBNU juga menilai paham wahabi ditengarai sebagai embrio munculnya paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

"Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan terjadi gesekan sosial, saling fitnah yang berakibat pada perpecahan, konflik sosial, munculnya kelompok yang menolak Pancasila dan NKRI, serta potensi kekerasan dan terorisme," bunyi rekomendasi tersebut.

Selain itu, LD PBNU juga memandang masih banyak kajian keislaman dan kegiatan keagamaan di masjid-masjid perkantoran diampu penceramah berpaham wahabi-salafi. Paham-paham itu, kata mereka, justru bertolak belakang dengan komitmen pemerintah untuk membangun moderasi beragama.

LD PBNU lantas meminta kepada Kementerian dan lembaga negara, direksi BUMN dan BUMD untuk melibatkan LD PBNU menyusun materi dan kurikulum dakwah dan kajian keislaman di masjid-masjid perkantoran tersebut.

"Lembaga Dakwah PBNU siap mendelegasikan para ustadz, dai, dan mubaligh yang berada di bawah naungan Lembaga Dakwah PBNU untuk menyampaikan materi kajian, tausiyah, ceramah, dan pembelajaran ilmu-ilmu keislaman sesuai kualifikasi, kapasitas dan kepakarannya," bunyi salah satu rekomendasi eksternal itu.

FAKTA-FAKTA PAHAM WAHABI DARI SAUDI

Paham wahabi kini menjadi perbincangan di Indonesia.
Wahabi adalah paham yang melekat dengan negara Arab Saudi.
Sebab, paling berpengaruh di negara itu.

- 1**
**DIDIRIKAN
MUHAMMAD BIN
ABDUL WAHHAB**

Cendekiawan dan pembaharu Muslim, Muhammad bin Abdul Wahhab.


- 2**
**DIREALISASIKAN BERSAMA
MUHAMMAD BIN SAUD**

Gagasan Saudi menggunakan bentuk Islam yang murni seperti wahabi direalisasikan Abdul Wahhab bersama pendiri negara Saudi, Muhammad bin Saud di kota Diriyah.


- 3**
**GENCAR DI
Pemerintahan**

Selama beberapa dekade, paham wahabi telah ditegakkan oleh para ulama yang menjalankan peradilan dan polisi agama.


- 4**
**MBS TEGASKAN WAHABI
BUKAN IDEOLOGI SAUDI**

Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed Bin Salman (MBS) menegaskan bahwa ajaran wahabisme bukan satu-satunya ideologi dan identitas Saudi selama ini.


- 5**
DIDESAK PBNU

Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah membuat regulasi yang melarang penyebaran paham wahabi melalui majelis taklim, media online maupun media sosial di Indonesia.



 Infografis: Astari | Naskah: Ahmad Bachrain | Berbagi sumber

Lihat Juga :



Mengenal Wahabi, Paham yang Diminta Dilarang di RI oleh LD PBNU

Minta Tak Izinkan HijrahFest

Tak hanya itu, LD PBNU juga meminta kepada pemerintah tidak memberikan izin kegiatan yang bertujuan untuk menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

Salah satunya kegiatan yang terindikasi oleh LD PBNU dibaluti oleh itu adalah Festival HijrahFest maupun HijabFest.

"Merekomendasikan kepada pemerintah untuk mewaspadaikan dan tidak memberikan izin penyelenggaraan kegiatan/event yang bertujuan untuk menolak NKRI dan Pancasila yang dibalut dengan penyelenggaraan kegiatan festival keagamaan ala milenial yang menarik minat generasi muda seperti HijrahFest atau HijabFest," bunyi salah satu rekomendasi tersebut.

CNNIndonesia.com sejauh ini masih berusaha mendapatkan pernyataan dari pengelola HijrahFest dan HijabFest guna merespons kajian LD PBNU tersebut.

CNNIndonesia.com sudah mencoba mengontak pengelola HijrahFest seperti Arie Untung, termasuk lewat direct message akun Instagramnya.

CNNIndonesia.com pun mencoba menghubungi dan nomor kontak yang tertera di laman resmi HijrahFest guna merespons kajian LD PBNU tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada respons yang didapat.

Sebagai informasi, baru-baru ini Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan MUI Jawa Timur memprotes keras penyelenggaraan 'Surabaya Islamic Festival' yang digelar oleh Hijrahfest, di Jatim Expo, Surabaya, 14-16 Oktober 2022.

Sekretaris PWNU Jatim Akh Muzakki mengatakan penolakan itu lantaran penyelenggara telah mencatut logo NU tanpa izin. Muzakki juga menilai penolakan itu juga karena acara Hijrahfest digelar oleh beberapa orang yang diduga merupakan bagian kelompok terlarang dan berseberangan dengan ideologi negara.

Akhirnya, acara Surabaya Islamic Festival yang diselenggarakan Hijrahfest itu batal dilaksanakan.

Lampiran 5. Berita Kelima CNNIndonesia.com

PBNU: Tak Ada Persetujuan Ketum & Rais Aam soal Larangan Wahabi di RI

Selasa, 01 Nov 2022 09:15 WIB



Ketum dan Rais Aam PBNU. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jendral PBNU Saifullah Yusuf menegaskan rilis hasil rekomendasi Lembaga Dakwah **PBNU** soal permintaan pemerintah melarang paham **Wahabi** belum dikonsultasikan dan disetujui oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar maupun Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

"Rilis LDNU kontra produktif dan tidak pernah dikonsultasikan dengan PBNU khususnya kepada Rais Aam dan Ketua Umum. Masalah sepenting ini mereka tidak konsultasi dan tidak memberitahukan," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu dalam keterangannya, Selasa (1/11).

Gus Ipul menjelaskan PBNU mengeluarkan instruksi khusus terkait pedoman penyampaian informasi publik kepada seluruh lembaga, badan otonom maupun Badan Khusus di bawah PBNU.

Instruksi ini bernomor 225/PB.03/A.I.03.41/99/10/2022 yang ditandatangani Yahya Cholil Staquf dan Saifullah Yusuf.

Instruksi PBNU ini memiliki beberapa poin. Di antaranya menginstruksikan untuk tidak memberikan pernyataan yang bersifat strategis lebih-lebih urusan agama sebelum mendapatkan persetujuan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

Lihat Juga :

PBNU Klarifikasi soal Larang Wahabi: Yang Beredar di Timur Tengah

Seluruh hasil permusyawaratan yang dikeluarkan oleh lembaga, badan khusus maupun badan otonom harus dilaporkan kepada PBNU. Khususnya kepada Rais Aam dan Ketua Umum PBNU untuk mendapatkan persetujuan.

"Jika ada lembaga yang merilis sesuatu sebelum mendapatkan persetujuan PBNU, maka rilis itu dapat diabaikan karena bukan menjadi keputusan resmi perkumpulan," kata Gus Ipul.

Sebagai informasi, Lembaga Dakwah PBNU merupakan organisasi otonom di bawah PBNU. LD PBNU ini sempat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Asrama Haji Jakarta, 25-27 Oktober 2022.

Salah satu hasil rekomendasi Rakernasnya yakni agar pemerintah membuat regulasi yang melarang penyebaran paham Wahabi melalui majelis taklim, media online maupun media sosial di Indonesia.

Lihat Juga :

LD PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi hingga Festival HijrahFest

(rzz/DAL)

Lampiran 6. Berita Keenam CNNIndonesia.com

PBNU Klarifikasi soal Larang Wahabi: Yang Beredar di Timur Tengah

Senin, 31 Okt 2022 18:35 WIB



Ilustrasi. (Foto: ANTARA FOTO/R. Rekotomo)

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrurrozi meluruskan salah satu rekomendasi Lembaga Dakwah (LD) PBNU yang meminta pemerintah agar melarang paham **Wahabi** di Indonesia.

Ia mengatakan yang dimaksud LD PBNU adalah paham Wahabi yang takfiri yang kerap dijadikan ideologi kekerasan ISIS.

"Ya mungkin ini perlu sedikit kita luruskan, bahwa yang dimaksud adalah paham Wahabi takfiri yang beredar dari Timur Tengah dan menjadi ideologi kekerasan ISIS, yang mengkafirkan muslim beda paham dan menghalalkan darah semua yang menjadi musuhnya," kata Gus Fahrur kepada *CNNIndonesia.com*, Senin (31/10).

Gus Fahrur mengatakan tidak semua Wahabi berpaham radikal. Ada pula paham Wahabi yang moderat dan mampu menjalin kerja sama baik dengan kelompok lainnya.

Lihat Juga :



Wahabi Sulsel Diklaim Bangun Sekolah-Masjid dari Dana Timur Tengah

Ia pun menegaskan NU akan tetap menjalin hubungan baik dengan semua ormas Islam moderat. Baik secara nasional maupun internasional.

"Keputusan LD PBNU tidak serta merta menjadi keputusan PBNU karena sifatnya hanya rekomendasi ke dalam, dan seharusnya tidak untuk di publikasikan sebelum mendapat persetujuan Ketum PBNU," kata dia.

Di sisi lain, Gus Fahrur mengatakan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf selama ini aktif membawa misi Islam Aswaja yang ramah dan rahmatan lil alamin. Misi itu untuk menjadikan Islam yang memuliakan manusia sebagai sederajat, memiliki hak sama dan harus dihargai dan dihormati, baik yang menganut agama Islam dan atau yang tidak.

Ia menyebut Gus Yahya selalu menekankan pemikiran untuk menjadikan agama Islam sebagai agama damai dengan semua golongan.

Lihat Juga :



LD PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi hingga Festival HijrahFest

"Dunia harus membangun konsensus atas nilai-nilai yang perlu disepakati agar semua pihak yang berbeda-beda dapat hidup berdampingan secara damai. Termasuk dalam menyikapi perbedaan paham dengan Wahabi," kata dia.

Sebelumnya, LD PBNU mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah membuat regulasi yang melarang penyebaran paham Wahabi melalui majelis taklim, media online maupun media sosial di Indonesia.

Hal itu merupakan salah satu poin hasil rekomendasi eksternal dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah PBNU yang digelar di Asrama Haji Jakarta, 25-27 Oktober 2022.

"Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah (dalam hal ini Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag) untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah," demikian penggalan bunyi rekomendasi tersebut dikutip di laman resmi LD PBNU, Kamis (27/10).

(rzzr/wis)

Lampiran 7. Berita Ketujuh CNNIndonesia.com

Ketum PBNU Gus Yahya: Larangan Paham Wahabi Belum Resmi

Rabu, 02 Nov 2022 12:59 WIB



Ketum PBNU Gus Yahya menegaskan rilis hasil rekomendasi Lembaga Dakwah PBNU soal permintaan pemerintah melarang paham Wahabi belum resmi sikap dari ormas Islam tersebut.. (CNNIndonesia/Tunggu)

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau **Gus Yahya** menegaskan rilis hasil rekomendasi Lembaga Dakwah PBNU soal permintaan pemerintah melarang paham **Wahabi** belum resmi sikap dari ormas Islam tersebut.

"Itu kan pembicaraan di antara mereka yang belum resmi karena bukan dari PBNU," kata Gus Yahya usai pembukaan Forum Agama G20 (R20) di Nusa Dua, Bali, Rabu (2/11).

Namun, ia tidak menampik bahwa perbedaan antara kelompok agama memang harus dibahas dan dipikirkan sehingga tidak menyulut pertentangan.

"Perbedaan-perbedaan dari kelompok-kelompok agama itu, bagaimana semua ini tidak menyulut pertentangan, tetapi kita bisa menyepakati sesuatu yang bisa kita usung bersama," katanya.

Gus Yahya membuka kemungkinan paham wahabi menjadi salah satu yang dibahas oleh para tokoh agama, sekte dan aliran kepercayaan dari berbagai dunia di forum R20.

"Insya Allah (dibahas di R20)," katanya.

Sebagai informasi, Lembaga Dakwah PBNU merupakan organisasi otonom di bawah PBNU. LD PBNU ini sempat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Asrama Haji Jakarta, 25-27 Oktober 2022.

Salah satu hasil rekomendasi Rakernasnya yakni agar pemerintah membuat regulasi yang melarang penyebaran paham Wahabi melalui majelis taklim, media online maupun media sosial di Indonesia.

Lihat Juga :



PBNU Klarifikasi soal Larang Wahabi: Yang Beredar di Timur Tengah

(yog/DAL)

Lampiran 8. Berita Pertama Detik.com

Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi-HijrahFest

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews

Jumat, 28 Okt 2022 17:42 WIB



Rakernas Lembaga Dakwah PBNU (Dok. LD PBNU)

Jakarta - Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah Indonesia melarang persebaran paham Wahabi. Selain itu, LD PBNU meminta gelaran *event* HijrahFest atau HijabFest dilarang.

Rekomendasi ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX LD PBNU pada 25-27 Oktober 2022 di UPT Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Rakernas ini menghasilkan sejumlah rekomendasi internal dan eksternal NU. Salah satu poin rekomendasinya adalah melarang penyebaran paham Wahabi.

"Lembaga Dakwah [PBNU](#) merekomendasikan kepada pemerintah (dalam hal ini Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag) untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah, baik melalui majelis taklim, forum kajian, media *online*, maupun media sosial (dalam bentuk tulisan, audio, maupun visual)," bunyi rekomendasi itu seperti dikutip **detikcom** dari laman [LD PBNU](#), Jumat (28/10/2022).

Selain itu, LD PBNU merekomendasikan pemerintah Indonesia agar melarang penyelenggaraan *event* yang menolak NKRI dan Pancasila. Beberapa di antaranya *event* milenial HijrahFest atau HijabFest.

"Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mewaspadai dan tidak memberikan izin penyelenggaraan kegiatan/*event* yang bertujuan untuk menolak NKRI dan Pancasila yang dibalut dengan penyelenggaraan kegiatan festival keagamaan ala milenial yang menarik minat generasi muda, seperti HijrahFest atau HijabFest," lanjutnya.

Rekomendasi ini karena paham Wahabi dinilai kerap melontarkan tuduhan *bid'ah* dan pengkafiran.

"Bahwa pada masyarakat muslim akar rumput kerap terjadi perdebatan, tuduhan *bid'ah*, bahkan pengkafiran atas tradisi keagamaan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam oleh kelompok Islam yang mengikuti paham Wahabiyah," ujarnya.

LD PBNU menilai paham Wahabi bisa memicu gesekan sosial hingga perpecahan. Selain itu, paham ini dianggap berpotensi mengarah ke terorisme.

"Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan terjadi gesekan sosial, saling fitnah yang berakibat pada perpecahan, konflik sosial, munculnya kelompok yang menolak Pancasila dan NKRI, serta potensi kekerasan dan terorisme," ungkapnya.

Lampiran 9. Berita Kedua Detik.com

Penjelasan PBNU soal Usulan Agar Pemerintah Larang Wahabi Takfiri

Yulida Medistiara - detikNews

Minggu, 30 Okt 2022 19:05 WIB



Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) | (Foto: Dok Pribadi)

Jakarta - Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah Indonesia melarang persebaran paham wahabi salafi takfiri. PBNU menjelaskan penganut paham wahabi takfiri sering mengkafirkan sesama muslim meski berbeda pendapat keagamaan.

"Yang dimaksud adalah paham salafi takfiri, yang mengkafirkan sesama muslim karena beda pendapat keagamaan sebagaimana yang diyakini oleh penganut aliran garis keras ISIS. Tidak semua Wahabi Takfiri, hanya sebagian saja," kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), saat dihubungi, Minggu (30/10/2022).

Dia mengatakan paham wahabi takfiri merupakan paham intoleran, misalnya yang mengharamkan tradisi seperti ziarah kubur. Padahal, menurutnya, masyarakat diimbau untuk saling menghormati agar tidak terjadi perpecahan.

"Yang sering menyebar paham intoleran, suka mengharamkan amaliah masyarakat tradisional seperti ziarah kubur, tahillan, maulid dan lain-lain. Mengklaim paling benar dan menjadi hakim kebenaran bagi orang lain. Agar masyarakat hidup rukun, saling menghargai dan menghormati tidak merendahkan satu sama lain," kata Gus Fahrur.

Baca juga:

Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi-HijrahFest

Namun Gus Fahrur mengaku kurang paham soal penyebab mengapa acara Hijrah Fest diusulkan pelarangan oleh Lembaga Dakwah PBNU. Namun, dia menjelaskan, PBNU pada prinsipnya ingin ada dakwah Islam yang moderat dan toleran tanpa kekerasan.

"Soal hijrah fest saya kurang paham, apa penyebabnya. Yang jelas kita ingin melakukan dakwah Islam *wasyathiyah*, moderat dan toleran tanpa kekerasan dan menegakkan NKRI, seperti yang telah dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah selama ini," katanya.

Gus Fahrur mengatakan ormas Islam yang ada di Indonesia seperti PBNU dan Muhammadiyah bersepakat dakwah *ahlusunah waljama'ah* yang moderat, saling menghargai dan menghormati satu sama lain meskipun beda pandangan keagamaan dalam beberapa hal. Selain itu, ormas Islam yang ada di Indonesia juga disebut menerima bentuk negara NKRI adalah final. Namun hanya sebagian kecil aliran baru Wahabi Takfiri yang masuk Indonesia yang intoleran.

"Hanya sebagian kecil saja aliran baru Wahabi Takfiri yang masuk ke Indonesia yang cenderung radikal dan intoleran atau menginginkan bentuk negara khilafah. Ini yang harus dicegah, agar tidak menjadi bibit radikalisme agama atau ajaran kebencian," ungkapnya.

"Intinya kita akan merangkul dan bekerjasama dengan semua aliran moderat dalam bernegara dan beragama," tambahnya.

Gus Fahrur mengatakan ormas Islam yang ada di Indonesia seperti PBNU dan Muhammadiyah bersepakat dakwah *ahlusunah waljama'ah* yang moderat, saling menghargai dan menghormati satu sama lain meskipun beda pandangan keagamaan dalam beberapa hal. Selain itu, ormas Islam yang ada di Indonesia juga disebut menerima bentuk negara NKRI adalah final. Namun hanya sebagian kecil aliran baru Wahabi Takfiri yang masuk Indonesia yang intoleran.

"Hanya sebagian kecil saja aliran baru Wahabi Takfiri yang masuk ke Indonesia yang cenderung radikal dan intoleran atau menginginkan bentuk negara khilafah. Ini yang harus dicegah, agar tidak menjadi bibit radikalisme agama atau ajaran kebencian," ungkapnya.

"Intinya kita akan merangkul dan bekerjasama dengan semua aliran moderat dalam bernegara dan beragama," tambahnya.

Lembaga Dakwah PBNU Usulkan Pemerintah Larang Paham Wahabi

Sebelumnya, Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah Indonesia melarang persebaran paham Wahabi. Selain itu, LD PBNU meminta gelaran event HijrahFest atau HijabFest dilarang.

Rekomendasi ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX LD PBNU pada 25-27 Oktober 2022 di UPT Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Rakernas ini menghasilkan sejumlah rekomendasi internal dan eksternal NU. Salah satu poin rekomendasinya adalah melarang penyebaran paham Wahabi.

"Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah (dalam hal ini Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag) untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah, baik melalui majelis taklim, forum kajian, media online, maupun media sosial (dalam bentuk tulisan, audio, maupun visual)," bunyi rekomendasi itu seperti dikutip **detikcom** dari laman LD PBNU, Jumat (28/10).

Baca juga:

Anggapan soal Wahabi-Salafi Pintu Masuk Terorisme Tuai Kontroversi

Selain itu, LD [PBNU](#) merekomendasikan pemerintah Indonesia agar melarang penyelenggaraan event yang menolak NKRI dan Pancasila. Beberapa di antaranya event milenial HijrahFest atau HijabFest.

"Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mewaspadai dan tidak memberikan izin penyelenggaraan kegiatan/event yang bertujuan untuk menolak NKRI dan Pancasila yang dibalut dengan penyelenggaraan kegiatan festival keagamaan ala milenial yang menarik minat generasi muda, seperti HijrahFest atau HijabFest," lanjutnya.

Rekomendasi ini karena paham Wahabi dinilai kerap melontarkan tudingan bid'ah dan pengkafiran.

"Bahwa pada masyarakat muslim akar rumput kerap terjadi perdebatan, tudingan bid'ah, bahkan pengkafiran atas tradisi keagamaan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam oleh kelompok Islam yang mengikuti paham Wahabiyah," ujarnya.

"Intinya kita akan merangkul dan bekerjasama dengan semua aliran moderat dalam bernegara dan beragama," imbuhnya.

Lampiran 10. Berita Ketiga Detik.com

Din Syamsuddin soal Usulan LD PBNU Larang Wahabi Takfiri: Kedepankan Toleransi

Brigitta Belia Permata Sari - detikNews

Senin, 31 Okt 2022 18:52 WIB



Din Syamsuddin (Jalu Rahman Dewantara/detikJateng)

Jakarta - Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) meminta pemerintah melarang persebaran paham wahabi salafi takfiri. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai agar hal tersebut mengedepankan toleransi dengan mencari jalan tengah.

"Bagi saya pribadi, seharusnya kita mengedepankan sikap sifat dan watak *wasathiyah* atau jalan tengah. Mengedepankan toleransi sebagai salah satu aspek *wasathiyah* yaitu tasamuh atau toleransi. Maka kita harus bertenggang rasa terhadap perbedaan pendapat," ungkapnya kepada wartawan, Senin (31/10/2022).

Baca juga:

Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi-HijrahFest

Dia menuturkan sikap bermusyawarah lebih baik dibanding menyalahkan pihak lain. Menurutnya, sikap menyalahkan dan memutlakkan pemahaman merupakan bentuk ekstremitas dalam beragama.

"Mari kita bermusyawarah. Jadi sebaiknya jangan ada sikap yang memutlakkan pemahaman, apalagi menyalahkan pihak lain dan apalagi membawa negara untuk terlibat. Hemat saya, itu bukan sikap kita yang selama ini kita agung-agungkan, dengung-dengungkan sebagai sikap moderat. Itu adalah bentuk ekstremitas di dalam beragama," tuturnya.

Dia berharap pemerintah tidak terlibat dalam menangani perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat atau umat beragama.

"Dalam suasana saat ini kita harus mengedepankan toleransi, tasamuh, syuro, dan itulah sikap yang islami. Saya harap pemerintah sebaiknya jangan terlibat dalam menangani perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat atau umat beragama," ucapnya.

Baca juga:

[Penjelasan PBNU soal Usulan Agar Pemerintah Larang Wahabi Takfiri](#)

Sebelumnya, Lembaga Dakwah PBNU meminta pemerintah Indonesia melarang persebaran paham wahabi salafi takfiri. Sebab, penganut paham wahabi takfiri dinilai kerap mengkafirkan sesama muslim meski berbeda pendapat keagamaan.

"Yang dimaksud adalah paham salafi takfiri, yang mengkafirkan sesama muslim karena beda pendapat keagamaan sebagaimana yang diyakini oleh penganut aliran garis keras ISIS. Tidak semua wahabi takfiri, hanya sebagian saja," kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), saat dihubungi, Minggu (30/10) lalu.

Dia mengatakan paham wahabi takfiri merupakan paham intoleran, misalnya yang mengharamkan tradisi, seperti ziarah kubur. Padahal, menurutnya, masyarakat diimbau saling menghormati agar tidak terjadi perpecahan.

Lampiran 11. Berita Keempat Detik.com

Wasekjen: Usulan ke Pemerintah Larang Wahabi Takfiri Belum Resmi dari PBNU

Yulida Medistiara - detikNews

Senin, 31 Okt 2022 19:37 WIB



Gedung PBNU (Foto: nu.or.id)

Jakarta - Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merekomendasikan pemerintah Indonesia melarang persebaran paham wahabi takfiri. Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan rekomendasi yang belum diratifikasi dalam rapat PBNU dianggap belum resmi.

"PBNU ingatkan kepada semua jajarannya baik di lembaga dan Banom NU untuk tidak mengeluarkan rekomendasi eksternal termasuk kepada pemerintah," kata Rahmat dalam keterangannya, Senin (31/10/2022).

Dia menyebut semua kebijakan strategis di PBNU ada mekanismenya. Adapun mekanismenya adalah melalui rapat gabungan pengurus harian dan kemudian ditindaklanjuti pengurus harian. Sementara itu, pengurus harian yang akan berkomunikasi dengan pihak eksternal.

"Terkait komunikasi strategis dengan pihak eksternal wewenang dan tanggung jawab ada di Pengurus Harian," ujarnya.

Baca juga:

Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi-HijrahFest

Sementara itu, dia menyebut rekomendasi yang dikeluarkan lembaga, badan otonom NU, dan yang mengatasnamakan NU sebelum diratifikasi dalam rapat PBNU belum bisa dianggap sebagai usulan resmi PBNU.

"Semua rekomendasi yang dikeluarkan lembaga, banom (badan otonom NU -*red*) dan yang mengatasnamakan NU sebelum diratifikasi dalam rapat PBNU belum dapat dianggap resmi," katanya.

Baca juga:

Penjelasan PBNU soal Usulan Agar Pemerintah Larang Wahabi Takfiri

Hal itu juga termasuk rekomendasi yang diajukan Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ke pemerintah Indonesia agar melarang persebaran paham wahabi takfiri. Menurutnya belum ada rekomendasi resmi dari PBNU soal persebaran paham wahabi takfiri.

"Belum (belum resmi PBNU, red)," katanya.

Lembaga Dakwah PBNU Usulkan Pemerintah Larang Wahabi

Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah Indonesia melarang persebaran paham wahabi. Selain itu, LD PBNU meminta gelaran *event* HijrahFest atau HijabFest dilarang.

Rekomendasi ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX LD PBNU pada 25-27 Oktober 2022 di UPT Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Rakernas ini menghasilkan sejumlah rekomendasi internal dan eksternal NU. Salah satu poin rekomendasinya adalah melarang penyebaran paham wahabi.

"Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah (dalam hal ini Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag) untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah, baik melalui majelis taklim, forum kajian, media online, maupun media sosial (dalam bentuk tulisan, audio, maupun visual)," bunyi rekomendasi itu seperti dikutip **detikcom** dari laman LD PBNU, Jumat (28/10/2022).

Baca juga:

[Din Syamsuddin soal Usulan LD PBNU Larang Wahabi Takfiri: Kedepankan Toleransi](#)

Selain itu, LD PBNU merekomendasikan pemerintah Indonesia agar melarang penyelenggaraan *event* yang menolak NKRI dan Pancasila. Beberapa di antaranya *event* milenial HijrahFest atau HijabFest.

"Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mewaspadaikan dan tidak memberikan izin penyelenggaraan kegiatan/event yang bertujuan untuk menolak NKRI dan Pancasila yang dibalut dengan penyelenggaraan kegiatan festival keagamaan ala milenial yang menarik minat generasi muda, seperti HijrahFest atau HijabFest," lanjutnya.

Rekomendasi ini karena paham wahabi dinilai kerap melontarkan tuduhan *bid'ah* dan pengkafiran.

Lampiran 12. Berita Kelima Detik.com

PBNU Anulir Rilis LDNU soal Wahabi: Tak Ada Persetujuan Rais Aam-Ketum

Indra Komara - detikNews

Selasa, 01 Nov 2022 00:55 WIB



Foto: Gus Ipul atau Saifullah Yusuf (Foto: Muhajir Arifin/detikcom)

Jakarta - Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau biasa dikenal Gus Ipul meluruskan pernyataan Lembaga Dakwah PBNU yang meminta pemerintah Indonesia melarang persebaran paham Wahabi tafsiri. Dia mengatakan pernyataan Lembaga Dakwah PBNU kontraproduktif dan menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

"Rilis LDNU kontra produktif dan tidak pernah dikonsultasikan dengan PBNU khususnya kepada Rais Aam dan Ketua Umum. Masalah sepenting ini mereka tidak konsultasi dan tidak memberitahukan," kata Gus Ipul, dalam keterangannya, Senin (31/10/2022).

Gus Ipul mengatakan PBNU langsung mengeluarkan instruksi bernomor 225/PB.03/A.I.03.41/99/10/2022 yang ditandatangani Ketua Umum KH Yahya Cholil Staqf dan Sekjen. Instruksi itu meminta tidak memberikan pernyataan yang bersifat strategis lebih-lebih urusan agama sebelum mendapatkan persetujuan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

"Seluruh hasil permusyawaratan yang dikeluarkan oleh lembaga, badan khusus maupun badan otonom harus dilaporkan kepada PBNU dalam hal ini Rais Aam dan Ketua Umum PBNU untuk mendapatkan persetujuan," katanya.

Dia mengatakan pernyataan lembaga belum mendapatkan persetujuan PBNU, maka perlu diabaikan karena bukan keputusan resmi perkumpulan.

Sekadar diketahui, instruksi PBNU ini dikeluarkan menyusul munculnya sejumlah rekomendasi dari LD PBNU hasil Rapat Kerja Nasional LD PBNU IX yang digelar di Asrama Haji Pondok gede, Jakarta, Kamis (27/10/2022). Hasil rekomendasi LD PBNU di antaranya minta pemerintah Indonesia untuk melarang penyebaran paham agama tertentu.

LDNU Larang Penyebaran Paham Wahabi

Sebelumnya, LDNU meminta pemerintah Indonesia melarang persebaran paham Wahabi. Selain itu, LD PBNU meminta gelaran event HijrahFest atau HijabFest dilarang.

Rekomendasi ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX LD PBNU pada 25-27 Oktober 2022 di UPT Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Rakernas ini menghasilkan sejumlah rekomendasi internal dan eksternal NU. Salah satu poin rekomendasinya adalah melarang penyebaran paham Wahabi.

"Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah (dalam hal ini Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag) untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah, baik melalui majelis taklim, forum kajian, media online, maupun media sosial (dalam bentuk tulisan, audio, maupun visual)," bunyi rekomendasi itu seperti dikutip detikcom dari laman LD PBNU, Jumat (28/10/2022).

Baca juga:

[Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi-HijrahFest](#)

Lampiran 13. Berita Keenam Detik.com

Respons Ansor Jatim soal Larangan Wahabi di Indonesia

Faiq Azmi - [detikJatim](#)

Selasa, 01 Nov 2022 09:29 WIB



Bendahara Ansor Jatim M Fawait. (Foto: Istimewa)

Surabaya - Lembaga Dakwah PBNU atau LDNU mendesak pemerintah agar melarang penyebaran paham Wahabi. Belakangan, pernyataan LD PBNU itu diluruskan oleh Sekjen PBNU Saifullah Yusuf karena belum ada persetujuan dari Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

Terkait dengan isu wahabi tersebut, PW GP Ansor Jatim mengaku siap menjalankan instruksi apapun dari PBNU. Pihaknya akan melawan apapun yang bisa membahayakan NKRI.

"Ideologi bangsa ini sudah sesuai dengan ajaran agama Islam, yang cinta damai, mengedepankan persatuan, mengedepankan keadilan. Apa yang disampaikan LD PBNU, meski masih bukan sikap resmi keorganisasian, saya nilai sebagai bentuk mempertahankan ideologi kita yang cinta damai, cinta persatuan, dan gotong royong," jelas Bendahara Ansor Jatim M. Fawait kepada [detikJatim](#), Selasa (1/11/2022).

Baca juga:**Spanduk Penolakan Pembangunan Markas Salafi-Wahabi
Terpasang di Sampang**

Pria yang akrab disapa Gus Fawait ini mengatakan ajaran wahabi takfiri selama ini banyak dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Kita tahu Wahabi ini dipandang menjadi ancaman pemersatu bangsa ke depan. Hal ini merupakan sebuah ancaman eksistensi bangsa Indonesia. Saya sebagai Ansor Jatim mengawal garda terdepan, membela ulama, mengawal ulama, mengawal fatwa ulama terkait larangan wahabi," jelasnya.

"Tentu kita akan terdepan melindungi NKRI. Kami di kader Ansor, ajaran yang pertama yaitu NKRI harga mati. Apa yang membahayakan NKRI akan jadi lawan kami dan tugas Ansor melawan. Apapun keputusan PBNU akan kita kawal, apalagi untuk keutuhan NKRI," ucapnya.

Menurut Gus Fawait, Indonesia mempunyai sejarah panjang terkait masuknya agama Islam hingga menjadi agama mayoritas selama berabad-abad. Baginya, Islam mengajarkan nilai yang baik dan menghargai satu sama lain.

"Bangsa Indonesia ini punya sejarah berbeda dibanding negara lain. Kita lihat dari masuknya Islam sampai menjadi agama mayoritas di Nusantara ini lewat jalur damai, budaya. Sehingga kondisinya beda dengan Eropa, dulu Islam mungkin masuk lewat jalur peperangan. Sehingga terjadi pergantian penguasa, maka awalnya Islam minoritas terus mayoritas terus minoritas lagi," sebut Gus Fawait.

Dia melanjutkan, Islam di Indonesia bisa bertahan sejak zaman kerajaan, penjajahan, hingga sekarang karena lentur. Artinya, Islam bisa menghargai perbedaan dan punya toleransi antarumat beragama lainnya.

"Saya kira ajaran Islam *rahmatan lil alamin* adalah toleransi antarsesama umat dan menghargai sesama. Kami Ansor Jatim selalu mengedepankan persaudaraan dalam perbedaan," tandasnya.

Lampiran 14. Berita Ketujuh Detik.com

PWNU Jatim Sentil Kekompakan PBNU soal Gaduh Larangan Wahabi Takfiri

Faiq Azmi - detikJatim

Selasa, 01 Nov 2022 19:42 WIB



Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib mengkritisi komunikasi PBNU soal larangan wahabi takfiri. (Foto: Enggran Eko Budiarto/File detikJatim)

Surabaya - PWNU Jatim mengkritisi PBNU soal gaduh larangan wahabi takfiri. Awalnya, Lembaga Dakwah (LD) PBNU atau LDNU meminta pemerintah agar melarang penyebaran wahabi. Namun, belakangan melalui Sekjen Saifullah Yusuf, PBNU mengatakan belum ada persetujuan Rais Aam dan Ketua Umum terkait larangan tersebut.

Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib menyindir kekompakan PBNU soal wahabi takfiri ini. Adanya perbedaan pernyataan antara LDNU dengan Sekjen memperlihatkan PBNU yang kurang solid. Dia berharap koordinasi antara pengurus dengan badan otonom (banom) PBNU bisa diperbaiki.

"Semoga koordinasi dengan lembaga bisa diperbaiki, sehingga tidak terjadi *miss* komunikasi yang mengesankan kurang solid," jelas ulama yang akrab disapa Gus Salam tersebut kepada **detikJatim**, Selasa (1/11/2022).

Baca juga:**Respons Ansor Jatim soal Larangan Wahabi di Indonesia**

Soal wahabi takfiri, Gus Salam menilai, paham tersebut memang perlu diwaspadai. Sebab, mulai membahayakan untuk Indonesia.

"Wahabi ini cukup mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai," tambahnya.

Dari temuan Gus Salam, paham Wahabi banyak memberikan doktrin anti-NKRI kepada para pengikutnya. Dia menyebut, hal tersebut bisa mengancam NKRI.

Baca juga:**Spanduk Penolakan Pembangunan Markas Salafi-Wahabi Terpasang di Sampang**

"Karena memang yang banyak memberikan doktrin-doktrin anti-NKRI dan nasionalisme serta mengarah ke takfiri ya mereka," ujarnya.

Namun, Gus Salam juga menyatakan, perlu kajian mendalam terkait apa yang diinginkan LD PBNU ke pemerintah untuk melarang paham Wahabi.

"Baik, tapi memang perlu kajian mendalam. Faktanya tidak disetujui oleh Rais Aam dan Ketum," tukas pengasuh Ponpes Denanyar Jombang tersebut.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Halimah Tusyadiyah
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 17 Juli 2002
Alamat : Jalan Tentara Pelajar RT 01 RW 08, Kelurahan Bojongbata,
Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Email : halimahtusyadiyah177@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. UIN Walisongo Semarang
2. MAN Pemalang
3. MTs Pemalan
4. SDN 11 Mulyoharjo Pemalang

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Bidang Kominfo KSR PMI UIN Walisongo Semarang
2. Koordinator Departemen Dakwah Rohis MAN Pemalang
3. Humas Rohis MAN Pemalang
4. Wakil Ketua PMR Wira MAN Pemalang
5. Koordinator Kesehatan PMR Madya MTs Pemalang